



Kabupaten
GRESIK



**TAHUN
2023**



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)**



BUPATI GRESIK

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-nya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur. Hal ini menjadi sebuah kewajiban bagi setiap Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan daerah untuk melaksanakan koreksi melalui evaluasi secara menyeluruh terhadap berjalannya suatu pemerintahan daerah. Di samping itu, laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD bertujuan untuk meningkatkan citra pemerintahan daerah yang semakin transparan, akuntabel dan berorientasi pelayanan, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai sarana laporan hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka laporan ini minimal menyajikan 2 (dua) substansi pokok capaian kinerja yang disajikan, Antara lain :

1. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari :
 - a. Capaian kinerja makro;
 - b. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diukur dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome (hasil) dan Output (keluaran)
 - c. Capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
2. Capaian kinerja penyelenggaraan tugas pembantuan.

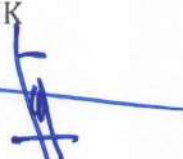
Sebagai kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka struktur, ruang lingkup dan substansi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan secara teknis penyusunannya berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Desember 2023 Nomor: 100.2.2.7/OTDA



perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini dibuat, terima kasih kepada semua pihak dan seluruh dukungan data dari Perangkat Daerah di Kabupaten Gresik yang telah berkontribusi besar dalam penyusunan laporan ini dan semoga bermanfaat bagi semua pihak untuk diketahui masyarakat seluas-luasnya dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di masa yang akan datang.

Gresik, 28 Maret 2024

 **BUPATI GRESIK**

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

JUDUL

KATA PENGANTAR	ii
----------------	----

DAFTAR ISI	iv
------------	----

BAB I PENDAHULUAN

I.1.	Penjelasan Umum	1
	A Dasar Hukum	2
	B Data Geografis Wilayah	3
	C Jumlah Penduduk	9
	D Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	13
	E Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintahan	17
	F Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah	29
I.2.	Perencanaan Pembangunan Daerah	34
	A. Visi dan Misi Kepala Daerah	35
I.3.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	35

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 36

II.1	Kinerja Makro	37
II.2	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	38
II.2.1	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	40
	1 Urusan Pendidikan	40
	2 Urusan Kesehatan	50
	3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60
	4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	68
	5 Urusan Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan	71

	Masyarakat	
6	Urusan Sosial	76
7	Urusan Tenaga kerja	79
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	82
9	Urusan Pangan	85
10	Urusan Pertanahan	86
11	Urusan Lingkungan Hidup	87
12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	89
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	9
14	Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	95
15	Urusan Perhubungan	97
16	Urusan Komunikasi dan Informatika	99
17	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	104
18	Urusan Penanaman Modal	106
19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	109
20	Urusan Statistik	110
21	Urusan Persandian	111
22	Urusan Kebudayaan	115
23	Urusan Perpustakaan	117
24	Urusan Kearsipan	118
25	Urusan Kelautan&Perikanan	120
26	Urusan Pariwisata	121
27	Urusan Pertanian	122
28	Urusan Kehutanan	122
29	Urusan Energi dan Sumber daya mineral	122
30	Urusan Perdagangan	122
31	Urusan Perindustrian	124
32	Urusan Transmigrasi	127
II.2.2	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	129
1	Urusan Pendidikan	129
2	Urusan Kesehatan	129
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	131
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	133
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat	134
6	Urusan Sosial	135
7	Urusan Tenaga kerja	135
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	136
9	Urusan Pangan	136
10	Urusan Pertanahan	136

11	Urusan Lingkungan Hidup	137
12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	137
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	138
14	Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	138
15	Urusan Perhubungan	138
16	Urusan Komunikasi dan Informatika	138
17	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	139
18	Urusan Penanaman Modal	139
19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	139
20	Urusan Statistik	139
21	Urusan Persandian	140
22	Urusan Kebudayaan	140
23	Urusan Perpustakaan	140
24	Urusan Kearsipan	140
25	Urusan Kelautan dan Perikanan	140
26	Urusan Pariwisata	141
27	Urusan Pertanian	141
28	Urusan Kehutanan	141
29	Urusan Energi dan Sumber daya mineral	141
30	Urusan Perdagangan	142
31	Urusan Perindustrian	142
32	Urusan Transmigrasi	144
II.2.3	Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah	144
1	Urusan Pemerintahan(Perencanaan & Keuangan)	144
2	Urusan Pemerintahan(Pengadaan)	144
3	Urusan Pemerintahan(Kepegawaian)	145
4	Urusan Pemerintahan(Manajemen Keuangan)	145
5	Urusan Pemerintahan(Transparansi & Partisipasi Publik)	146
II.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	147
1	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja	152
2	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	155
3	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah	158

4 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan rata rata Capaian Nasional	161
5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	164
6 Alokasi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan	170
7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja0 yang telah dicapai	173
8 Analisis Program/ kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Target Kinerja	176
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	210
A. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	211
B. Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya	211
C. Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaiannya	220
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	222
4.1 Bidang Urusan Pendidikan	301
4.2 Bidang Urusan Kesehatan	316
4.3 Bidang Urusan PekerjaanUmum	354
4.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat	365
4.5 Bidang Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	377
4.6 Bidang Urusan Sosial	400
4.7 Program dan Kegiatan	414
BAB V PENUTUP	428



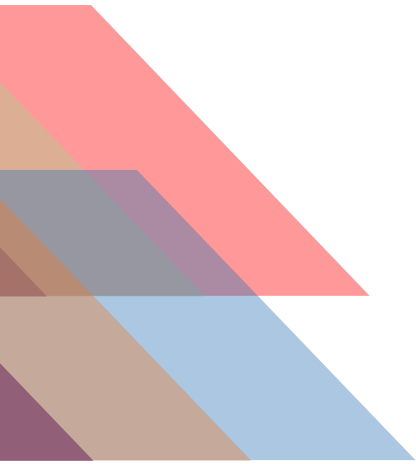
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Luas Wilayah Menurut Kecamatan Se Kabupaten Gresik.....	3
Tabel 1.2 Ketinggian per Kecamatan Beserta Luasnya di Kabupaten Gresik (Ha)...	5
Tabel 1.3 Kelerengan per Kecamatan Beserta Luasnya Kabupaten Gresik (ha)...	6
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2022-2023	10
Tabel 1.5 Jumlah Kartu Keluarga Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2023.....	11
Tabel 1.6 Struktur Penduduk menurut kelompok umur Kabupaten Gresik Tahun 2023	11
Tabel 1.7 Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Berdasarkan Agama Tahun 2023	12
Tabel 1.8 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Gresik	13
Tabel 1.9 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik	17
Tabel 1.10 Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023	20
Tabel 1.11 Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Pendidikan Tahun 2023	23
Tabel 1.12 Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Usia Tahun 2023	26
Tabel 1.13 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	29
Tabel 1.14 Hasil Pajak Daerah Tahun 2023	
Tabel 1.15 Retribusi Daerah Tahun 2023	
Tabel 1.16 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
Tabel 1.17 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
Tabel 1.18 Dana Perimbangan Tahun 2023	
Tabel 1.19 Pendapatan Hibah	
Tabel 1.20 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023	
Tabel 1.21 Realisasi Pembiayaan Daerah.....	34

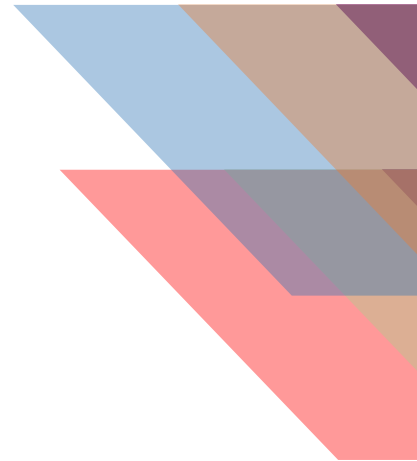


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Gresik	4
Gambar 1.2	Peta Sungai dan Waduk Kabupaten Gresik	7
Gambar 1.3	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Gresik.....	8
Gambar 1.4	Prosentase Jumlah Penduduk Per Kecamatan.....	9
Gambar 1.5	Tingkat Kepadatan Penduduk Per Kecamatan.....	9
Gambar 1.6	Grafik Jumlah Penduduk Tahun 2021 – 2023.....	11
Gambar 1.7	Grafik Sebaran Keluarga dan Penduduk di Kabupaten Gresik Tahun 2020	12
Gambar 1.8	Prosentase Struktur Penduduk Tahun 2021	12
Gambar 1.9	Prosentase Penduduk berdasarkan agama yang dianut.....	13
Gambar 1.10	Prosentase Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin	22
Gambar 1.11	Prosentase ASN Kabupaten Gresik Berdasarkan Rentang Usia	29



PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

2.1.Penjelasan Umum

A. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 disusun berdasarkan pada peraturan sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Desember 2023 Nomor : 100.2.2.7/8697/OTDA perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun
Anggaran 2024;

B. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Gresik termasuk salah satu kabupaten di dalam wilayah pesisir utara Provinsi Jawa Timur. Letak Kabupaten Gresik berada di sebelah barat laut Kota Surabaya yang merupakan ibu Kota Provinsi. Pusat Pemerintahan Kabupaten Gresik yaitu Kecamatan Kebomas berada 20 Km sebelah Utara Kota Surabaya. Kabupaten Gresik terbagi dalam 18 Kecamatan dan terdiri dari 330 desa dan 26 kelurahan. Secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak Antara 112°–113° BT dan 7°–8° LS dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2-12 meter di atas permukaan air laut, kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Gresik berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Timur : Kota Surabaya dan Selat Madura
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto
4. Sebelah Barat : Kabupaten Lamongan

Seperti halnya daerah lain yang berada di sekitar garis khatulistiwa, Kabupaten Gresik beriklim tropis basah dan kering dan mengenal 2 musim kemarau dan musim penghujan. Musim penghujan di Kabupaten Gresik biasanya berlangsung sejak bulan Desember hingga Maret dengan Bulan terbasah Januari yang Jumlah curah hujan perbulanya lebih dari 250 mm per bulan, sedangkan musim kemarau dari bulan Mei hingga bulan Oktober dengan Bulan terkering adalah Agustus Suhu Rata-rata tahunan di Wilayah Kabupaten Gresik adalah $\pm 28,3^{\circ}\text{C}$ dan tingkat kelembapan nisbi sebesar $\pm 76\%$. Jumlah curah hujan tahunan di wilayah Gresik adalah 1200–1600 mm per tahun dan dengan jumlah hari hujan berkisar antara 90–120 hari hujan per tahun.

Luas wilayah Kabupaten Gresik dengan total luas wilayah 1.191,25 km² yang terbagi di wilayah daratan luasnya 993,83 Km² dan wilayah kepulauan luasnya 197,42 Km². Wilayah administrasi terbagi dalam 18 Kecamatan (2 Kecamatan berada di Pulau Bawean) yang terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan.

Kecamatan Sangkapura merupakan wilayah kecamatan terluas di Kabupaten Gresik yaitu dengan luas 118,72 Km² atau sekitar 9,97 % terhadap luas Kabupaten Gresik. Sedangkan wilayah terkecil di Kabupaten Gresik adalah Kecamatan Gresik yaitu seluas 5,54 Km² atau sekitar 0,47 % terhadap luas Kabupaten Gresik.

Tabel 1.1
Data Luas Wilayah
Menurut Kecamatan Se Kabupaten Gresik

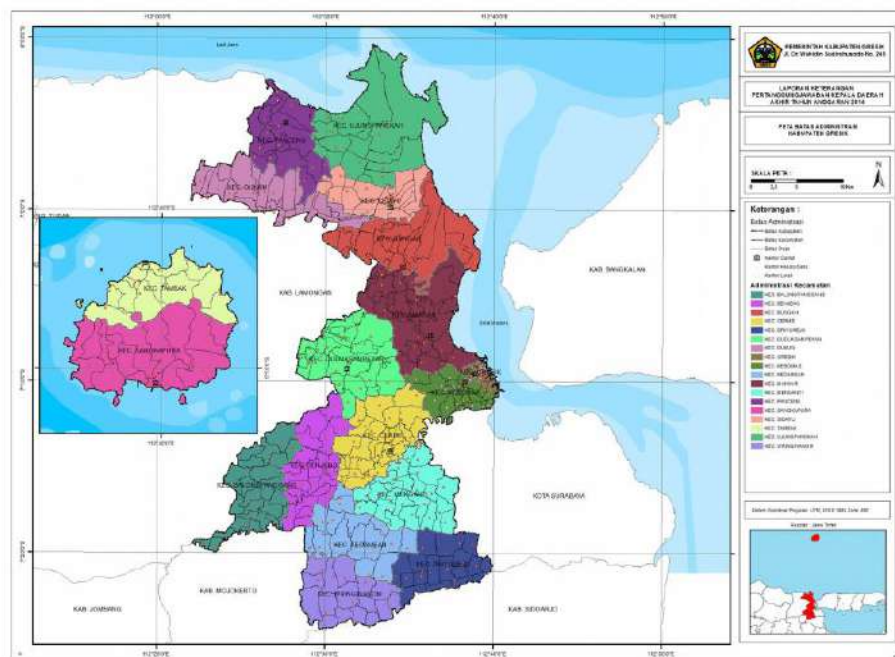
NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km ²)	% TERHADAP LUAS KABUPATEN
1	Dukun	59,03 Km ²	4.96
2	Balongpanggang	63,88 Km ²	5.36

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km ²)	% TERHADAP LUAS KABUPATEN
3	Panceng	62,59 Km ²	5.25
4	Benjeng	61,26 Km ²	5.14
5	Dudusampeyan	74,29 Km ²	6.24
6	Wringinanom	62,62 Km ²	5.26
7	Ujungpangkah	94,82 Km ²	7.96
8	Kedamean	65,96 Km ²	5.54
9	Sidayu	47,13 Km ²	3.96
10	Manyar	95,42 Km ²	8.01
11	Cerme	71,73 Km ²	6.02
12	Bungah	79,49 Km ²	6.67
13	Menganti	68,71 Km ²	5.77
14	Kebomas	30,06 Km ²	2.52
15	Driyorejo	51,30 Km ²	4.31
16	Gresik	5,54 Km ²	0.47
17	Sangkapura	118,72 Km ²	9.97
18	Tambak	78,70 Km ²	6.61
Jumlah		1.191,25 Km ²	100,00

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kab. Gresik

Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter diatas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Gresik



Sumber data : Bapelitbangda Kab.Gresik



Kabupaten Gresik merupakan kawasan yang berpotensi berkembang pesat dalam konstelansi Surabaya Metropolitan Area. Posisi Strategis Kabupaten Gresik terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 dimana Kawasan perkotaan yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Jawa Timur adalah Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila(Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo, Lamongan).

Berdasarkan kondisi topografis, pada umumnya Ketinggian tempat di Wilayah Kabupaten Gresik berada pada 0 – 500 m diatas permukaan laut (dpl) pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong. Distribusi wilayah di Kabupaten Gresik berdasarkan ketinggian dapat diuraikan sebagai berikut :

- Wilayah dengan ketinggian 0 –10 mdpl seluas 92.843,00 ha atau sekitar 79,08% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik.
- Wilayah dengan ketinggian 10 – 20 mdpl mempunyai luas 18.246,00 ha atau sekitar 15,54%.
- Ketinggian diatas 20 mdpl mempunyai luas 6.318,00 ha atau sekitar 5,38%.

Adapun distribusi ketinggian wilayah Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Ketinggian per Kecamatan Beserta Luasnya di Kabupaten Gresik (Ha)

Kecamatan	Ketinggian			Jumlah
	0-10 Meter dpl	10-20 Meter dpl	>20 Meter dpl	
Wringinanom	0,00	6.254,00	0,00	6.262,00
Driyorejo	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
Kedamean	6.588,00	0,00	0,00	6.596,00
Menganti	6.196,00	0,00	0,00	6.367,00
Cerme	6.126,00	0,00	0,00	6.126,00
Benjeng	0,00	6.862,00	0,00	6.871,00
Balongpanggang	7.167,00	0,00	0,00	7.167,00
Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	7.449,00
Kebomas	2.966,00	0,00	0,00	3.433,00
Gresik	524,00	0,00	0,00	799,00
Manyar	8.287,00	0,00	0,00	8.671,00
Bungah	8.022,00	0,00	0,00	7.936,00
Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	4.521,00
Dukun	5.909,00	0,00	0,00	5.909,00
Panceng	0,00	0,00	6.318,00	6.529,00
Ujungpangkah	9.470,00	0,00	0,00	10.406,00
Sangkapura	11.872,00	0,00	0,00	11.872,00

Tambak	7.755,00	0,00	0,00	7.739,00
Jumlah	92.843,00	18.246,00	6.318,00	119.513,00
Prosentase	79,08	15,54	5,38	100,00

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik 2020-2040

Kondisi topografi pada Kabupaten Gresik bervariasi pada kemiringan 0 – 2%, 3 – 15%, dan 16 – 40% serta lebih dari 40%. Sebagian besar mempunyai kemiringan 0 - 2% mempunyai luas 94.613,00 Ha atau sekitar 80,59%, sedangkan wilayah yang mempunyai kemiringan lebih dari 40% lebih sedikit 1.072,23Ha atau sekitar 0,91% yang tersebar pada Kecamatan Ujungpangkah dan 2 (dua) kecamatan di Pulau Bawean yaitu Tambak dan Sangkapura. Adapun sebaran Kelerengan beserta luasnya per Kecamatan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Kelerengan per Kecamatan Beserta Luasnya Kabupaten Gresik (ha)

Kecamatan	Lereng				Jumlah
	0-2 %	3-15 %	16-40 %	>40 %	
Wringinanom	3.968,00	2/286,00	0,00	0,00	6.262,00
Driyorejo	4.680,00	450,00	0,00	0,00	5.130,00
Kedamean	5.684,00	904,00	0,00	0,00	6.596,00
Menganti	6.196,00	0,00	0,00	0,00	6.367,00
Cerme	6.126,00	0,00	0,00	0,00	6.126,00
Benjeng	6.862,00	0,00	0,00	0,00	6.871,00
Balongpanggang	7.167,00	0,00	0,00	0,00	7.167,00
Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.449,00
Kebomas	2.409,00	518,00	39,00	0,00	3.433,00
Gresik	524,00	0,00	0,00	0,00	799,00
Manyar	8.197,00	90,00	0,00	0,00	8.671,00
Bungah	8.022,00	0,00	0,00	0,00	7.936,00
Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	0,00	4.521,00
Dukun	5.909,00	0,00	0,00	0,00	5.909,00
Panceng	3.897,00	2.324,00	72,00	25,00	6.529,00
Ujungpangkah	8.063,00	972,00	243,00	192,00	10.406,00
Sangkapura	4.805,00	2.050,34	4.216,68	799,98	11.872,00
Tambak	143,00	2.756,94	4.899,81	55,25	7.739,00
Jumlah	94.613,00	12.251,28	9.470,49	1.071,23	119.513,00
Prosentase	80,59	10,43	8,07	0,91	100,00

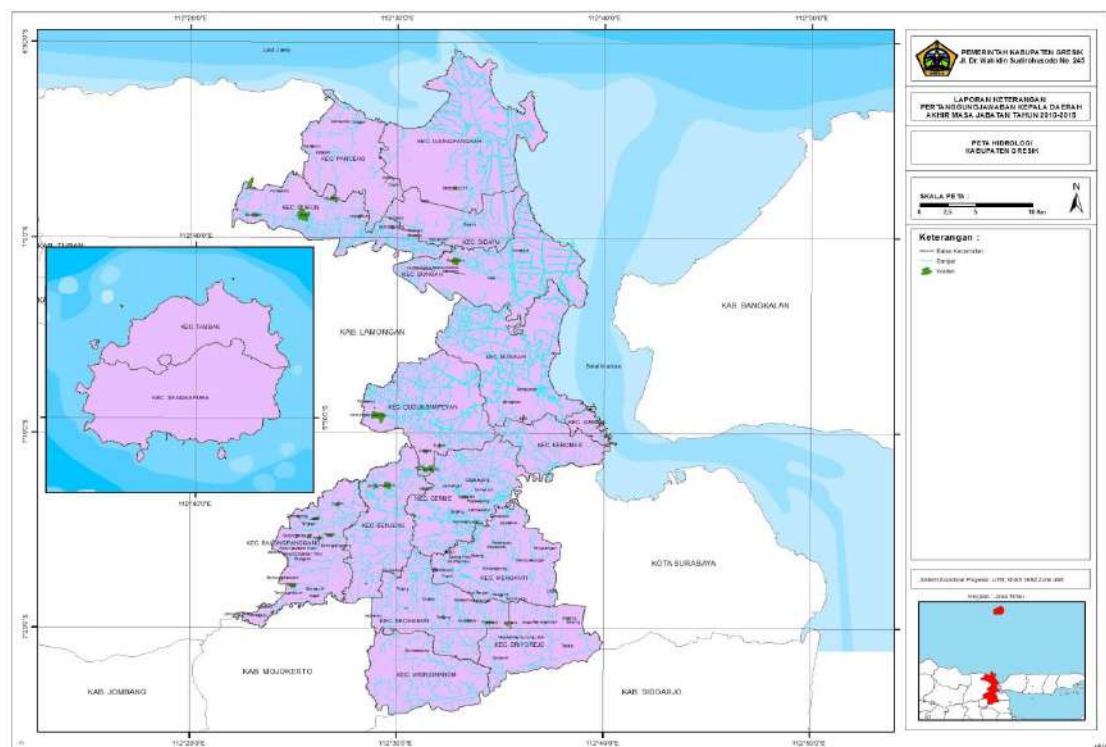
Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik 2020-2040

Secara Hidrografi, keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa saja yang mempunyai permukaan air tanah agak dangkal. Pola aliran sungai di Kabupaten Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui

oleh Kali Surabaya di Wilayah Selatan. Sungai-sungai ini memiliki sifat aliran dan kandungan unsur hara yang berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi dengan membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong, sehingga pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan. Selain dialiri oleh sungai-sungai tersebut diatas keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, mata air, pompa air dan sumur bor.

Semua sumber air baku dari dam, waduk, telaga, bendungan serta sungai-sungai klasifikasi I – IV, airnya dapat dimanfaatkan secara langsung dan dikembangkan untuk berbagai kepentingan.

Gambar 1.2
Peta Sungai dan Waduk Kabupaten Gresik



Sumber data: Bappeda Kabupaten Gresik

Secara **Klimatologi**, seperti halnya kondisi Jawa Timur lainnya, di wilayah Kabupaten Gresik mempunyai kondisi iklim yang hampir sama. Iklim Kabupaten Gresik termasuk tropis dengan temperatur rata-rata 28,5°C dan kelembaban udara rata-rata 2.245 mm per tahun. Temperatur minimum terjadi pada bulan Juli sedangkan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Radiasi matahari terbesar 84 % terjadi pada bulan Maret, kecepatan angin berkisar antara 4-6 per detik dengan arah rata-rata ke Selatan. Iklim daerah Kabupaten Gresik dibedakan menjadi :

- musim kering terjadi pada bulan Juni sampai dengan Bulan September;
- musim penghujan basah terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret;

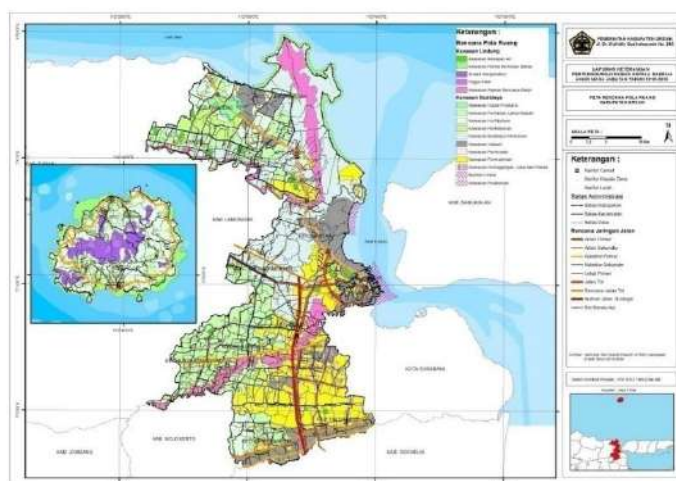
- c. musim peralihan dari musim kemarau sampai musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan November; dan
- d. musim peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau terjadi pada bulan April dan Mei.

Adapun secara **Penggunaan Lahan**, Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 rencana peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan Lindung
 1. Kawasan Rawan Bencana Banjir 9,426.12 hektar;
 2. Kawasan Pantai Berhutan Bakau 5,828.62 hektar;
 3. Kawasan Terumbu Karang 5,387.00 hektar;
 4. Blok Rimba Suaka Marga Satwa 3,831.60 hektar;
 5. Kawasan Resapan Air 1,252.58 hektar;
 6. Kawasan Cagar Alam 725.00 hektar;
- b. Kawasan Budidaya
 1. Kawasan Permukiman 26,063.55 hektar;
 2. Kawasan Pertanian Lahan Basah 23,372.70 hektar;
 3. Kawasan Perikanan Budidaya 21,678.36 hektar;
 4. Kawasan Hortikultura 16,885.48 hektar;
 5. Kawasan Industri 12,448.03 hektar;
 6. Kawasan Perdagangan, Jasa, dan Fasum 6,644.01 hektar;
 7. Kawasan Perkebunan 2,573.67 hektar;
 8. Kawasan Hutan Produksi 1,017.00 hektar;
 9. Kawasan Pertambangan 817.25 hektar;
 10. Kawasan Pariwisata 82.85 hektar;
 11. Kawasan Bandar Udara 68.44 hektar;
 12. Kawasan Pelabuhan 1,257.69 hektar;

Peta rencana pola ruang Kabupaten Gresik sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar. I.3
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Gresik



Sumber data : RTRW Kab. Gresik Tahun 2010- 2030

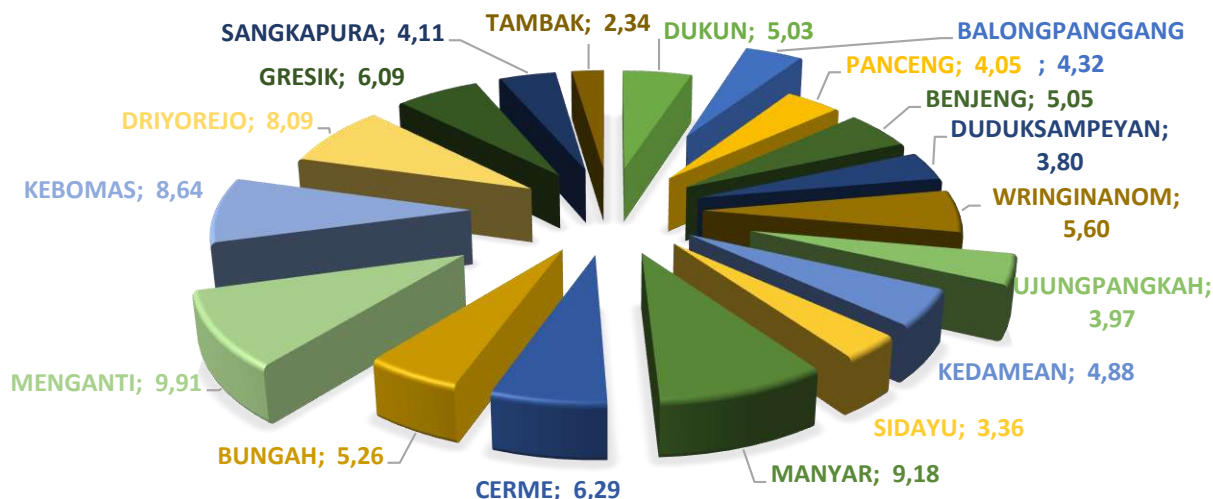


C. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2023 sebanyak **1.296.688** jiwa yang terdiri dari **651.463** laki-laki dan **645.225** perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2023 sebesar **1088,50** jiwa/Km². Sedangkan angka rasio jenis kelamin perempuan dibanding laki-laki pada tahun 2023 sebesar 1:1.

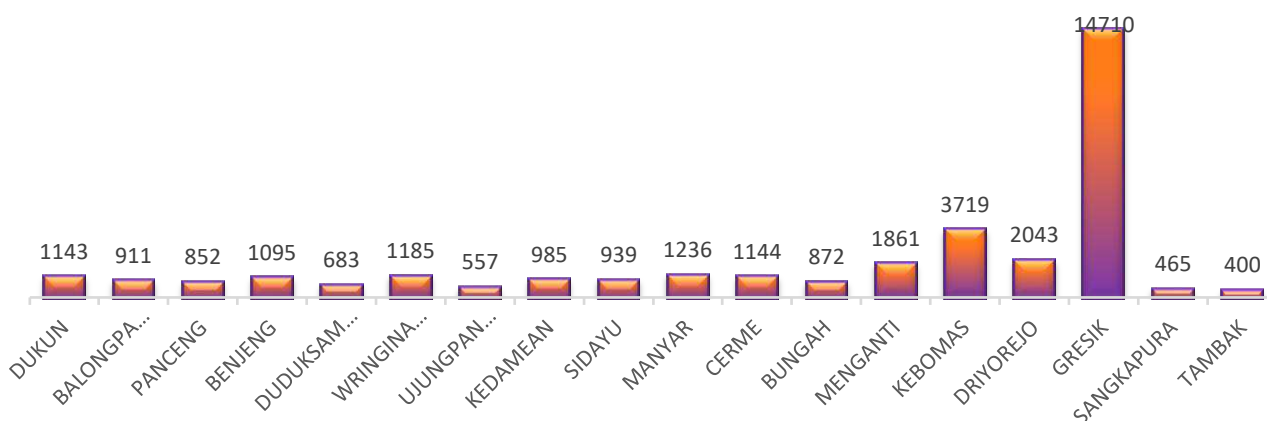
Wilayah dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Menganti dengan jumlah penduduk sebanyak 127.809 jiwa (9,86% dari penduduk Kabupaten Gresik) dan wilayah dengan penduduk paling kecil adalah Kecamatan Tambak dengan jumlah penduduk 30.333 jiwa (2,34% terhadap penduduk Kabupaten Gresik).

Gambar.1.4
Prosentase Penduduk Per Kecamatan



Wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Gresik sebesar 14.710 jiwa/Km² dan terendah ada di Kecamatan Tambak yaitu 400 jiwa/Km².

Gambar I.5
Tingkat Kepadatan Penduduk Per Kecamatan





Jumlah penduduk Kabupaten dengan rincian per kecamatan dapat dilihat di tabel di bawah ini :

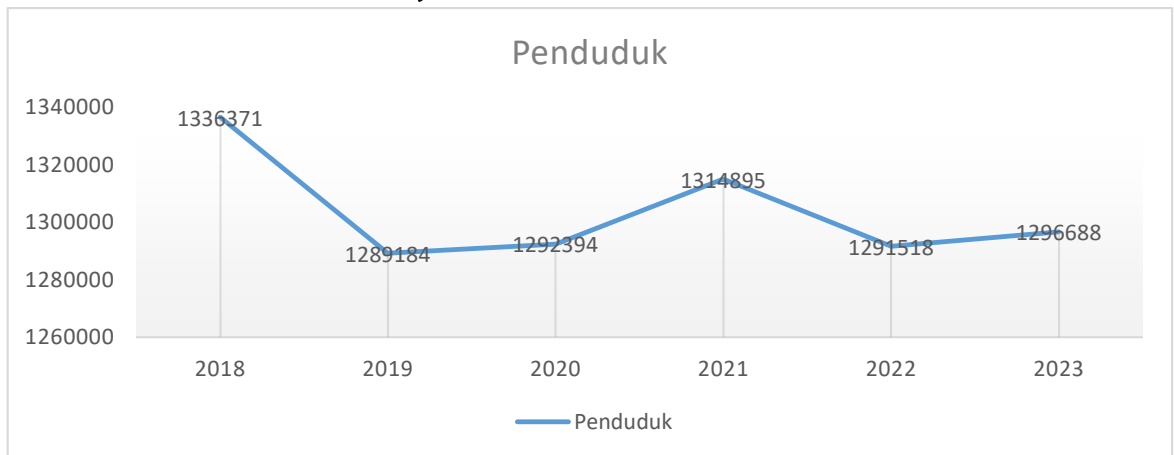
Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2022-2023

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk					
		Tahun 2022			Tahun 2023		
		L	P	Total	L	P	Total
1	DUKUN	33.042	32.576	65.618	33.085	32.547	65.632
2	BALONGPANGGANG	28.051	28.289	56.340	28.055	28.285	56.290
3	PANCENG	26.138	26.202	52.340	26.318	26.308	52.626
4	BENJENG	32.829	32.595	65.424	32.926	32.686	65.612
5	DUDUKSAMPEYAN	24.706	24.701	49.407	24.726	24.744	49.470
6	WRINGINANOM	36.429	35.879	72.308	36.620	36.052	72.672
7	UJUNGPAKKAH	25.945	25.775	51.720	25.982	25.778	51.760
8	KEDAMEAN	31.841	31.297	63.138	31.907	31.383	63.290
9	SIDAYU	21.984	21.610	43.594	22.041	21.648	43.689
10	MANYAR	59.282	58.193	117.475	59.782	58.655	118.437
11	CERME	40.834	40.259	81.093	41.028	40.432	81.460
12	BUNGAH	34.346	33.637	67.983	34.455	33.746	68.201
13	MENGANTI	63.920	62.886	126.806	64.398	63.411	127.809
14	KEBOMAS	55.890	55.641	111.531	56.122	55.946	112.068
15	DRIYOREJO	52.248	51.470	103.718	52.559	51.843	104.402
16	GRESIK	39.802	40.334	80.136	39.584	40.231	79.815
17	SANGKAPURA	26.568	26.164	52.732	26.819	26.303	53.122
18	TAMBAK	15.006	15.149	30.155	15.106	15.227	30.333
JUMLAH		648.861	642.657	1.291.518	651.463	645.255	1.296.688
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)		-2,85		-0,45			0,004
KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/Km ²)		1,089		1,031	0,002	0,002	0,001

Sumber data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik

Dari Tabel di atas Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2023 di banding tahun 2022 mengalami Kenaikan penduduk sebesar 5,170 %, dibanding tahun sebelumnya (Tahun 2022) ini dipengaruhi fluktuatif kenaikan dan penurunan dipengaruhi mortalitas, fertilitas, dan migrasi juga dipengaruhi pemutakhiran data penduduk baik berbasis keluarga maupun individu guna mewujudkan ketunggalan identitas.

Gambar 1. 6
Grafik Jumlah Penduduk Tahun 2018 – 2023



Sumber data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik

Adapun Jumlah keluarga di Kabupaten Gresik pada Tahun 2023 sebanyak 404.702 keluarga. Dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebanyak 408.450 keluarga maka terjadi Penurunan jumlah keluarga sebanyak 3.748 Keluarga atau 0,93 %. Adapun rincian jumlah keluarga di Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut :

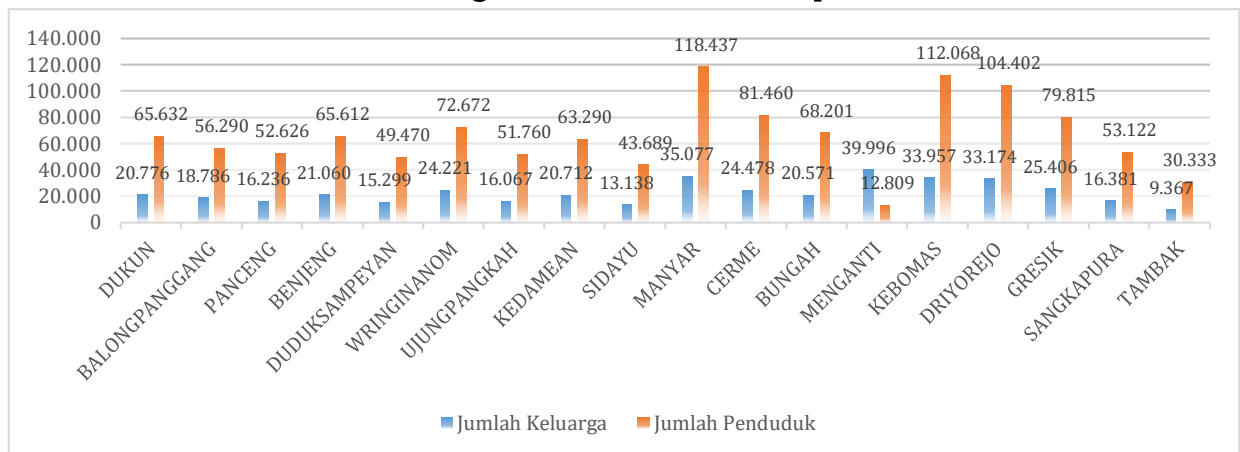
Tabel 1. 5
Jumlah Kartu Keluarga Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2023

No	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KELURAHAN	JUMLAH KK		
			2021	2022	2023
1	DUKUN	26	21.088	20.776	21.340
2	BALONGPANGGANG	25	19.086	18.786	19.294
3	PANCENG	14	16.292	16.236	16.835
4	BENJENG	23	21.363	21.060	21.810
5	DUDUKSAMPEYAN	23	15.553	15.299	15.747
6	WRINGINANOM	16	24.711	24.221	25.029
7	UJUNGPAKKAH	13	16.246	16.067	16.663
8	KEDAMEAN	15	21.022	20.712	21.395
9	SIDAYU	21	13.219	13.138	13.631
10	MANYAR	23	35.087	35.077	36.795
11	CERME	25	24.580	24.478	25.696
12	BUNGAH	22	20.873	20.571	21.312
13	MENGANTI	22	38.792	40.159	42.157
14	KEBOMAS	21	33.156	34.009	35.254
15	DRIYOREJO	16	32.205	33.327	34.753
16	GRESIK	21	25.463	25.755	25.821
17	SANGKAPURA	17	15.977	16.610	16.879
18	TAMBAK	13	9.117	9.470	9.796
	JUMLAH	356	397.567	408.450	420.207

Sumber data: Dispendukcapil Kab. Gresik Tahun 31 Desember 2023

Berdasarkan sebaran keluarga dan jumlah penduduk sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa pada tahun 2023, jumlah keluarga terbanyak di Kecamatan Menganti dengan 42.157 KK selaras dengan jumlah penduduk terbanyak 129.230 jiwa. Sedangkan persebaran keluarga terendah berada pada Kecamatan Tambak dengan 9470 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 30.555 jiwa. berikut digambarkan perbandingan jumlah penduduk dan kepemilikan kartu keluarga sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.7
Grafik Sebaran Keluarga dan Penduduk di Kabupaten Gresik Tahun 2022



Penduduk Kabupaten Gresik dilihat dari agama yang dianut didominasi oleh agama Islam yaitu sejumlah 1287.480 orang, penduduk yang beragama Kristen sejumlah 11.015 orang, penduduk yang beragama Katholik sejumlah 3122 orang, penduduk yang beragama Hindu sejumlah 1.833 orang, penduduk yang beragama Budha sejumlah 532 orang, yang beragama Konghucu 5 Orang dan penduduk yang beragama lainnya sejumlah 216 orang

Tabel.1.7
Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Berdasarkan Agama Tahun 2023

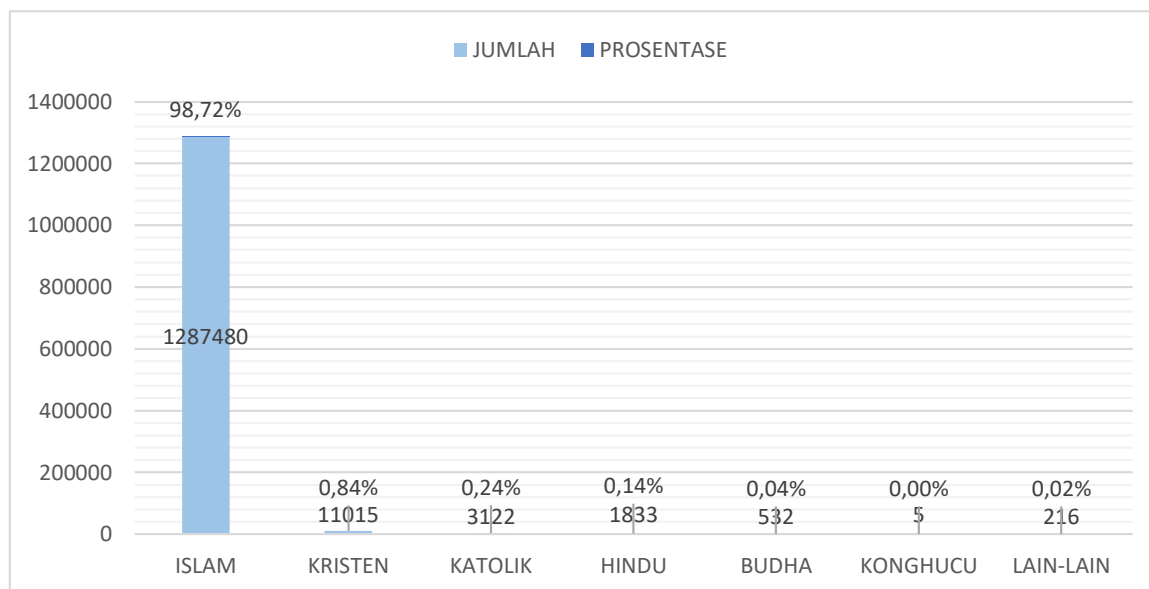
NO	KECAMATAN	ISLAM	KRISTEN	KATOLIK	HINDU	BUDHA	KONG HUCU	LAIN LAIN	JUMLAH
1	DUKUN	65627	1	0	0	0	0	0	65628
2	BALONGPANGGANG	56204	158	18	4	9	0	4	56397
3	PANCENG	52825	3	3	0	0	0	0	52831
4	BENJENG	65408	437	40	0	2	0	17	65904
5	DUDUKSAPEYAN	49575	5	16	0	1	0	0	49597
6	WRINGINANOM	72233	674	79	34	1	0	26	73047
7	UJUNGPAKKAH	51805	3	0	0	0	0	0	51808
8	KEDAMEAN	63239	287	104	19	6	0	54	63709
9	SIDAYU	43833	2	0	0	0	0	0	43835
10	MANYAR	118485	890	253	73	27	0	2	119730
11	CERME	81238	652	98	8	0	0	52	82048
12	BUNGAH	68583	11	4	0	0	0	0	68598
13	MENGANTI	124260	2628	668	1531	95	1	47	129230
14	KEBOMAS	110402	1508	571	67	112	0	5	112665
15	DRIYOREJO	101606	2868	861	75	85	0	6	105501
16	GRESIK	77941	886	407	22	194	4	3	79457

NO	KECAMATAN	ISLAM	KRISTEN	KATOLIK	HINDU	BUDHA	KONG HUCU	LAIN LAIN	JUMLAH
17	SANGKAPURA	53662	1	0	0	0	0	0	53663
18	TAMBAK	30554	1	0	0	0	0	0	30555
JUMLAH		1287480	11015	3122	1833	532	5	216	1304203

Gambar 1.9 Prosentase Penduduk berdasarkan agama yang dianut

D.

Jumlah



Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 Kecamatan dengan 330 Desa dan 26 Kelurahan. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.8
Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Kelurahan/Desa	DUSUN
1	Dukun	26 Desa	Sawo, Petiyin Tunggal, Tebuwung, Bulangan, Ima'an, Karangcangkring, Mejopetung, Mentaras, Bangeran, Babaksari, Babakbowo, Sambogunung, Gedung Kedo'an, Tiremenggal, Madumulyorejo, Lowayu Sembunganyar, Irebeng, Dukuh Kembar, Baron, Sembungan Kidul, Kalirejo, Dukunanyar, Padang Bandung, Sekargadung, Wonokerto,	38 Dusun
2	Balongpanggang	25 Desa	Ngasin, Ganggang, Pinggir, Dohoagung, Klotok, Tenggor, Babatan, Pacuh, Pucung Balongpanggang, Wonorejo, Kedungsumber,	85 Dusun

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelu- rahan	Kelurahan/Desa	DUSUN
			Kedungpring, Mojogede, Bandungsekaran, Wahas, Karangsemanding, Banjaragung, Sekarputih, Wotansari, Tanahladean, Dapet, Brangkal, Jombangdelik, Ngampel	
3	Panceng	14 Desa	Banyutengah, Dalegan, Ketanen, Pantenan, Campurejo, Prupuh, Surowiti, Wotan, Siwalan, Sukodono, Sumurber, Serah, Doudo, Petung	14 Dusun
4	Benjeng	23 Desa	Jatirembe, Jogodalu, Pundut Trate, Metatu, Banter, Munggugebang, Klampok, Kedungsekar, Sirnobojo, Karangkidul, Dermo, Kalipadang, Bulurejo, Munggugianti, Kedungrukem, Bengkelolor, Gluranpelo, Deliksumber, Sedapurklagen, Bulangkulon, Lundo, Balongmojo, Balongtunjung	78 Dusun
5	Duduksampeyan	23 Desa	Kramat, Kemudi, Wadak Lor, Wadak Kidul, Glanggang, Pandaan, Kawistowindu, Petisbenem, Tumapel, Setrohadi, Tambakrejo, Samirplapan, Kandangan, Tebaloan, Ambeng- Ambeng Watangrejo, Panjunan, Sumengko, Sumari, Tirem, Gredek, Bendungan, Duduksampeyan, Palebon	39 Dusun
6	Wringinanom	16 Desa	Sooko, Kesambenkulon, Sumbergede, Padangan, Watestanjung, Sembung, Kepuhklagen, Pasinanlemahputih, Sumengko, Wringinanom, Sumberame, Lebaniwaras, Kedunganyar, Sumberwaru, Lebanisuko, Mondoluku	72 Dusun
7	Ujungpangkah	13 Desa	Pangkah Kulon, Pangkah Wetan, Banyu Urip, Ngemboh, Cangaan, Gosari, Kebonagung, Ketapanglor, Karangrejo, Bolo, Tanjangawan, Glatik, Sekapuk	28 Dusun

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Kelurahan/Desa	DUSUN
8	Kedamean	15 Desa	Cermen Lerek, Lampah, Glindah, Tulung, Turirejo, Katimoho, Slempit, Tanjung, Belahanrejo, Sidoraharjo, Mojowuku, Kedamean, Ngepung, Banyuurip, Manunggal	60 Dusun
9	Sidayu	21 Desa	Randu Boto, Wadeng, Sedangaran, Sambu Pondok, Mriyungan, Golokan, Sukorejo, Purwodadi, Racitengah, Srowo, Lasem, Kertosono, Ngawen, Pengulu, Bunderan, Sido Mulyo, Raci Kulon, Asem Papak, Gedangan, Kauman, Mojo Asem	16 Dusun
10	Manyar	23 Desa	Manyarejo, Morobakung, Tanggulrejo, Sembayat, Ngampel, Karangrejo, Gumeno, Sumberejo, Betoyoguci, Betoyokauman, Manyar Sidomukti, Leran, Sukomulyo, Penganden, Banjarsari, Pongangan, Roomo, Tebalo, Suci, Yosowilangun, Pejangganan, Banyuwangi, Manyar Sidorukun	47 Dusun
11	Cerme	25 Desa	Banjarsari, Padeg, Gedangkulut, Semampir, Wedani, Jono, Kambingan, Pandu, Cerme Lor, Cagakagung, Ngabetan, Kandangan, Cerme Kidul, Dungus, Betiting, Iker-Iker Geger, Dooro, Lengkong, Dampaan, Gununganyar, Morowudi, Ngembung, Dadapkuning, Sukoanyar, Tambakberas, Jono	60 Dusun
12	Bungah	22 Desa	Gumeng, Sungonlegowo, Bedanten, Tanjung Widoro, Indrodelik, Raciwetan, Pegundan, Kemangi, Mojopurowetan, Mojopurogede, Kisik, Sidomukti, Melirang, Watuagung, Abar-Abir, Sidokumpul, Kramat, Masangan, Bungah, Sidorejo, Sukorejo, Sukowati	67 Dusun
13	Menganti	22 Desa	Kepatihan, Hendrosari, Gempolkurung, Palemwatu,	78 Dusun

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Kelurahan/Desa	DUSUN
			Drancang, Pengalangan, Boteng, Gadingwatu, Randupadangan, Domas, Sidojankung, Hulaan, Setro, Bringkang, Sidowugu, Pranti, Menganti, Laban, Mojotengah, Boboh, Beton, Putatlor	
14	Kebomas	11 Desa	Dahanrejo, Giri, Karangkering, Kedanyang, Kembangan, Klangonan, Randuagung, Segoromadu, Sekarkurung, Sukorejo, Prambangan	56 Dusun
		10 Kelurahan	Gending, Gulomantung, Indro, KawisAnyar, Kebomas, Ngargosari, Sidomoro, Sidomukti, Singosari, Tenggulunan	
15	Driyorejo	16 Desa	Wedoroanom, Gadung, Randegansari, Petiken, Karangandong, Mojosarirejo, Mulung, Sumpat, Bambe, Kesambenwetan, Tenaru, Tanjungan, Banjaran, Cangkir, Driyorejo, Krikilan, Randengansari	49 Dusun
16	Gresik	5 Desa	Gapurosukolilo, Kramatinggil, Pulopancikan, Sidorukun, Tlogobendung	Tidak Ada Dusun
		16 Kelurahan	Bedilan, Karangpoh, Karangturi, Kebungson, Kemuteran, Kroman, Lumpur, Ngipik, Pekauman, Pekelingan, Sidokumpul, Sukodono, Sukorame, Tlogopatut, Tlogopojok, Trate.	
17	Sangkapura	17 Desa	Kebuntelukdalam, Gunungteguh, Patarselamat, Suwari, Pudakitbarat, Pudakittimur, Bululanjang, Daun, Lebak, Sunaiteluk, Sawahmulya, Kotakusuma, Balikterus, Dekatagung, Kumalasa, Sidogedungbatu, Sungairujing	116 Dusun
16	Tambak	13 Desa	Diponggo, Tambak, Kepuhteluk, Pekalongan, Grejeg, Sukalela, Kepuhlegundi, Klompongbugubug,	90 Dusun

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Kelurahan/Desa	DUSUN
			Paromaan, Tanjungori, Gelam, Sukaoneng, Telukjatidawang	
	Jumlah	330 Desa dan 26 Kelurahan		993 Dusun

1.1. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.

1.1.1. Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang berlandaskan pada Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Adapun Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 di Kabupaten Gresik yang melaksanakan urusan pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 1.9
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik

No	Perangkat Daerah
Dinas	
1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
6	Dinas Sosial
7	Dinas Tenaga Kerja
8	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Dinas Lingkungan Hidup
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
12	Dinas Perhubungan
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
17	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

No	Perangkat Daerah
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19	Dinas Perikanan
20	Dinas Pertanian
Badan	
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
22	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
23	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sekretariat	
26	Sekretariat Daerah
	- Bagian Umum
	- Bagian Protokol dan Komunikasi
	- Bagian Hukum
	- Bagian Tata Pemerintahan
	- Bagian Perekonomian dan SDA
	- Bagian Kesejahteraan Rakyat
	- Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	- Bagian Organisasi
	- Bagian Administrasi Pembangunan
27	Sekretariat Dewan
Kecamatan	
28	Kecamatan Gresik
29	Kecamatan Kebomas
30	Kecamatan Manyar
31	Kecamatan Cerme
32	Kecamatan Benjeng
33	Kecamatan Balongpanggang
34	Kecamatan Duduksampean
35	Kecamatan Driyorejo
36	Kecamatan Wringinanom
37	Kecamatan Kedamean
38	Kecamatan Menganti
39	Kecamatan Sidayu
40	Kecamatan Ujung Pangkah
41	Kecamatan Panceng
42	Kecamatan Bungah
43	Kecamatan Dukun
44	Kecamatan Sangkapura
45	Kecamatan Tambak
RSUD	



No	Perangkat Daerah
46	RSUD Ibnu Sina
Inspektorat	
47	Inspektorat Daerah

1.1.2. Jumlah Pegawai (ASN)

Dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan urusan konkuren dan Urusan pemerintahan umum perlu dukungan pegawai yang ada pada setiap OPD. Pada tahun 2021 pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik berjumlah 7.162 orang yang terdiri dari pegawai laki-laki sebanyak 3.069 orang dan pegawai perempuan sejumlah 4.093 orang.

Tabel 1.10
Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023

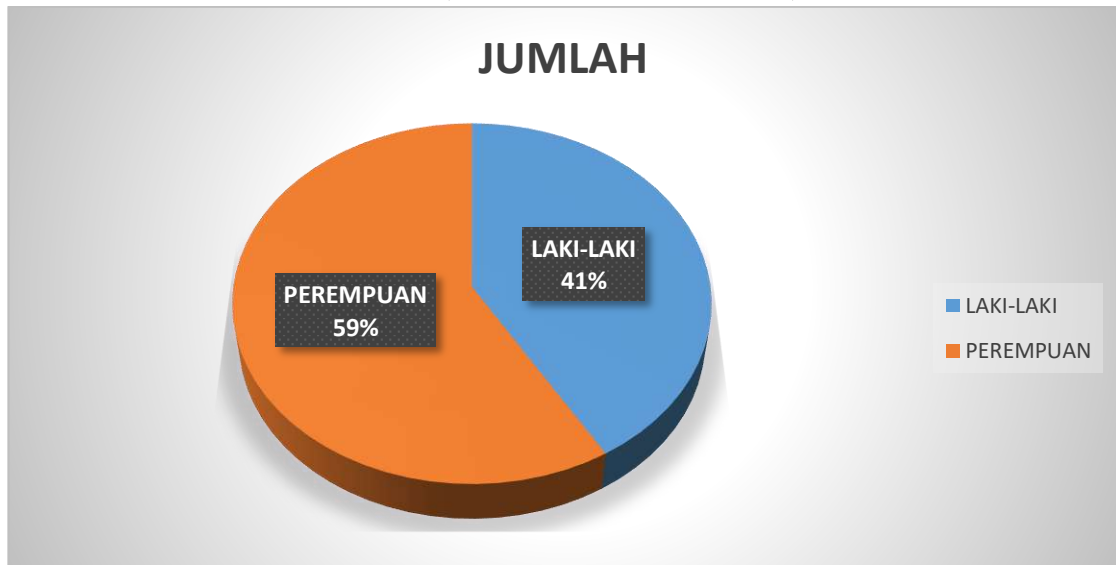
No	Perangkat Daerah	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	DINAS PENDIDIKAN	1297	2060	3357
2	DINAS KESEHATAN	275	1052	1327
3	RSUD IBNU SINA	203	370	573
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	81	25	106
5	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	48	47	95
6	DINAS SOSIAL	15	12	27
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11	9	20
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	115	6	121
9	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	21	26
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	19	16	35
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13	18	31
12	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	40	25	65
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	54	23	77
14	DINAS PAREKRAFBUDPORA	24	21	45
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17	13	30
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	26	27	53
17	DINAS PERHUBUNGAN	50	7	57
18	DINAS PERIKANAN	21	16	37
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	14	15	29
20	DINAS PERTANIAN	46	41	87
21	DINAS TENAGA KERJA	17	15	32
22	SEKRETARIAT DAERAH	67	63	130
23	SEKRETARIAT DPRD	23	13	36

No	Perangkat Daerah	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
24	INSPEKTORAT	23	23	46
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	22	31	53
26	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	59	53	112
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	18	28	46
28	KECAMATAN BALONGPANGGANG	19	9	28
29	KECAMATAN BENJENG	14	8	22
30	KECAMATAN BUNGAH	19	6	25
31	KECAMATAN CERME	15	5	20
32	KECAMATAN DRIYOREJO	17	2	19
33	KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN	15	5	20
34	KECAMATAN DUKUN	18	5	23
35	KECAMATAN GRESIK	46	42	88
36	KECAMATAN KEBOMAS	33	27	60
37	KECAMATAN KEDAMEAN	13	4	17
38	KECAMATAN MANYAR	15	6	21
39	KECAMATAN MENGANTI	16	6	22
40	KECAMATAN PANCENG	17	4	21
41	KECAMATAN SANGKAPURA	18	3	21
42	KECAMATAN SIDAYU	20	6	26
43	KECAMATAN TAMBAK	16	3	19
44	KECAMATAN UJUNG PANGKAH	14	6	20
45	KECAMATAN WRINGINANOM	14	9	23
46	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	16	6	22
47	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	22	6	28
Jumlah		2980	4218	7198

Sumber: BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2023



Gambar.1.10
Prosentase Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin



Aparatur Sipil Negara ditinjau dari tingkat pendidikan pada Tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut : Sekolah Dasar (SD) sejumlah 42 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sejumlah 109 Orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) sejumlah 1.040 Orang, Diploma I (D1) sejumlah 83 Orang, Diploma II (D2) sejumlah 102 Orang, Diploma III (D3) sejumlah 836 orang, Diploma IV (D4) sejumlah 59 orang, Strata 1 (S1) sejumlah 4.259 orang, Strata 2 (S2) Sejumlah 620 Orang dan Strata 3 (S3) sejumlah 4 Orang. Sebesar 83,24 % ASN Kabupaten Gresik atau sejumlah 5.962 pegawai telah mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pegawai di lingkup Kabupaten Gresik cukup unggul dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi terutama dalam pelayanan publik.



Tabel 1.11
Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Pendidikan Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Pendidikan													Jumlah
		D I	D II	DIII/ Sarmud	D-IV	S-1	S-2	S-3	SD	SLTA	SLTA Keguruan	SLTA Kejuruan	SLTP	SLTP Kejuruan	
1	DINAS PENDIDIKAN	4	70	19	1	2710	270		14	210	6	21	31	1	3357
2	DINAS KESEHATAN	68	-	731	26	336	17	-	1	91	-	43	14	-	1327
3	RSUD IBNU SINA	1	-	262	7	170	51	-	5	53		12	12	-	573
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	-	-	3	-	50	8	-	2	25	-	12	6	-	106
5	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	1	-	6	1	55	10	-	-	17	-	5	-	-	95
6	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	13	8	-	-	4	-	-	2	-	27
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	2	-	10	4	-	-	2	-	1	1	-	20
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	1	4	-	26	8	-	1	51	-	27	2	-	121
9	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	1	-	17	5	-	-	3	-	-	-	-	26
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	2	1	13	6	-	-	13	-	-	-	-	35
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	6	-	15	9	-	-	1	-	-	-	-	31
12	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	2	29	7	-	9	8	-	4	6	-	65
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			5		25	9		2	27		4	5		77
14	DINAS PAREKRAFBUDPORA	1	-	1	2	27	8	-	-	6	-	-	-	-	45
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	1	-	15	7	-	-	6	-	1	-	-	30

No	Perangkat Daerah	Pendidikan													Jumlah
		D I	D II	DIII/ Sarmud	D-IV	S-1	S-2	S-3	SD	SLTA	SLTA Keguruan	SLTA Kejuruan	SLTP	SLTP Kejuruan	
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	1	2	35	5	-	-	9	-	1	-	-	53
17	DINAS PERHUBUNGAN	-	1	3	2	24	3	-	-	16	-	6	2	-	57
18	DINAS PERIKANAN	-	-	1	-	27	6	-	-	2	-	1	-	-	37
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	5	1	10	8	-	-	5	-	-	-	-	29
20	DINAS PERTANIAN	-	-	3	1	47	17	-	-	11	-	4	4	-	87
21	DINAS TENAGA KERJA	-	-	2	1	18	9	-	-	1	-	1	-	-	32
22	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	5	1	71	17	1	-	31	-	4	-	-	130
23	SEKRETARIAT DPRD	-	-	1	2	19	4	-	-	8	-	1	1	-	36
24	INSPEKTORAT	-	-	8	1	23	9	1	-	4	-	-	-	-	46
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	1	3	5	26	8	-	-	10	-	-	-	-	53
26	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	15	2	67	8	-	-	16	-	2	2	-	112
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	5	1	32	5	-	-	3	-	-	-	-	46
28	KECAMATAN BALONGPANGGANG	-	-	1	-	13	2	-	1	11					28
29	KECAMATAN BENJENG	1	-	1	-	10	2	-	-	7	-	-	1	-	22
30	KECAMATAN BUNGAH	-	-	-	-	8	6	-	-	10	-	1	-	-	25
31	KECAMATAN CERME	-	-	-	-	10	3	-	-	7	-	-	-	-	20
32	KECAMATAN DRIYOREJO	-	-	-	-	8	2	-	-	8	-	1	-	-	19
33	KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN	-	-	2	-	9	5	-	-	3	-	1	-	-	20
34	KECAMATAN DUKUN	-	-	-	-	11	2	-	-	8	-	1	1	-	23

No	Perangkat Daerah	Pendidikan													Jumlah
		D I	D II	DIII/ Sarmud	D-IV	S-1	S-2	S-3	SD	SLTA	SLTA Keguruan	SLTA Kejuruan	SLTP	SLTP Kejuruan	
35	KECAMATAN GRESIK	-	-	1	3	53	9	-	2	18	-	2	-	-	88
36	KECAMATAN KEBOMAS	-	-	2	1	37	6	-	-	11	-	-	3	-	60
37	KECAMATAN KEDAMEAN	-	-	2	-	6	2	-	-	7	-	-	-	-	17
38	KECAMATAN MANYAR	-	-	-	-	8	3	-	-	8	-	2	-	-	21
39	KECAMATAN MENGANTI	-	-	-	-	8	4	-	-	10	-	-	-	-	22
40	KECAMATAN PANCENG	-	1	-	-	11	2	-	-	6	-	-	1	-	21
41	KECAMATAN SANGKAPURA	-	-	-	-	8	3	1	-	9	-	-	-	-	21
42	KECAMATAN SIDAYU	-	-	1	-	11	5	-	-	9	-	-	-	-	26
43	KECAMATAN TAMBAK	-	-	-	-	12	1	-	-	6	-	-	-	-	19
44	KECAMATAN UJUNG PANGKAH	-	-	-	-	11	5	-	-	4	-	-	-	-	20
45	KECAMATAN WRINGINANOM	-	-	-	-	13	1	-	-	9	-	-	-	-	23
46	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-	14	4	-	-	3	-	1	-	-	22
47	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	-	-	-	1	10	5	-	-	6	-	5	1	-	28
	Jumlah	77	74	1105	64	4181	598	3	37	793	6	164	95	1	7198

Sumber: BKD Kabupaten Gresik Tahun 2023



Tabel 1.12
Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Usia Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Usia								Jumlah
		21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	50-55	56-60	
1	DINAS PENDIDIKAN	12	180	196	405	365	490	835	874	3357
2	DINAS KESEHATAN	82	207	150	146	237	241	184	80	1327
3	RSUD IBNU SINA	22	91	52	72	132	92	80	32	573
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1	13	9	11	17	16	31	8	106
5	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	7	18	6	10	12	23	16	3	95
6	DINAS SOSIAL	1	2	1	2	1	5	10	5	27
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	1	-	1	4	4	5	5	20
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	2	1	49	30	21	11	6	121
9	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	3	-	1	4	5	10	3	26
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	2	1	3	5	10	11	2	35
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2	6	3	6	3	4	5	2	31
12	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3	3	2	3	6	20	21	7	65
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2	6	4	11	18	18	14	4	77
14	DINAS PAREKRAFBUDPORA	1	7	2	4	6	7	13	5	45
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	2	3	1	3	6	10	5	30

No	Perangkat Daerah	Usia								Jumlah
		21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	50-55	56-60	
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	8	7	12	8	10	5	2	53
17	DINAS PERHUBUNGAN	2	4	3	8	7	13	15	5	57
18	DINAS PERIKANAN	1	5	-	2	4	5	7	13	37
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4	3	1	3	2	5	6	5	29
20	DINAS PERTANIAN	-	8	3	23	8	12	18	15	87
21	DINAS TENAGA KERJA	2	2	2	2	3	5	10	6	32
22	SEKRETARIAT DAERAH	1	8	4	21	25	33	26	12	130
23	SEKRETARIAT DPRD	-	3	1	7	7	5	10	3	36
24	INSPEKTORAT	8	5	4	5	2	7	12	3	46
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	5	3	10	13	11	5	3	53
26	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	17	6	2	19	28	27	9	4	112
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3	11	3	8	5	8	6	2	46
28	KECAMATAN BALONGPANGGANG	-	1	-	2	3	10	8	4	28
29	KECAMATAN BENJENG	-	1	-	1	5	5	8	2	22
30	KECAMATAN BUNGAH	-	1	-	1	2	7	7	7	25
31	KECAMATAN CERME	-	1	-	2	2	5	7	3	20
32	KECAMATAN DRIYOREJO	-	-	-	-	4	1	6	8	19
33	KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN	-	-	1	1	6	3	7	2	20
34	KECAMATAN DUKUN	-	1	-	2	1	9	9	1	23
35	KECAMATAN GRESIK	-	2	3	3	15	16	33	16	88
36	KECAMATAN KEBOMAS	-	1	2	7	8	13	16	13	60

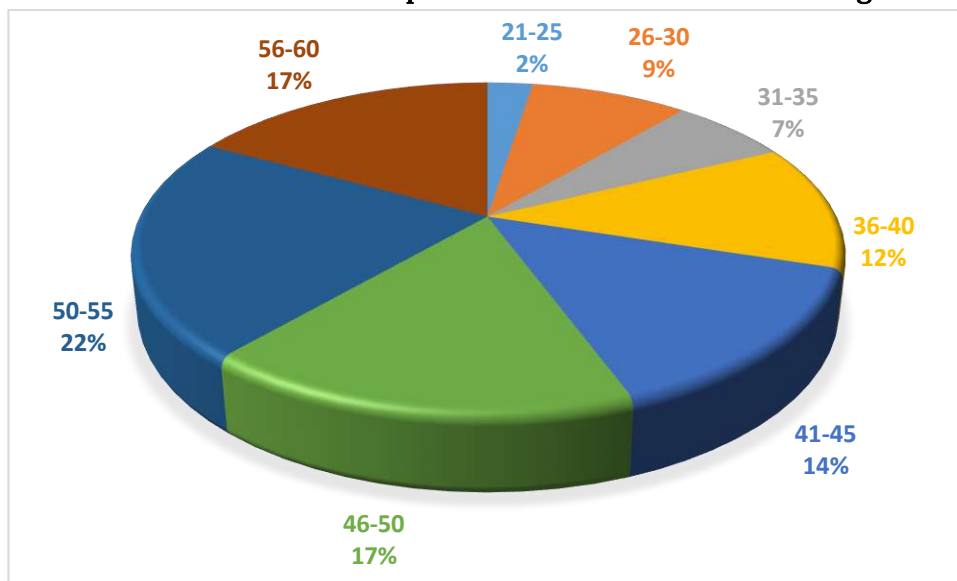
No	Perangkat Daerah	Usia								Jumlah
		21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	50-55	56-60	
37	KECAMATAN KEDAMEAN	-	-	1	1	3	4	4	4	17
38	KECAMATAN MANYAR	-	1	-	-	5	7	5	3	21
39	KECAMATAN MENGANTI	-	1	-	3	4	4	5	5	22
40	KECAMATAN PANCENG	-	1	-	1	3	7	4	5	21
41	KECAMATAN SANGKAPURA	-	-	-	1	4	5	10	1	21
42	KECAMATAN SIDAYU	-	2	-	-	3	4	10	7	26
43	KECAMATAN TAMBAK	-	1	1	-	3	3	7	4	19
44	KECAMATAN UJUNG PANGKAH	-	-	-	1	3	1	9	6	20
45	KECAMATAN WRINGINANOM	-	-	-	3	1	4	7	8	23
46	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	-	-	2	3	4	7	5	22
47	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	1	-	2	3	6	7	4	5	28
	Jumlah	179	625	473	879	1039	1222	1558	1223	7198

Sumber: BKD Kabupaten Gresik Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, ASN Kabupaten Gresik terbanyak pada rentang usia 50-55 tahun dengan total jumlah 1.558 orang (terbanyak ada pada Dinas Pendidikan dengan jumlah 835 orang, Dinas Kesehatan 184 orang, dan RSUD Ibnu Sina sebanyak 80 orang). Rentang usia tersebut mencapai 22% dari total keseluruhan ASN sebanyak 7.198 pegawai. Urutan kedua terbanyak yaitu pada rentang usia 56-60 tahun dengan total jumlah 1.223 orang dengan persentasi 17% dari keseluruhan ASN, dan disusul dengan urutan ketiga terbanyak yaitu pada rentang usia 46-50 tahun dengan total jumlah 1.222 orang dengan persentasi 17% dari keseluruhan ASN.

Gambar. 1.11

Prosentase ASN Kabupaten Gresik Berdasarkan Rentang Usia



F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp 3.873.145.748.086,00 sedangkan realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp 3.416.390.957.965,09 atau mencapai 88,21%. Kinerja Pendapatan Daerah terbagi atas Capaian Pendapatan Asli Daerah sebesar 73,92%, capaian Pendapatan Transfer mencapai 97,92% dan Lain-Lain pendapatan daerah yang sah mencapai 0%. Berikut Rincian Realisasi Jenis Pendapatan pada Tahun 2023:

Tabel 1.13

Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Uraian	Target	Realisasi	Efektivitas	Selisih
Pendapatan Asli Daerah	1.584.113.767.514,00	1.171.022.355.999,09	73,92	(413.091.411.514,91)
Pendapatan Transfer	2.289.031.980.572,00	2.241.478.601.966,00	97,92	(47.553.378.606,00)

Uraian	Target	Realisasi	Efektivitas	Selisih
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	0	3.890.000.000,00	0	3.890.000.000,00
Pendapatan Daerah	3.873.145.748.086,00	3.416.390.957.965,09	88,21	(456.754.790.120,91)

Sumber: BPPKAD Tahun 2023

1.1.3. Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 1.584.113.767.514,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 1.171.022.355.999,09 atau mencapai 73,92%. Realisasi dan Kontribusi komposisi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana berikut;

- Realisasi Pajak Daerah mencapai Rp 793.322.673.442,23 atau 81,92 % dari Target Rp 968.415.082.376,00.
 - Realisasi Retribusi Daerah mencapai Rp 87.430.225.680,00 atau 27,19 % dari target Rp 321.527.126.882,00
 - Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan melebihi target mencapai Rp 13.425.554.336,30 atau 100,52 % dari target Rp 13.356.716.195,00
 - Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mencapai Rp 276.843.902.540,56 atau 98,59% dari target Rp 280.814.842.061,00.
- sebagaimana berikut:

a. Hasil Pajak Daerah

Jenis pajak daerah kabupaten/kota yang ditargetkan dalam APBD 2021 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik meliputi (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Parkir (7) Pajak Air Tanah (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (9) PBB Pedesaan dan Perkotaan (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Penerimaan Pajak Daerah pada tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 968.415.082.376,003 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 793.322.673.442,23 atau mencapai 81,92%.

b. Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Retribusi Daerah pada tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 321.527.126.882,00 terealisasi sebesar Rp 87.430.225.680,00 atau 27,19%.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun anggaran 2023 diperoleh dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal

pada perusahaan milik daerah/BUMD direncanakan sebesar Rp 13.356.716.195,00 terealisasi sebesar Rp 13.425.554.336,00 atau 100,52% . Perusahaan Milik Daerah yang dimaksud adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik, PT Gresik Migas, PT Bank Jatim dan PT BPR Jatim. Rincian pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun anggaran 2023 direalisasikan sebesar Rp 280.814.842.061,00 atau mencapai 95,59% dari target Rp 276.843.902.540,56 dengan 12 komponen pembentuk, yaitu:

- a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang terdiri dari Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan;
- b. Penerimaan Jasa Giro yang terdiri dari Jasa Giro Kas Daerah dan Jasa Giro Pemegang Kas;
- c. Pendapatan Bunga Deposito yang terdiri dari Rekening Deposito pada Bank Jatim, Bank BTN dan Bank BRI;
- d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan yang terdiri dari Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Sekretariat;
- e. Pendapatan Denda Pajak yang terdiri dari Pendapatan Denda Hotel, Pajak Air Bawah Tanah dan PBB Pedesaan dan Perkotaan;
- f. Pendapatan Denda Retribusi yang terdiri dari Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perijinan Tertentu;
- g. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan yang berasal dari pembongkaran reklame;
- h. Pendapatan dari Pengembalian yang terdiri dari Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, perjalanan dinas dan lain-lain;
- i. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri dari Badan Pelayanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan 17 Puskesmas;
- j. Pendapatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri dari 15 Puskesmas;
- k. Tindak Lanjut Penghapusan Aset; dan
- l. Pendapatan Tas Pelanggaran Perda/Perbup.

1.1.4. Dana Pendapatan Transfer

Dana Pendapatan Transfer yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan/pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan daerah. Dana

Perimbangan ini terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; (2) Dana Alokasi Umum; dan (3) Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintahan Daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Penerimaan dari Dana Pendapatan Transfer pada Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 2.289.031.980.572,00 terealisasi sebesar 2.241.478.601.966,00 atau 97,92%. Adapun perincian penerimaan Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Penerimaan pajak yang diperoleh Pemerintah dalam APBN dibagikan kepada daerah dengan proporsi yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Dana bagi hasil ditujukan dalam rangka memperkecil kesenjangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Komponen penerimaan dari Bagi Hasil Pajak terdiri atas :

- 1) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan;
- 2) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang; dan
- 3) Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau.

Sedangkan pos penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri atas:

- 1) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan;
- 2) Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi;
- 3) Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi;
- 4) Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi;
- 5) Bagi Hasil dari Sumber Daya Kehutanan;
- 6) Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Pertambangan Umum; dan
- 7) Bagi Hasil Mineral dan Batubara.

Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 190.340.887.422,00 terealisasi sebesar 200.617.875.334,00 atau 105,4%.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 904.157.305.000,00 terealisasi sebesar Rp 915.176.119.975,00 atau 101,22%.

c. Dana Alokasi Khusus - Fisik

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke daerah terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik daerah. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari DAK pada Tahun Anggaran 2023 direncanakan Rp 130.356.414.000,00 terealisasi sebesar Rp 122.396.553.183,00 atau 93,89%.

d. Dana Alokasi Khusus – Non Fisik

Dana alokasi Khusus (DAK) Nonfisik adalah Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh daerah untuk mendanai program, kegiatan, dan kebijakan tertentu dengan tujuan mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan mendukung operasional layanan publik.. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari DAK pada Tahun Anggaran 2023 direncanakan Rp 346.965.610.000,00 terealisasi sebesar Rp 334.088.066.900,00 atau 96,33%.

1.1.5. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah; (2) Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (3) Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus; dan (4) Bantuan Keuangan dari Provinsi. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun anggaran 2023 tidak direncanakan target dan direalisasikan sebesar Rp 3.890.000.000 atau mencapai 0%.

1.1.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Rp 3.418.637.235.920,96 atau mencapai 86,5 % dari Target Rp 3.952.148.283.541,00 dengan rincian sebagaimana berikut:

- a. Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa serta Belanja Tidak Terduga. Pada Tahun 2020, Belanja Tidak Langsung ditargetkan sebesar Rp 2.421.801.655.328,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.202.757.653.261,61 atau mencapai 90,96% dan;
- b. Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah Barang, Hibah Barang /Jasa yang Diserahkan Kepada

Pihak Ketiga/Masyarakat, Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat selain Hibah dan Bantuan Sosial, Barang/Jasa selain Hibah dan Bantuan Operasional dan Belanja Modal. Pada Tahun 2023, Belanja Langsung ditargetkan sebesar Rp1.172.026.132.390,39 dan terealisasi sebesar Rp1.064.912.175.629,70 atau mencapai 90,86%

c. Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Perubahan kebijakan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2023 diarahkan pada Penyesuaian penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp 79.002.535.455,00 Pembiayaan Daerah Kabupaten Gresik ditargetkan sebesar Rp 79.002.535.455,00 dengan Rp 78.862.135.455,34 pengeluaran pembiayaan sebagaimana uraian berikut :

Tabel 1.21
Realisasi Pembiayaan Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	Efektifitas	LEBIH / (KURANG)
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(263.218.570.955,00)	(187.423.368.434,38)	71,20	-(59.177.499.247,92)
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	246.778.460.955,00	246.409.984.889,72,00	99,85	0
	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	0	0
	Penerimaan Pinjaman Daerah	21.463.000.000,00	0	0	0
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	15.919.000,00	0	15.492.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	268.241.460.955,00	246.425.903.889,72	91,87	305.955.960.203,27
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	0	0
	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0
	Penyertaan Modal/Investasi	4.379.000.000,00	0	0	0
	Pembayaran Pokok Pinjaman	643.890.000,00	0	0	0
	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.022.890.000,00	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	263.218.570.955,00	246.425.903.889,72	93,62	305.955.960.203,27
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0	59.002.535.455,34		246.778.460.955,35

Sumber: BPPKAD Tahun 2023

1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah pada hakekatnya ditujukan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan oleh dan untuk masyarakat di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, semua aspirasi dan segala kepentingan daerah yang tumbuh dari

masyarakat harus diarahkan untuk menjaga keserasian dan keselarasan antara Pembangunan Daerah, Pembangunan Regional dan Pembangunan Nasional.

Dalam upaya menjaga keserasian dan keselarasan pembangunan Daerah, Pembangunan Regional dan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Gresik telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Visi dan Misi yang dirumuskan sebagai berikut :

“Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”

A. Misi

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik periode 2021-2026 sebagaimana berikut:

Misi ke-1

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif

Misi ke-2

Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota

Misi ke-3

Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah

Misi ke-4

Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah

Misi ke-5

Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik

1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Gresik menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Permendagri 100 Tahun 2018. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana,

konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah menyesuaikan dengan PP 13 Tahun 2019 bahwa Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimasukkan menjadi salah satu bab dalam LPPD terutama Penerapan Standar Pelayanan Minimal di 6 urusan dasar yaitu :

- a. Urusan Pendidikan
- b. Urusan Kesehatan
- c. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- d. Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- f. Urusan Sosial

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB II**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran. Capaian tersebut dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten yang selaras dengan Pembangunan Provinsi dan Pembangunan Nasional, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Penyelenggaraan Daerah dirinci menjadi Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah secara makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan menganut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan ini telah membawa perubahan yang fundamental terhadap kebijakan struktur dan manajemen pemerintahan yang mengarah kepada penguatan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam kerangka pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah.

Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan pemerintah daerah secara mandiri memberikan peningkatan pelayanan, perna serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada penongkatan kesejahteraan rakyat. Bentuk implementasi fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Gresik telah merumuskan berbagai kebijakan strategis dalam melaksanakan pembangunan daerah. Indikator utama dalam penyusunan kebijakan yang ada, diarahkan pada upaya untuk optimalisasi dan pemanfaatan berbagai sumber daya (*resources*) yang dimiliki Kabupaten Gresik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, kemampuan dan kebutuhan daerah. Selain itu juga dengan memperhatikan kekhasan dan potensi unggulan yang ada.

II.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Laju Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	77,62	78,44	1.0564%
2	Angka Kemiskinan	149,64	149,75	0,9042%
3	Angka Pengangguran	7,84	6,82	-13.0102 %
4	Pertumbuhan Ekonomi	7,38	4,62	-37.398%
5	Pendapatan Per Kapita	122,650,13	130.386,33	6.3075 %
6	Ketimpangan Pendapatan	0,363	0,330	-9,0909 %

Keterangan: **Angka

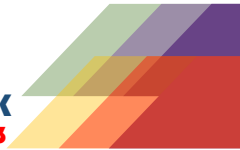
Sumber: BPS Kabupaten Gresik 2023

II.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

II.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

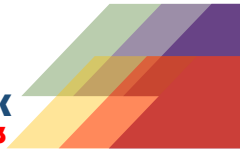
Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
1	PENDIDIKAN	1		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		
				1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	831 Unit	
				2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	63002 Orang	Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional

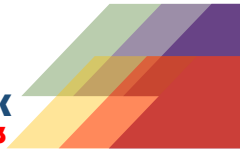


NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
						Penyeleng araan Pendidikan Kesetaraan
				3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	63002 Orang	Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaa n, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaa n Dana Bantuan Operasiona l Penyeleng araan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasiona l Sekolah, dan Bantuan Operasiona l Penyeleng araan Pendidikan Kesetaraan
				4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	3497 Orang	
				5. Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	4617 Orang	
				6. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan	1161 Orang	

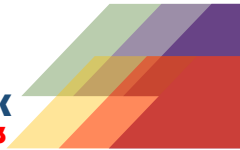
NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini		
				7. Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	599 Orang	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		105.7515 % %	Angka capaian meningkat menjadi diatas 100% karena ada lembaga sekolah dasar yang baru dan ada peserta didik sekolah dasar yang berasal dari luar kabupaten gresik yang bersekolah di kabupaten gresik
		3		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		
				1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	1081 Unit	



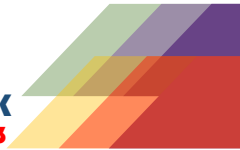
NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	124160 Orang	Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan



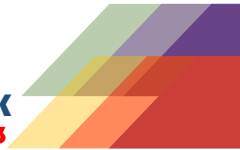
NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	57852 Orang	Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	124160 Orang	Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

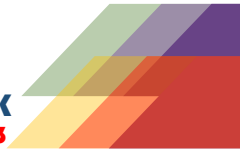


NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	57852 Orang	Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesenjangan
				6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	4880 Orang	
				7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2669 Orang	
				8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	8972 Orang	
				9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	4434 Orang	
				10. Jumlah kebutuhan minimal tenaga	1584 Orang	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				kependidikan pada jenjang sekolah dasar		
				11. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	1045 Orang	
				12. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1292 Orang	
				13. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	786 Orang	
				14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3759 Orang	
				15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1697 Orang	
				16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	726 Orang	
				17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	187 Orang	
				18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	1028 Orang	
				19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah	868 Orang	

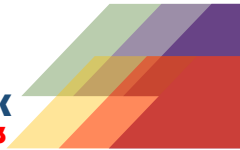
NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
		4		pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
				1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	7 Unit	
				2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	3941 Orang	Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3941 Orang	Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
				4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	324 Orang	
				5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	50 Orang	
				6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki	46 Orang	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/Hasil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
				ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)		
				7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	726 Orang	
				8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	12 Orang	
2	KESEHATAN	5		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan		
				1. Jumlah RS Rujukan Kabupaten/Kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	20 Unit	
		6		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi		
				1. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	20 Unit	
		7		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
				1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1)10.277 Vaksin TD, 2) 3.544 TTD, 3)18.437 alat tes kehamilan, pemeriksaan darah HB, pemeriksaan Gol darah,pemeriksaan Glukoprotein urin, 4)18.437 Kartu Ibu/RM,	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
					5)18.437 Buku KIABuku KIA	
				2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	820 Orang	
		8		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
				1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1) Formulir Partograf : 18.678 ; 2) Kartu ibu (rekam medis) : 18.678; dan Buku KIA : 18.678	
				2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	931 Orang	
		9		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		
				1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 . Vaksin Hepatitis BO (18.415); 2 . Vitamin K1 Injeksi (18.415); 3 . Salep/Tetes Mata Antibiotik (18.415); 4 . Formulir Bayi Baru Lahir (18.415); , 5. Formulir MTBM (18.415) dan 6 . Buku KIA (18.415)	
				2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	931 Orang	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		10		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku (88.337); 2 . Formulir DDTK (22.136); 3 . Vitamin A Biru (9.159); , Vitamin A Merah (69.177) 4 . Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT - HB -Hib * Campak Rubell (, 5. Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT -HB -Hib * Campak Rubella 6 . Jarum Suntik dan BHP, Peralatan Anafilaktik , Buku KIA , dll	
				2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	8554 Orang	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
		1 1		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
				1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 . Buku Raport Kesehatan ku (178.412); 2 . Buku Pemantaua n Kesehatan (178.412); 3 . Kuesioner Skrining Kesehatan (178.412); 4 . Formulir Rekapitula si Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah (178.412); 6 . Formulir Rekapitula si Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah (178.412)	
				2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	5367 Orang	
				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		
		1 2				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 . Pedoman dan Media KIE (57) * Alat Ukur Berat Badan (408.619) * Alat Ukur Tinggi Badan (782)* Alat Ukur Lingkar Perut (782) * Tensimeter (245)* Glukometer (266,334)* Tes Strip Gula (Darah * Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes (908,044) 2 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) (4), Dll	
				2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	885 Orang	
		13		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 . Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol (153.977); 2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) (153.977); dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) : (153.977); 3 . Buku Kesehatan Lansia (153.977)	
				2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	8480 Orang	
		14		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
				1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 . Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE (33) 2 . Tensimeter (93)	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
					3 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM (236.030) , Dll	
				2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	848 Orang	
		1 5		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
				1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak Dukungan Logistik seperti :1 . * Glukometer (266.334); * Strip Tes Gula Darah (266.334); * Kapas Alkohol (266.334); * Lancet ((266.334) ;2 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM (48.336);3 . Pedoman dan Media KIE (32) , Dll	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	885 Orang	
		16		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		
				1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (33); 2 . Kit Berisi 2 Alat Fiksasi (10); 3 . Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan (350) 4 . Media KIE (99), Dll	
				2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	172 Orang	
		17		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) (9.750) 2 . Reagen Zn TB (1.100) 3 . Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95 (18.112); 4 . Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bu nsen, Ose/Lidi), Rak Pengereng (69.524); 5 . Catridge Tes Cepat Molekuler (18.112); 6 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan (18.112); 7 . Pedoman/ Standar Operasion al Prosedur (195), Dll	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	329 Orang	
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		
		18		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 . Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner (773); 2 . Tes Cepat HIV (RDT) Pertama (28.828); 3 . Bahan Medis Habis Pakai * Handschoe n * Alkohol Swab * Plester * Lancet/ Jarum Steril * Jarum Sduit yang sesuai/Vac utainer dan jarum sesuai *Alat tulis * Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					4 . Lainnya...(28.828)	
				2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1160 Orang	
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota		
				1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota (ha)	Ha	
				2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota (m)	Meter	
				3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kabupaten/Kota (ha)	Ha	
				4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kabupaten/Kota (m)	Meter	
				5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kabupaten/Kota		
				6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten/Kota		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
		2 1		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kabupaten/Kota	1 Sarpras	Normalisasi Kali Lamong/Anak Kali lamong
				Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		
				1. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	50 % %	
				2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	49.0168 % %	
				3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	75.8440 % %	
		2 2		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota		
				1. Pemenuhan dokumen RISPAM Kabupaten/Kota	Ada	
				2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten/Kota	Ada	
				3. Jumlah BUMD dan atau UPTD Kabupaten/Kota penyelenggaraan SPAM	1 BUMD/UP TD	
				4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	NIHIL Izin	
				5. Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	2 Kerjasama	
		2 3		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		
				1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALDS	387742 Rumah	
				2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	5579 Rumah	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	393321 Rumah	
				4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	3047 Rumah	
				5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan pengolahan lumpur tinja	3047 Rumah	
				6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	5579 Rumah	
				7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	93.8729 %	
				8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	1.3129 %	
				9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	18.4533 %	
				10. Kinerja penyediaan unit pelayanan setempat	94.5731 %	
				11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	2.5702 %	
				12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	4.8191 %	
				13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	54.6158 %	
				14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0.2834 %	
		2 4		Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota		
				1.Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	100%	Jumlah SLF yang diterbitkan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				2.Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun eksisting	243 Izin	Jumlah IMB yang diterbitkan
				3.Penetapan peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada	Perda 6/2017
				4.Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada	Tim Kesekretari atan SIM BG
				5.Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	35 Bangunan	Ada Bangunan Cagar Budaya
				6.Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan srategis daerah provinsi	0 Bangunan	
				7.Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kabupaten/Kota	3516 Bangunan	
				8.Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipelihara/dirawat	87 Bangunan	
		2 5		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota		
				1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan kewenangan Kabupaten/Kota	566.61 KM	
				2. Panjang jalan yang dibangun	0.523 KM	
				3. Panjang jembatan yang dibangun	0 Meter	
				4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	26.92192 KM	
				5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	58.5 Meter	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	7.73648 KM	
				7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	90 Meter	
				8. Panjang jalan yang dipelihara	14.762 KM	
				9. Panjang jembatan yang dipelihara	346.5 Meter	
		26		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		
				1. Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	112 Orang	
				2. Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota	988 Orang	lpjk.pu.go.id/
				3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	188 Orang	lpjk.pu.go.id/
				4. Terselenggaranya Sistem informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada	sipjaki.pu.go.id
				5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota	Ada	sipjaki.pu.go.id
				6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Ada	sipjaki.pu.go.id
				7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada	sipjaki.pu.go.id

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada	sipjaki.pu.g o.id
				9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi Kabupaten/Kota	Ada	sipjaki.pu.g o.id
				10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Ada	sipjaki.pu.g o.id
				11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	Ada	lpjk.pu.go.i d/
				12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	Ada	lpjk.pu.go.i d/
				13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kabupaten/Kota	Ada	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
				14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak	IUJKN sudah berganti menjadi NIB dibidang jasa konstruksi dan sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat sesuai PP No.05 tahun 2021 tentang OSS (perizinan berbasis resiko)
				15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidak sesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dnegan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	
				16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	
				17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah Kabupaten/Kota	- Badan Usaha	PP No.05 tahun 2021, IUJK sudah tidak ada (dihapus) diganti NIB.
				19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah Kabupaten/Kota	- Badan Usaha	sudah tidak berlaku (berdasar Pasal 116 UU Cipta Kerja)
				20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kabupaten/Kota	- Badan Usaha	PP No.05 tahun 2021, IUJK sudah tidak ada (dihapus) diganti NIB.
				21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kabupaten/Kota	79 Badan Usaha	
				22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	- Izin	IUJK sudah tidak ada (dihapus) diganti NIB melalui proses OSS.
				23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dnegan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	194 Pengawasa n	
				24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0 Kecelakaa n Konstruksi	tidak terjadi kecelakaan konstruksi
				25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar	194 Pengawasa n	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
				jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		
		27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi		100%	
4	PERUMAHAN RAKYAT	28		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota		
				1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	13 Rumah	
				2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	13 Rumah	
				3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	41 Orang	
				4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	10 Rumah	
				5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	1 Rumah	
				6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	2 Rumah	
				7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	1 Unit	
				8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	41 Orang	
				9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	- Ha	
		29		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Nihil Rumah Tangga	Layanan yang diberikan kepada masyarakat terdampak relokasi program pemerintah tahun 2023 berupa penyediaan rumah layak huni
				2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Nihil Rumah Tangga	Layanan yang diberikan kepada masyarakat terdampak relokasi program pemerintah berupa penyediaan rumah layak huni
				3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Nihil Rumah Tangga	Layanan yang diberikan kepada masyarakat terdampak relokasi program pemerintah berupa penyediaan rumah layak huni
				4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	40 Rumah Tangga	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Nihil Rumah Tangga	Tidak terdapat rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan layanan berdasarkan rencana pemenuhan SPM
				6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	- Ha	
		30		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani		
				1.Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	875.43 Ha	
				2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	434 Unit	
				3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	765.05 Ha	
		31		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		
				1. Jumlah rumah di Kabupaten/Kota	318678 Rumah	
				2. Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	434 Rumah	
				3. Jumlah rumah tidak layak huni	7137 Rumah	
				4. Jumlah rumah yang tidak dihuni	- Rumah	semua rtlh berpenghuni
				5. Rasio rumah dan KK	131.8594 %	
				6. Jumlah rumah pembangunan baru	218 Rumah	
		32		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		
				1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	234 Perumahan	
				2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	92503 Rumah	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	92503 Rumah	
				4. Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site)	92503 Rumah	
				5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	142 Perumaha n	
				6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	92503 Rumah	
				7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	34 Pengemba ng	
				8. Jumlah pengembang yang teregistrasi	34 Pengemba ng	
				9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	- Pengemba ng	Pada tahun 2023 tidak terdapat kegiatan sosialisasi pengemba ng perumahan
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3 3		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		
				1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten/Kota yang ditangani	282 Pelanggara n dan Pengaduan	
				2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	6595 Orang	
				3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	8 Perda & Perkada	
				4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	8 Orang	
				5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguam trantibum	Tersediany a SOP dalam penegakan Perda dan Perkada Ada Sebanyak 21 SOP	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				6. Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada	
		3 4	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		100%	
		3 5		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		
				1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	PENYELES AIAN DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA (KRB) LENGKAP
				2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	PENDUDU K DI KAWASAN RAWAN BENCANA MEMPERO LEH LAYANAN INFORMAS I RAWAN BENCANA SESUAI ANCAMAN BENCANA TAHUN 2023
		3 6		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
				1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100%	PENYELES AIAN DOKUMEN RENCANA PENANGGU LANGAN BENCANA (RPB) LENGKAP
				2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100%	PENYELES AIAN DOKUMEN RENKON BENCANA BANJIR BENGAWA N SOLO DAN RENKON



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
						BENCANA KEGAGALA N TEKNOLOG I LENGKAP
				3. Persentase jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan	100%	JUMLAH APARATUR DAN WARGA NEGARA YANG IKUT PELATIHA N TAHUN 2023
				4. Persentase warga Negara yang ikut pelatihan	100%	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENGIKUT I PELATIHA N TAHUN 2023
				5. Persentase warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	WARGA NEGARA YANG MENDAPA TKAN LAYANAN PUSDALOP S PENANGGU LANGAN BENCANA DAN SARANA PRASARAN A PENANGGU LANGAN BENCANA TAHUN 2023
				6. Persentase warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%	WARGA NEGARA YANG MENDAPA T LAYANAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
						PERALATA N PERLINDU NGAN TAHUN 2023
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
				1.Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%	JUMLAH KECEPATA N RESPON UNTUK SETIAP PENETAPA N STATUS KLB (PENANGA NAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU) TAHUN 2023
		3 7		2.Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	RESPON CEPAT UNTUK SETIAP STATUS DARURAT BENCANA TAHUN 2023
				3.Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	JUMLAH PETUGAS YANG AKTIF DALAM PENANGA NAN DARURAT BENCANA TAHUN 2023
				4.Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	KORBAN YANG BERHASIL DICARI, DITOLONG DAN DIEVAKUA

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
						SI TAHUN 2023
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
				1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	391 Layanan	
				2.Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada	Tersedia 1 Pos Wilayah (POS KOTA) dan 3 Pos Sektor (Pos Driyorejo, Pos Dukun, dan Pos Menganti)
		38		3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada	
				4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	0 Pos	
				5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	582 Sarpras	
				6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemada, sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar	37 Orang	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		
				7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	458 Orang	
				8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	1 Kegiatan	
		3 9	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	13,8 Menit		
6	SOSIAL	4 0		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)		
1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	6 Layanan					
2. Jumlah data penyandang penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	18581 Orang					
3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1 Tim					
4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	18628 Orang					
5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2 Unit					
6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	2015 Orang					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				7. Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1 Unit	
				8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	128 Orang	
				9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	150 Orang	
				10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	4 Peralatan	
				11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	7 Paket	
				12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	403 Orang	
				13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	2 Orang	
				14. Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan social yang disediakan	310 Orang	
				15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan social sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	693 Orang	
				16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	867 Kegiatan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	87 Orang	
				18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	407 Orang	
				19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelurusan keluarga	31 Orang	
				20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	31 Orang	
				21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, abak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	256 Orang	
		41		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota		
				1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	4844 Orang	
				2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	1 Orang	
				3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1 Penampun gan	
				4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	22 Paket	
				5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	4844 Orang	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				6. Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/ atau relawan sosial yang tersedia	38 Orang	
7	TENAGA KERJA	4 2		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		
				1. Dokumen perencanaan tenaga kerja Kabupaten/Kota	Ada	
				2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	90.44 %	
				3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di Kabupaten/Kota	262 Perusahaan	
		4 3		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		
				1. Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	60%	
				2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	92.3077 %	
				3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	2.8322%	
				4. Persentase LPK yang terakreditasi	8.5106 %	
				5. Persentase LPK yang memiliki	27.6596 %	
				6. Jumlah penganggur yang dilatih	459 Orang	
				7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100%	
				8. Persentase penyerapan lulusan	39.2157 %	Bukti dukung masing - masing indikator dipisah karena file terlalu besar
				9. Lulusan bersertifikat kompetensi	98.75 %	data dukung masing - masing indikator dipisah karena file

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
						terlalu besar
				10. Jumlah Calon Pekerja MIgran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	6.9690 %	
				11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)		
		4 4		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		
				1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	2.6346%	
				2. Data tingkat produktivitas total	65.10%	
		4 5		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		
				1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	94.5626%	
				2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	12.7168%	
				3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	519 SP/SB	
				4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	100%	
				5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	100%	
				6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	1.2122%	
				7. Jumlah mogok kerja	0 Mogok Kerja	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				8. Jumlah penutupan perusahaan	26 Perusahaan	
				9. Jumlah perselisihan kepentingan	2 Perselisiha n	
				10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0 Perselisiha n	
				11. Jumlah perselisihan PHK	30 Perselisiha n	
				12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	518 Orang	
				13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0 Perselisiha n	
				14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartity Kabupaten/Kota yang diberdayakan	Ada	
				15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	41.3333%	
		4 6		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota		
				1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten/Kota	510 Lowongan Kerja	
				2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten/Kota	3903 Orang	
				3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah Kabupaten/Kota	61 BKK	
				4. Jumlah Tenaga Kerja khusus terdaftar dalam satu Kabupaten/Kota	61 Orang	
				5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	4 Orang	
				6. Jumlah Lembaga Penempatam Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar	Lembaga	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				kerja lokal dalam satu wilayah Kabupaten/Kota		
				7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	0 Perjanjian	
				8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0 Orang	
				9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	100%	
				10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	904 Orang	
				11. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	100%	
				12. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	100%	
				13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	9.6531 %	
				14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk		
8	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	47		Persentase ARG pada belanja langsung APBD		
				1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota yang telah dilatih PUG	56 Lembaga	OPD
				2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/Kota	429 Program/ Kegiatan	kegiatan/s ub kegiatan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
		48		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota		
				1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemKabupaten/Kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2 Media Massa	yang berkomitmen yaitu Persatuan Wartawan Indonesia dan Komunitas Wartawan Gresik
				2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1 Lembaga	
				3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	data jumlah korban kekerasan anak yang dilaporkan
				4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1 Lembaga	
				5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kabupaten/Kota)	0 Lembaga	Tidak ada lembaga yang mendapatkan bantuan keuangan
		49		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		
				1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan	15 Organisasi	
				2. Jumlah kader perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang sudah dilatih	30 Orang	Jumlah Fasilitator Komunitas Sekolah Perempuan
				3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	15 Lembaga	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	0 Lembaga	Tidak ada lembaga yang mendapatkan bantuan keuangan
				5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 Kebijakan/ Program	Terdapat satu (1) program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah sudah dievaluasi yaitu Program Perlindungan Perempuan
				6. Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	1 Lembaga	UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gresik) yang diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 86 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
						Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
				7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	
9	PANGAN	50		Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)		
				1. tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada	
				2. tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	
				3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada	
				4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada	
				5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	
				6. Tertanganinya kerawanan pangan	Ada	
				7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada	
				8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
10	PERTANAHAN	51		Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		
				1. SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Wali kota	93.8959 %	Jumlah Permohonan KKPR Berusaha dan KKPR Non Berusaha
				2. SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Tanah obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	100%	
				3. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	100%	
				4. Dokumen Izin membuka tanah	100%	
				5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	100%	
		52	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum		100%	
		53	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal		100%	Jumlah luas tanah Rekap KKPR berusaha dan non berusaha yang diajukan dan disetujui
		54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		100%	kegiatan ini tidak pernah dilaksanakan di Kabupaten Gresik

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
		5 5	Tersedianya tanah untuk masyarakat		100%	kegiatan ini tidak pernah dilaksanakan di Kabupaten Gresik
		5 6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi		100%	
11	LINGKUNGAN HIDUP	5 7		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota		
				1. Hasil Perhitungan Kabupaten/Kota terhadap: a) Indeks Kualitas air (IKA) b) Indeks Kualitas Udara (IKU) c) Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITH/L)	ada Indeks Kualitas Pencemaran Air 49,38 Indeks Kualitas Pencemaran Udara 81,24 Indeks Tutupan Hutan/Lahan 32,17	ada
		5 8		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota		
				1. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah Ada2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap	ada

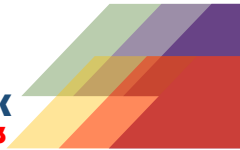
NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
					volume timbulan sampah Ada3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan Ada	
				Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
				1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	880383%	ada
				2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota	27174%	ada
		59		3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota/ kota		Di Kabupaten Gresik tidak ada penetapan hak masyarakat Hukum Adat
				4. Terasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH		Di Kabupaten Gresik tidak ada penetapan hak masyarakat Hukum Adat

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				5. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	100%	ada
				6. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	100%	ada
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	60		Perekaman KTP Elektronik		
				1. Penerbitan akta perkawinan	100%	Terjadi Peningkatan Perolehan Penerbitan Akta Perkawinan dari tahun 2022 sebesar 153 Akta Perkawin, di tahun 2023 Meningkat Menjadi 162 Akta Perkawinan. (Non Muslim)
				2. Penerbitan akta perceraian	100%	Terjadi Peningkatan Perolehan Penerbitan Akta Perceraian dari tahun 2022 sebesar 15 Akta Perceraian, di tahun 2023 Meningkat Menjadi 16 Akta

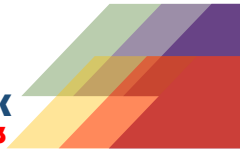
NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
						Perceraian (Non Muslim)
				3. Penerbitan akta kematian	100%	Perolehan Akta Kematian di tahun 2022 Sebesar 20.940 Akta Kematian, Sedangkan Perolehan di tahun 2023 Sebesar 17.273 Akta Kematian.
				4. Penyajian data kependudukan	100%	Pelaporan Dari tahun Ke tahun Per Semester Dispenduk capil ke Provinsi Jawa Timur
		6 1	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		677666%	Perolehan anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA di tahun 2022 Sebesar 79.73 % , Sedangkan Perolehan di tahun 2023 Sebesar 67.76 % Terjadi



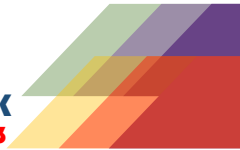
NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
						Penurunan DI karnakan di tahun 2023 Menyesuai kan Data dari Pusat.
		6 2	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran		990977%	Perolehan Anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki Akta Lahir di tahun 2022 Sebesar 98.20 % Akta Kelahiran, Sedangkan Perolehan di tahun 2023 Sebesar 99.09 % Akta Kelahiran.
		6 3	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama		217391%	Beberapa OPD yang Memanfaat kan data Kependudu kan karena dapat mengetahu i perkembangan pemanfaat an Masyarakat serta sebagai sarana informasi proses pembangu



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
						nan dan kesejateraa n masyarakat .
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	64	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal		100%	Semenjak akhir Tahun 2020, Desa dengan Status Tertinggal di Kabupaten Gresik berubah status menjadi Desa Berkemban g dan Desa Maju. Sehingga pada Tahun 2023 sudah tidak ada Desa dengan Status Tertinggal di Kabupaten Gresik. Sumber: Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigra si Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
		65				Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023; https://id.m.kemendesa.go.id/
				Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri		
				1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	19 Desa	Desa yang telah melakukan Kerja sama Antar Desa adalah sebanyak 19 Desa, jumlah ini merupakan akumulasi dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
				2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	5 Desa	Pada Tahun 2023 tidak ada Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Desa. Pada Tahun 2022, Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama

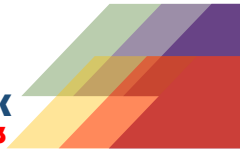


NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
						antar desa sebanyak 5 Desa yang terdiri dari KECAMATAN MANYAR (DESA MANYAREJO, MANYARSI DOMUKTI, MANYARSI DORUKUN, KARANGREJO, BANYUWANGI).
				3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	5901 Lembaga	Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan pada Desa Mandiri di Tahun 2023 terdiri dari : PKK Desa = 222 Lembaga; LPMD = 222 Lembaga; RT = 4.256 Lembaga; RW = 1.201 Lembaga; Total = 5.901 Lembaga

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	92 Desa	Desa yang lembaga kemasyara katan dan lembaga adatnya melaksana kan kegiatan ekonomi produktif dan pemberday aan dengan BUMDes Kategori Maju (Status IDM Desa Mandiri) di Tahun 2023 terdiri dari 16 Kecamatan - 92 Desa - 92 BUMDes. Sumber: https://dat adesacente r.dpmd.jati mprov.go.i d/ dan https://id m.kemende sa.go.id/
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6 6		TFR (Angka Kelahiran Total)		
				1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada	
				2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	21,53	data tahun 2022 berasal dari Siperindu (sistem informasi

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
						peringatan dini kependudukan)
				3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	10,80	data tahun 2022 berasal dari Siperindu (sistem informasi peringatan dini kependudukan)
				4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	839157%	
				5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	71 Stakeholder	
		6 7		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		
				1. Persentase Fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	918033%	
				2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	110832%	
				3. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	833 Kelompok Kerja KKBPK	
				4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	62.3663%	Data Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan berasal dari Dinkes
		6 8		Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/Hasil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
				1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dan Kota dengan kesertaan rendah	50%	Data yang ada yaitu data kecamatan bukan desa, berdasarkan target dari provinsi kesertaan KB minimal 68%
				2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	9.3110 %	Data Jumlah Keluarga PBI berasal dari Dinsos
15	PERHUBUNGAN			Rasio konektivitas Kabupaten/Kota		
				1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	74.2857 %	Sumber Data : UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Wilayah Kota Dishub Kab. Gresik Peraturan Menteri Perhubungan NO PM 40 Tahun 2015

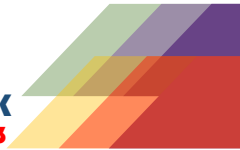


NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	75.4701 %	Sumber Data : UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub. Kab. Gresik (Tingkat kesadaran pemilik yang rendah Kendaraan Bermotor untuk mengujika n Kendaraan nya terutama untuk Kendaraan yang hanya beroperasi di area perusahaa n.)
				3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten/Kota, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	100%	Data Permohona n kenaikan Tarif Angkutan Penyebera ngan Gresik - Bawean
				4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota atau kota	100%	Sumber data : Database Perlengkap an Jalan Bidang Kelalulinta san Dinas Perhubung an Kab. Gresik Tahun 2023
				V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
		70		1. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	100%	Sumber data : Database Perlengkapan Jalan Bidang Kelalulintasan Dinas Perhubungan Kab. Gresik Tahun 2023
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	71		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		
				1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	95.6522 %	44 OPD yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan dan disediakan oleh Diskominfo
				2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	95.6522 %	44 OPD menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ada	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah
				Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		
		72		1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	100%	Terdapat 300 kegiatan perangkat daerah dan pelayanan publik yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara
				2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	97.8261 %	Terdapat 27 website OPD dan 18 website Kecamatan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	Seluruh OPD di Kabupaten Gresik telah mengimple mentasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus (Srikandi dan SIPD)
				4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	70.3704 %	Terdapat 38 layanan SPBE dari 54 layanan SPBE (layanan publik dan layanan administra si pemerintah an) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimpleme ntasikan secara elektronik
				5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	16.6667 %	Terdapat 9 layanan SPBE yang memanfaatkan sertifikat elektronik
				6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sebanyak 111



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
						notes: Sistem elektronik yang dimiliki dan aktif oleh Kabupaten Gresik
				7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	18.5185 %	Terdapat 10 layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah
				8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100%	Data OPD terlampir
				9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100%	Data OPD terlampir
				10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100%	Data OPD terlampir
				11. Persentase data yang dapat berbagi pakai	100 %	1576 data yang dapat berbagi pakai
				12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	43.4783 %	Terdapat 20 OPD yang masuk dalam masterplan smart city Kabupaten
				13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi	100%	Terdapat 15 ASN pengelola

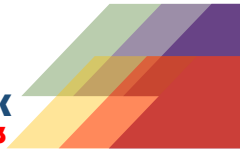
NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				di bawah pengelolaan Dinas Kominfo		TIK yang memiliki sertifikasi TIK
				14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada	Tersedianya Perbup 28 Tahun 2023 tentang SPBE, SK Bupati 345 Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, SK Tim koordinasi
		73		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
				1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota	78.5714 %	Ada 11 KIM dari total 14 KIM yang menjadi mitra pemerintah dalam penyebaran informasi dan kebijakan pemerintah
				2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100 %	100% konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
						dengan strategi komunikasi (STRAKOM)
				3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	Terdapat 4 diseminasi informasi yang telah dilakukan
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	7 4		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas		
				1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota		Tidak ada Izin
				2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota		Tidak ada Izin
				3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	100%	
				4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	7.3710 %	
				5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	100%	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				6. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	14.7059 %	
				7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	100%	
				8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan		
				9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	100%	Diaplikasi ODS ya itu yang terdaftar jika ingin cetak NIK koperasi Harus 1 pr satu
				10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	27.4064 %	
				11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	4.8128 %	
				12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	71.3904 %	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	5.8824 %	
		7 5		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha		
				1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	100%	
				2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam system only data system (ODS)		data ada pada Perizinan
				3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	3.8688 %	
				4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha		
				5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	16.8209 %	
				6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	20.1850 %	
				7. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	41.5475 %	
18	PENANAMAN MODAL	7 6		Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota /Kota		
1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Ada Perda No. 8 Tahun 2020			Perda No. 8 Tahun 2020		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	AdaMasih berupa draft Perbub	1. Masih diprlukann ya koordinasi yang intens dengan OPD teknis yang terkait(BP PKAD, Dishub, Dinkes dan Dinas teknis yang mempunya i kriteria dengan pemberian insentif fiscal bagi pelaku usaha)2. Perlunya harmonisas i aturan perundang an lainnya seperti PP No. 40/2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Gresik dimana Pemda juga diwajibkan memberika n insentif kepada Badan usaha Pengelola dan Pembangu nan maupun tenant yang ada dalam KEK sehingga

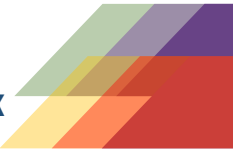


NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
						Perbub yang disusun mengalami beberapa kali revisi
				3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal
				4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1 Kegiatan	Terdapat Kegiatan Seminar Bisnis
				5. Kegiatan pameran penanaman modal	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan Pameran Penanaman Modal
				6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	1 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Penerimaan Misi Penanaman Modal

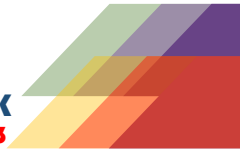
NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	228 Konsultasi	Jumlah Konsultasi
				8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	64153 Izin	Jumlah Izin
				9. Laporan realisasi penanaman modal	Laporan Realisasi Penanama n Modal Rp. 49.461.89 7.000.000	Jumlah Realisasi Penanama n Modal
				10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat Kabupaten/Kota	2 Aparatur	Jumlah Pembinaan Aparatur Tahun 2023
				11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	86 Perusahaa n	Jumlah Rekap Hasil Pengawasa n 2023
				12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi Kabupaten/Kota	Ada 6 Permintaa n Data dan Informasi	Jumlah Permintaa n Data dan Informasi
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7 7		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		
				1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	150 Orang	Ada
				2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	45 Orang	Ada
		7 8		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		
				1. Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	485 Orang	Ada
				2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan	712 Orang	Ada

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
		79		yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		
				Peningkatan prestasi olahraga		
				1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	193 Orang	Ada
				2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	7 Event/Kegiatan	Ada
20	STATISTIK	80		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		
				1. Tersedianya buku profil daerah	Ada	Ada buku profil daerah
				2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	7 Survey	Terdapat 7 survey statistik sektoral yang dilakukan
				3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	73 Kompilasi	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan 73 kompilasi statistik sektoral
				4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	7 Survey	Terdapat 7 survey statistik sektoral yang mendapat rekomenda si BPS
				5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	73 Kompilasi	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomenda si dr BPS 73

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
						kompilasi statistik sektoral
				6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100%	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral 100% (80/80)
				7. Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	100%	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral 100% (370 dari 370)
		81	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	(46 / 46) =	Semua OPD (46 OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	
21	PERSANDIAN			Tingkat keamanan informasi pemerintah		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
		82		1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100%	1. Kegiatan strategis adalah kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategi atau kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan sinyal/akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan, misalnya Rapat Paripurna, Musrenbang, Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Pleno, Pelantikan, Upacara Penting



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
						dan lain-lain 2. Kegiatan pengamanan sinyal adalah kegiatan pembatasan sinyal/akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapka prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	88.2883 %	1. Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah bagian dari sistem secara keseluruhan berdasarkan pendekatan resiko bisnis untuk mendapatkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan dan memelihara keamanan informasi. SMKI mencakup struktur kebijakan, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan sumber daya organisasi. 2. Diterapkan nya SMKI pada suatu organisasi dapat dicerminka n dengan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
						adanya infrastruktur keamanan informasi yang telah memadai
				3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	100%	Sistem elektronik yang akan diaudit yang dimiliki dan aktif oleh Kabupaten Gresik
				4. Persentase titik yang diamankan disbanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	100%	Email sanapati
22	KEBUDAYAAN	83		Terlestarikannya Cagar Budaya		
				1.Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan,	479 Obyek	Ada

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				penyelamatan dan publikasi)		
				2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	124 Obyek	Ada
				3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	124 Obyek	Ada
				4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	103 Orang	Ada
				5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringktan, penghapusan)	44 Cagar Budaya	Ada
				6. Perlindungan cagar budaya Kabupaten/Kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	44 Cagar Budaya	Ada
				7. Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0 Cagar Budaya	Ada
				8. Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	127 Cagar Budaya	Ada
				9. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	44 Cagar Budaya	Ada

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	141 Koleksi	Ada
				11a. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum dan Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	13028 Orang	Ada
				11b. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum dan Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	13028 Orang	Ada
				12. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		
				13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya Kabupaten/Kota	1 Tim	Ada
				14. Pembentukan tim ahli cagar budaya Kabupaten/Kota	0 Tim	Ada
				15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	2 Orang	Ada
				16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	9 Orang	Ada
				17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	22 Orang	Ada
				18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	192 Unit	Ada
				19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	12 Kegiatan	Ada
23	PERPUSTAKAAN			Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
		84		1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	98.6042 %	
				2. Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	48.6467 %	
				3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0.0991 %	
				4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	2.7344 %	
				5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	11	
		85		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		
				1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	11 Naskah Kuno	
				2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	5 Naskah Kuno	
				3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	415 Budaya Etnis	
24	KEARSIPAN	86		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
				1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	43.2750 %	
				2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	32.5632 %	
				3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	60.3994 %	
				4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0.0032 %	
		87		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		
				1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	2200 Arsip	
				2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	8 Arsip	
				3. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	930 Arsip	
				4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	119 Arsip	
				5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	15 Arsip	
				6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	0 Arsip	Kami menyajikan Surat Pernyataan bahwa dalam izin perbitan arsip belum bisa terlaksana dikarenakan sampai saat ini belum ada yang meminta izin penggunaa n arsip

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	88		Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)		
				1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	344 Rumah Tangga	
				2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100%	
				3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	0 Izin	kabupaten tidak berwenang menerbitkan Ijin Usaha Perikanan
				4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan	1912 Pembudid aya	
				5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	30936790 Ekor	
26	PARIWISATA	89		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		
				1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	7 Kawasan	Ada
				2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	424 Sarpras	Ada
				3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota	654 TDUP	Ada
				4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	18,281 Orang	Ada
				5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	11 Kegiatan	Ada
				6. Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota	0 Kegiatan	Ada

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	4 Industri	Ada
				8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	4.1569 %	Ada
				9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100%	Ada
				10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	5 Lokasi	Ada
		9 0	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten /Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	3.8868 %	Ada
		9 1	Tingkat Hunian Akomodasi	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	49.2099 %	Ada
		9 2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	18.6676 %	Ada
		9 3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	8.0343 %	Ada
27	PERTANIAN	9 4		Produktivitas pertanian per hektar per tahun		
				1. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	315 Unit	
				2. Prasaran pertanian yang digunakan	993 Unit	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				3. Penerbitan izin usaha pertanian	44 Dokumen	
				4. Persentase prasarana yang digunakan	85.3826 %	
				5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di Kabupaten/Kota	100%	
		9 5		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular		
				1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100%	
28	KEHUTANAN	9 6		Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan Kabupaten/Kota		
				1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Tidak	
				2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Kelompok Masyarakat	
				3. Pemulihan ekosistem pada Tahura	Ha	
				4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Kejadian	
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	9 7		Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota		
				1. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten/Kota	Tidak Bukan Wewenang Kabupaten	Bukan Wewenang Kabupaten
30	PERDAGANGAN	9 8		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		
				1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin: a. Pusat Perbelanjaan b. Toko Swalayan	100%	Jumlah Izin Pusat Perbelanjaan
				--	100%	Jumlah Izin Toko Swalayan yang Sudah Terbit

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				2. Persentase penerbitan TDG	88.4615 %	Jumlah Pemohon TDG terdapat 26 sedangkan terbit TDG terdapat 23
				3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	24.7619 %	DPMPTSP tidak mempunya i data gudang diseluruh Kab. Gresik. Data yang ada di DPMPTSP hanya gudang yang sudah memiliki ijin
				4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	100%	Jumlah STPW Terbit
				--	100%	Bukan Wewenang DPMPTSP
				--	100%	Bukan Wewenang DPMPTSP
				5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kabupaten/Kota	100%	Bukan Wewenang DPMPTSP

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	100%	berikut adalah screenshoot langsung via aplikasi https://ska.kemendag.go.id/ dikarenakan pemohon dan verifikasi langsung via aplikasi tanpa menggunakan form kertas
				7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	14 %	
				8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	5.95 %	
		9 9		Persentase kinerja realisasi pupuk		
				Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	104.43 %	
		1 0 0		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		
				1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	100%	
				2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100%	
	31 PERINDUSTRIAN	1 0 1		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota		
				1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten/Kota	89.4737%	
				Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
		1 0 2		dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)		
					60% a. Tersusunnya naskah akademik (30%) Ya b. Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) Ya c. Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) Ya d. Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) Tidak e. Penetapan Perda RPIK (10%) Tidak	
		1 0 3		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		
				1. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha	89.4737 %	Jumlah Izin Usaha

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
				industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan		Industri yang Diterbitkan
		104		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		
				1. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	100%	Jumlah Izin Perluasan Industri Hasil Pemantauan
		105		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota		Bukan Wewenang DPMPSTP
		106		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		
				-- 7 Informasi industri secara lengkap dan terkini --	1001. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (25%) Ada2. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) Ada3. Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) Ada4. Informasi bahan baku dan	data tersebut di ambil dari https://siin.as.kemenerin.go.id dan tidk bisa di cetak rekap, dikarenakan dinas kami hanya login rekomendasi dan verifikasi saja

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	N O	IKK Outcome/H asil	IKK KINERJA KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANG AN
					bahan penolong (10%) Ada5. Informasi bahan bakar/energi (10%) Ada6. Informasi tenaga kerja (10%) Ada7. Informasi Investasi (10%) Ada	
				1. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	100%	
32	TRANSMIGRASI	107		IKK Output Urusan Transmigrasi Kabupaten/Kota		
				1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan	
				2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Permukiman	
				3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Permukiman	

II.2.1. INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)

No.	Urusan	IKK Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	101437800%	PD	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	1057515%	PD	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	983641%	PD	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	PD	
2	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,1438%	PD	

		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota	100%	PD	
		yang terakreditasi			
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	PD	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	PD	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	PD	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	PD	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	PD	
		Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	PD	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	PD	

		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	PD	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	PD	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 	100%	PD	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	PD	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 	130,8342%	PD	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0%	PD	

adalah nol

[illegible]

		 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	2,2396%	PD	
5	Ketentra man, Ketertib an Umum dan Perlindu ngan	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	23,9316%	PD	
	Masyara kat				
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	PD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	PD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	100%	PD	
		kesiapsiagaan terhadap bencana			
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	PD	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	PD	

		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	13,8	PD	
6	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar	99,1062%	PD	
		panti (Indikator SPM)			
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	100%	PD	
		bencana daerah kabupaten/kota			
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	PD	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	328,2563%	PD	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	165,288,980.5342	PD	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan	100%	PD	
		terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).			

		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar	73,637%	PD	
		Kerja dalam wilayah kabupaten/kota			
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	31,1955%	PD	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%	PD	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	100%	PD	
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan	80,39%	PD	
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi		PD	
		dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan			
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100%	PD	
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam	100%	PD	

		rangka penanaman modal			
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100%	PD	
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	100%	PD	
		Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	PD	
11	Lingku gan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	5861%	PD	
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	77,2047%	PD	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	67,7666%	PD	
12	Administ rasi Kepend udukan dan	Perekaman KTP elektronik	99,7490%	PD	
		Persentase anak usia 01-18 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	99,097%	PD	
		Kepemilikan akta kelahiran	67,7666%	PD	

	Pencatatan Sipil	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	21,739%	PD	
13	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	100%	PD	
		Persentase peningkatan status desa mandiri	100%	PD	
14	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,95	PD	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	68,1755%	PD	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	13,0207%	PD	
15	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	1	PD	
		Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,335%	PD	
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	95,652%	PD	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70,454%	PD	

		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	77,7787%	PD	
17	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	68,4492%	PD	
	ah				
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	100%	PD	
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	56,584%	PD	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	19,5892%	PD	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	94,8205%	PD	
		Peningkatan prestasi olahraga	304	PD	
20	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	PD	

		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100,0000%	PD	
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	32,4031%	PD	
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	PD	
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	59,3	PD	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	54,51%	PD	
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009	34,0602	PD	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100%	PD	
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data	101,1200%	PD	

		KKP)			
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	45,0988%	PD	
		mancanegara per kebangsaan			
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	3,8868%	PD	
		Tingkat hunian akomodasi	49,2099%	PD	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	186,6676%	PD	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	8,0343%	PD	
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	614,3222%	PD	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	-73,7851%	PD	
28	Kehutanan	-	TIDAK	Pemda	Kabupaten Gresik tidak memiliki
					Hutan
29	Energi dan	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	TIDAK	Pemda	Kabupaten Gresik tidak memiliki

	Sumber Daya				
	Mineral				Panas bumi
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko	100%	PD	
		Swalayan)			
		Persentase kinerja realisasi pupuk	93,9912%	PD	
		Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	120,0269%	PD	
31	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	0,8725%	PD	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang	100%	PD	
		ditetapkan dalam RPIP			
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh	100%	PD	

		instansi terkait			
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	PD	Tidak ada Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan
					Tahun 2022
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	0%	PD	Tidak ada Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten Gresik yang dikeluarkan
					Tahun 2022
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0	PD	

32	Transmigrasi	-	0	Pemda	Kabupaten Gresik tidak memiliki daerah transmigrasi
----	--------------	---	---	-------	---

II.2.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber data	KET
1	2	3	4	5	6
1.	PERENCANAAN KEUANGAN	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	9,5996%	PD	
		Rasio PAD	342766%	PD	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	ADA LEVEL 3	PD	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	ADA LEVEL 3	PD	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	54,9066%	PD	
		Opini Laporan Keuangan	9 WTP 10 Tahun Terakhir	PD	
2	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang	0%	PD	Tidak ada pekerjaan

		dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama			dengan kontrak multiyears
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	1,198,6784%	PD	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	37,0287%	PD	
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	62,3368%	PD	
3	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	64,5393%	PD	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	17,5509%	PD	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru	37,2727%	PD	
		dan tenaga kesehatan)			
4	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-16,3275%	PD	
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-27,3077%	PD	
		Manajemen Aset	4	PD	
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja	2,1557%	PD	

		dalam APBD tahun sebelumnya			
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	100%	PD	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100%	PD	

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik merupakan wujud komitmen Bupati selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Gresik dalam mempertanggung-jawabkan kinerja Pemerintah Daerah kepada publik atas kinerja yang telah dicapai. Pedoman penyusunan laporan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



SKALA PENGUKURAN AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis digunakan alat bantu berupa skala ordinal. Adapun skala ordinal dan kriteria keberhasilan yang digunakan berdasarkan Pemendagri No. 86 tahun 2017 dalam laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	91% < 100%	sangat tinggi
2	76% < 90%	tinggi
3	66% < 75%	sedang
4	51% < 65%	rendah
5	< 50%	sangat rendah

Pengukuran pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan.

Rumus perhitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yang dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

- Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capain kinerjanya, dengan rumus:

$$\text{Persentase Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- Indikator Negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerjanya, dengan rumus:

$$\text{Persentase Capaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

VISI

“Mewujudkan Gresik Baru yang lebih mandiri, sejahtera, berdaya saing dan berkemajuan berlandaskan Akhlakul Karimah”

MISI

- 01** Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah
- 02** Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.
- 03** Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota
- 04** Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif
- 05** Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

PERJANJIAN KINERJA

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
MISI 1 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah			
T.1	Tujuan 1 : Memperkuat pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	3-4
s.1	Sasaran : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	88,7
		Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	4% - 5%
MISI 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik			
T.2	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	10-10,7
		Tingkat Pengangguran Terbuka	6,8
s.2	Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70
		Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	>85
MISI 3 : Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota			
T.3	Tujuan : Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	3,21
s.3	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	67
s.4	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,4
s.5	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	91,86
Misi 4 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif			
T.4	Tujuan : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	77,34
s.6	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,65

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
s.7	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	43
MISI 5 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah			
T.5	Tujuan : Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	79,42
s.8	Meningkatnya nilai nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	67,21
s9	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	80,8
		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	67,6
		Prevalensi Stunting	10-9

dalam mencapai 5 misi tersebut ditetapkan 5 tujuan dan 9 sasaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Gresik Tahun 2023 dan disusun sebanyak 2 (dua) kali antara lain :

- Perjanjian Kinerja APBD ditetapkan tanggal 9 Januari 2023 dan;
- Perjanjian Kinerja PAPBD ditetapkan tanggal 15 November 2023



Dalam pencapaian target kinerja yang diperjanjikan di perlukan anggaran sebesar Rp. 3.952.148.283.541 meningkat sebanyak Rp. 13.221.903.312 atau 0,33% dari anggaran tahun 2022, sebagaimana tabel berikut :

2022	2023
Rp. 3.938.926.380.229	Rp. 3.952.148.283.541

1. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN
	MISI 1 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah					
T.1	Tujuan 1 : Memperkuat pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	3-4	4.62	115.50%	SANGAT TINGGI
s.1	Sasaran : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	0,3 - 0,4	0.34	100%	SANGAT TINGGI
		Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	4% - 5%	3.2	80%	TINGGI
	MISI 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik					
T.2	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor etenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	10-10,7	10,96	97,63%	SANGAT TINGGI
		Tingkat Pengangguran Terbuka	6,8	6,82	99,71%	SANGAT TINGGI
s.2	Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70	70.12	100.17%	SANGAT TINGGI
		Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	>85	111,12	100%	SANGAT TINGGI
	MISI 3 : Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota					

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN
T.3	Tujuan : Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	3,21	3.38	105.30	SANGAT TINGGI
s.3	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	67	89.62	133,76%	SANGAT TINGGI
s.4	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,4	58,5	96,85%	SANGAT TINGGI
s.5	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua gol	Indeks Pembangunan Gender	91,86	90.78	98,82%	SANGAT TINGGI DATA 2022
Misi 4 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif						
T.4	Tujuan : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	77,34	86.84	112.28%	SANGAT TINGGI
s.6	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,65	4,28	117,26%	SANGAT TINGGI
s.7	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunanKolaboratif di semua levelPemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	43	45,92	106.79%	SANGAT TINGGI
MISI 5 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah						

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN
T.5	Tujuan : Memperkuat pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	79,42	78,44	98,76%	SANGAT TINGGI
s.8	Meningkatnya nilai nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	67,21	79.16	117.78%	SANGAT TINGGI
s.9	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	80,8	78.9	97.65%	SANGAT TINGGI DATA 2022
		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	67,6	82.2	121.60%	SANGAT TINGGI
		Prevalensi Stunting	10-9	9.12	100%	SANGAT TINGGI
	Rata -rata				105.26%	SANGAT TINGGI

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 6 indikator tujuan seluruhnya telah sesuai dengan target yang diharapkan dengan kategori “SANGAT TINGGI”, dan untuk indikator sasaran dari 13 indikator terdapat 12 (duabelas) indikator kategori Sangat Tinggi, 1 (satu) indikator kategori tinggi .

Sehingga Rata-rata Kinerja tahun 2023 sebesar 105.26% dengan katori “SANGAT TINGGI” dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik telah berhasil menjalankan amanah yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja.

2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023	PENINGKATAN / (PENURUNAN)
	MISI 1 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah				
T.1	Tujuan 1 : Memperkuat pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	7.38	4.62	Menurun
s.1	Sasaran : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	48	0.34	penyesuaian formulasi perhitungan
		Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	3.17	3.2	Meningkat
	MISI 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik				
T.2	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor etenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	11,06	10,96	Meningkat
		Tingkat Pengangguran Terbuka	7,84	6,82	Meningkat
s.2	Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68,3	70.12	Meningkat
		Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	90.66	111,12	Meningkat
	MISI 3 : Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota				

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023	PENINGKATAN / (PENURUNAN)
T.3	Tujuan : Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	3.42	3.38	Menurun
s.3	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	87,39	89.62	Meningkat
s.4	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,15	58,5	Meningkat
s.5	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua gol	Indeks Pembangunan Gender	90.78	90.78	Belum Rilis
Misi 4 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif					
T.4	Tujuan : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	68,93	86.84	Meningkat
s.6	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,27	4,28	Meningkat
s.7	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunanKolaboratif di semua levelPemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	48,4	45,92	Menurun
MISI 5 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah					

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023	PENINGKATAN / (PENURUNAN)
T.5	Tujuan : Memperkuat pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	77,62	78,44	MENINGKAT
s.8	Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	79.16	79.16	Belum rilis
s.9	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	73,41	78.9	Meningkat
		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	65,94	82.2	Meningkat
		Prevalensi Stunting	10,7	9.12	Meningkat

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 6 indikator tujuan seluruhnya mengalami peningkatan kecuali 2 (dua) indikator indeks daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi. Untuk indikator sasaran dari 13 (tiga belas) indikator hampir seluruhnya telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2022, kecuali indikator indeks inovasi daerah mengalami penurunan.

Sehingga dapat disimpulkan sebagian besar kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2022



3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Pembangunan Jangka Menengah

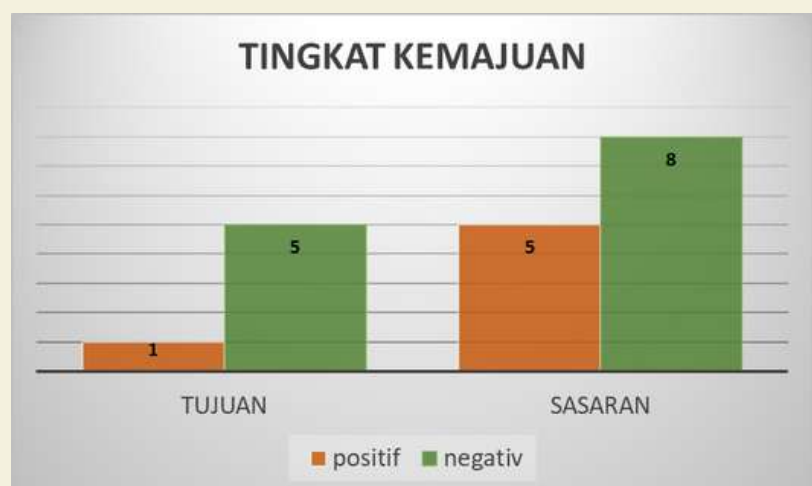
NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD 2026	REALISASI 2023	TINGKAT KEMAJUAN
	MISI 1 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah				
T.1	Tujuan 1 : Memperkuat pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	5,5	4.62	-
s.1	Sasaran : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	0.3-0.4	0.34	+
		Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	5%-6%	3.2	-
	MISI 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik				
T.2	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor etenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	9-9,4	10,96	-
		Tingkat Pengangguran Terbuka	5,54	6,82	-
s.2	Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	78%	70.12	-
		Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	>100%	111,12	+
	MISI 3 : Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota				

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD 2026	REALISASI 2023	TINGKAT KEMAJUAN
T.3	Tujuan : Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	3,72	3.38	-
s.3	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	76	89,62	+
s.4	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,18	58,5	-
s.5	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua gol	Indeks Pembangunan Gender	93,64	90.78	-
Misi 4 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif					
T.4	Tujuan : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	88,6	86.84	-
s.6	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,13	4,28	+
s.7	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunanKolaboratif di semua levelPemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	sangat inovatif (5,200)	Inovatif 45,92	-
MISI 5 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah					

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD 2026	REALISASI 2023	TINGKAT KEMAJUAN
T.5	Tujuan : Memperkuat pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	81,12	78,44	-
s.8	Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	74	79.16	+
s.9	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	83,6	78.9	-
		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	73,3	82.2	+
		Prevalensi Stunting	7	9.12	-

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 6 indikator tujuan seluruhnya belum melampaui target akhir tahun pembangunan jangka menengah 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Untuk indikator sasaran dari 13 (tiga belas) indikator terdapat 5 (lima) indikator yang melampaui target akhir tahun (2026) dan terdapat 8 (delapan) indikator yang belum melampaui target (2026)



4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Rata-rata Capaian Nasional / Prov. Jatim

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NASIONAL/ PROVINSI	KAB. GRESIK	LEBIH TINGGI / LEBIH RENDAH
	MISI 1 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah				
T.1	Tujuan 1 : Memperkuat pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	4.95	4.62	Lebih rendah dari Provinsi jatim
s.1	Sasaran : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	N/A	0,34	
		Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	1.79	3.17	Lebih tinggi dari Provinsi jatim
	MISI 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik				
T.2	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor etenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	10.35	10,96	dibawah nilai Provinsi jatim
		Tingkat Pengangguran Terbuka	5.32	6,82	dibawah nasional
s.2	Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69.48	70.12	lebih tinggi dari nasional
		Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	N/A	111,12	
	MISI 3 : Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota				

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NASIONAL/ PROVINSI	KAB. GRESIK	LEBIH TINGGI / LEBIH RENDAH
T.3	Tujuan : Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	3.44	3.38	Lebih rendah dari Nasional
s.3	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	N/A	89,62	
s.4	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72.54	58,5	lebih rendah dari Nasional
s.5	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua gol	Indeks Pembangunan Gender	92.08	90.78	Lebih rendah dari Prov jatim
Misi 4 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif					
T.4	Tujuan : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	69.71	86.84	Lebih tinggi dari Rata-rata Prov
s.6	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.62	4,28	Lebih tinggi Prov. jawa timur
s.7	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunanKolaboratif di semua levelPemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	71.38	45,92	Lebih rendah dari Prov. jawa timur
MISI 5 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah					

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NASIONAL/ PROVINSI	KAB. GRESIK	LEBIH TINGGI / LEBIH RENDAH
T.5	Tujuan : Memperkuat pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	74.65	78,44	Lebih tinggi dari Provinsi Jawa timur
s.8	Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	72.03	79.16	Lebih tinggi dari Provinsi Jawa timur
s.9	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	64	78.9	Lebih tinggi dari Provinsi Jawa timur
		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	N/A	82.2	
		Prevalensi Stunting	19.2	9.12	lebih tinggi dari prov Jatim th 2022

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 6 indikator tujuan terdapat 2 (dua) indikator yang realisasinya lebih tinggi daripada realisasi provinsi Jawa timur / realisasi nasional dan terdapat 4 (empat) indikator yang realisasinya lebih rendah dari provinsi Jawa timur/nasional. Untuk indikator sasaran terdapat 6 (enam) indikator yang realisasinya lebih tinggi dari realisasi provinsi Jawa timur / nasional. dan terdapat 3 (tiga) indikator yang realisasinya lebih rendah dari provinsi Jawa timur / nasional dan sisanya belum tersedia data perbandingan

Sehingga dapat disimpulkan sebagian besar capaian kinerja pemerintah kabupaten Gresik lebih tinggi daripada capaian kinerja provinsi Jawa timur / Nasional



5. Analisis penyebab Keberhasilan / Kegagalan

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
1	MISI 1 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah			
T.1	Tujuan 1 : Memperkuat pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	- meningkatnya investasi yang masuk di kab. gresik - adanya kawasan Ekonomi Khusus di Kabupaten Gresik	- Promosi Investasi - penetapan Perbup 80 Th 2023 Insentif dan kemudahan penanaman modal - pengembangan inovasi layanan perijinan berusaha
s.1	Sasaran : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	konsentrasi kegiatan ekonomi dan alokasi investasi yang tidak merata hanya terbatas di wilayah perkotaan yang berbatasan dengan surabaya dan sidoarjo	- pembangunan infrastruktur merata di seluruh wilayah kabupaten Gresik - Pengembangan Bumdes
		Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	- Jumlah produksi tahun 2023 bidang pertanian, kehutanan dan perikanan meningkat - adanya dampak perubahan iklim berupa banjir dan kekeringan panjang mempengaruhi pendapatan sektor pertanian - alih fungsi lahan ke sektor non pertanian	- dikembangkannya inovasi teknologi pertanian - pemanfaatan limbah rumah potong hewan untuk pupuk organik, pakan ternak dan ikan serta pupuk cair - fasilitasi penyediaan sarana pertanian dan prasarana pertanian dan perikanan - penyelenggaraan sekolah lapang petani

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
2	MISI 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik			
T.2	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	adanya pengembangan ekonomi khusus di gresik menyerap banyak tenaga kerja sehingga pengangguran menurun dan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan	- pemanfaatan Intelligent Operational platform (IOP) untuk sinergitas antar opd pengampu program pengentasan kemiskinan agar tidak tumpang tindih - fokus pada penanganan kemiskinan di pulau bawean
		Tingkat Pengangguran Terbuka	- Penerapan PERDA 7 Tahun 2022 tentang kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal minimal 60% - adanya kawasan ekonomi khusus (KEK) - monitoring dan evaluasi kepatuhan terhadap PERDA 7 Th 2022	- Pembangunan aplikasi AK1 untuk pelaporan mandiri perusahaan terkait penempatan tenaga kerja dan fasilitasi pencari kerja - penyelenggaraan job fair
s.2	Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Meningkatnya investasi di kabupaten gresik	pelatihan ketrampilan K3 umum, las, kelistrikan dll
		Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	- adanya program prioritas bupati (nawa karsa meliputi : 1. PKH Inklusi 2. program jaminan kesehatan (UHC) 3. Kejar paket tuntas putus sekolah (JAKETKU) 4. beasiswa mahasiswa miskin	- perluasan sasaran penerima PKH inklusi - Percepatan KIP melalui integrasi dg data DTKS - Pemutakhiran data berkala penerima UHC

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
3	MISI 3 : Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota			
T.3	Tujuan : Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	• inflasi terjaga • rendahnya kemampuan UMKM bersaing dengan kelompok usaha sedang dan besar • kurangnya kesempatan bagi produsen untuk memasarkan produknya	• Promosi UMKM • Sidak harga pasar • pelatihan tenaga kerja
s.3	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	• pembangunan infrastruktur yang merata	• penambahan alokasi anggaran untuk infrastruktur
s.4	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	• pengawasan terkait pengelolaan lingkungan oleh perusahaan • pelaksanaan program kampung iklim • adanya inovasi alat pengolah sampah (RDF) • normalisasi kali lamong	• penyediaan alat transportasi massal • pembinaan terhadap pelaku usaha untuk melaporkan pengelolaan limbahnya • adanya program gresik kawasan merdeka sampah
s.5	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua gol	Indeks Pembangunan Gender	• keterlibatan perempuan dalam publik sektor • pendapatan dan pendidikan perempuan dan laki-laki seimbang • angka harapan hidup saat lahir perempuan dan laki-laki hampir sama	• penyelenggaraan musrenbang perempuan • penyusunan analisa responsif gender di seluruh PD • pelatihan Pengarusutamaan gender (PUG) • meningkatkan partisipasi perempuan dibidang ekonomi kesehatan dan pendidikan (bunda puspa)

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
4	Misi 4 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif			
T.4	Tujuan : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	• adanya perubahan roadmap RB untuk mewujudkan RB Berdampak • komitmen bersama kepala PD melaksanakan renaksi RB	• Penyempurnaan renaksi Reformasi birokrasi
s.6	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	• komitmen pimpinan • komitmen kolompok kerja tim Koordinasi SPBE dalam menjalankan program kerjanya • monev berkala pelaksanaan program kerja tiap triwulan	• evaluasi terhadap dokumen proses bisnis • melaksanakan audit keamanan sesuai standart
s.7	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan Kolaboratif di semua level Pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	inovasi yang dihasilkan tidak memenuhi standart yang ditetapkan oleh kementrian dalam negri	dilakukan desk terhadap inovator dan penetapan pedoman penyusunan inovasi

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
5	MISI 5 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah			
T.5	Tujuan : Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	• meningkatnya investasi • bantuan biaya pendidikan dikemas dalam program JAKETKU • meningkatnya kesadaran masyarakat akan hidup sehat • adanya jaminan biaya kesehatan dari pemerintah	• pembangunan rumah sakit sehat di wilayah Gresik selatan
s.8	Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	tingkat kesalehan sosial masyarakat Kabupaten Gresik dipengaruhi oleh banyaknya pondok pesantren yang tersebar diseluruh wilayah baik perdesaan maupun perkotaan serta adanya kawasan religius mengakibatkan warga Gresik memiliki sikap peduli, sikap memberi dan menghargai perbedaan	• mengkampanyekan sikap toleransi antar umat beragama dan menggalakkan gerakan penghijauan sebagai upaya meningkatkan nilai keterlibatan dalam restorasi • meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya nilai kesalehan sosial, terutama di daerah masyarakat urban
s.9	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	• meningkatnya kemampuan numerasi siswa • pemanfaatan TI untuk memperbaiki mekanisme dan kualitas mutu pembelajaran • adanya pembiayaan dari APBD untuk biaya pendidikan • pembangunan fasilitas pendidikan	• meningkatkan standart kualifikasi tenaga pendidik • pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus di seluruh lembaga pendidikan (inklusi) • penyesuaian kompetensi pengajar dengan mata ajar

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
s.9	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	meningkatnya pelayanan kesehatan balita, reproduksi dan kinerja pelayanan kesehatan didukung oleh perilaku kesehatan masyarakat, akses sanitasi yang baik dan kecukupan air minum	• pembangunan sanitasi • pemeriksaan kualitas air minum secara berkala oleh laboratorium kesehatan daerah
		Prevalensi Stunting	• disediakan anggaran merata mulai dari dinas kesehatan, KBPP, Desa dan instansi terkait • adanya dukungan csr dari perusahaan sekitar • pendampingan yang intensif dari kader dan tenaga kesehatan dan PKK	• Monev oleh KBPP terkait pemantauan pemberian makanan tambahan ke balita • Pemanfaatan aplikasi Gresik Urus stunting (GUS) • program orang tua asuh dalam pemberian makanan tambahan

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar keberhasilan capaian kinerja tahun 2023 dipengaruhi oleh adanya peningkatan investasi di Kabupaten Gresik sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian yang ada dan berdampak pada beberapa indikator yang lain seperti tingkat pengangguran terbuka yang mengalami penurunan dan tingkat kemiskinan yang juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Selain faktor investasi, komitmen pemerintah Kabupaten Gresik juga sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja. Dibuktikan dengan ditetapkannya kebijakan-kebijakan strategis yang menunjang pencapaian kinerja seperti ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2022 yang mewajibkan setiap industri menggunakan tenaga kerja lokal minimal 60% dan kepatuhan terhadap Perda tersebut selalu diawasi.

6. Alokasi Anggaran dalam pencapaian tujuan

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
	MISI 1 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah				
T.1	Tujuan 1 : Memperkuat pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	8.418.812.928,00	7.198.846.939,28	85.51
s.1	Sasaran : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	7,212,558,636.00	6,343,221,242.28	87.95
		Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	1,206,254,292.00	855,625,697.00	70.93
	MISI 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik				
T.2	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor etenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	346,575,952,844.00	296,257,560,958.76	85.48
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,925,520,185.00	4,262,354,449.00	86.54
s.2	Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	4,925,520,185.00	4,262,354,449.00	86.54
		Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	346,575,952,844.00	296,257,560,958.76	85.48
	MISI 3 : Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota				

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
T.3	Tujuan : Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	106.403.192.090,00	71,129,997,976.50	66.85
s.3	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	65,070,138,258.00	33,073,905,476.00	50.83
s.4	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1,268,272,270.00	1,238,984,994.50	97.69
s.5	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua gol	Indeks Pembangunan Gender	40.064.781.562	36.817.107.506	91.89
Misi 4 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif					
T.4	Tujuan : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	3.431.768.453.874	2.991.551.855.791	87.17
s.6	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.304.126.476.841	2.872.297.191.172	86.93
s.7	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunanKolaboratif di semua levelPemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	127.641.977.033	119.254.664.619	93.43
MISI 5 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah					

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
T.5	Tujuan : Memperkuat pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	54.056.351.620,00	48.236.619.806,93	89.23
s.8	Meningkatnya nilai nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	1,348,625,800.00	1,346,410,050.00	99.84
s.9	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	526,302,100.00	324,598,690.00	61.68
		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	42,962,769,720.00	37,916,858,540.00	88.26
		Prevalensi Stunting	9,218,654,000.00	8,648,752,526.93	93.82
	TOTAL		3.952.148.283.541	3.418.637.235.921,52	86.50

7. Analisis efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah dicapai.

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KEUANGAN	EFISIENSI
	MISI 1 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah				
T.1	Tujuan 1 : Memperkuat pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	115.50%	85.51	14.49%
s.1	Sasaran : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	100%	87.95	12,05%
		Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	80%	70.93	11,33%
	MISI 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik				
T.2	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor etenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	97,63%	85.48	12.44%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	99,71%	86.54	13.21%
s.2	Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	100.17%	86.54	13.46%
		Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	100%	85.48	14.52%
	MISI 3 : Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota				

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KEUANGAN	EFISIENSI
T.3	Tujuan : Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	105.30	66,85	33.15%
s.3	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	132.90%	60,83	49.17%
s.4	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	96,81%	97,69	-0,86%
s.5	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua gol	Indeks Pembangunan Gender	98,82%	91,89	7.01%
Misi 4 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif					
T.4	Tujuan : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	112.28%	87.17	12.83%
s.6	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	117,26%	86.93	13.07%
s.7	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunanKolaboratif di semua levelPemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	106.79%	93.43	6.57%
MISI 5 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah					

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KEUANGAN	EFISIENSI
T.5	Tujuan : Memperkuat pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	98,76%	89.23	9,65%
s.8	Meningkatnya nilai nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	117.78%	99.84	0.16%
s.9	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	97.65%	61.68	36.84%
		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	121.60%	88.26	11.74%
		Prevalensi Stunting	100%	93.82	6.18%
	rata-rata		105.26	86.50	13,50%

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 batas efisiensi adalah -20% sampai dengan 20%. . Berikut rumus perhitungan efisiensi :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAK_i : Pagu anggaran keluaran i

RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i

CK_i : Capaian keluaran i

dengan melihat tabel diatas dari 6 indikator tujuan hampir seluruhnya efisien dalam penggunaan sumberdaya kecuali indeks daya saing daerah. Untuk 13 indikator sasaran terdapat 2 indikator yang kurang efisien dan 11 lainnya efisien dalam penggunaan sumber daya. 2 indikator yang kurang efisien tersebut dikarenakan adanya penyerapan anggaran yang kurang maksimal.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Gresik menunjukkan hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 105,26% dengan kategori “SANGAT TINGGI” dan rata-rata capaian anggaran sebesar 86.50% dengan kategori “Tinggi” dan efisiensi sebesar 13,5% Dapat disimpulkan Pemerintah Kabupaten Gresik efisien dalam penggunaan sumber daya

8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENUNJANG
	MISI 1 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah		
T.1	Tujuan 1 : Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	• PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN • PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) • PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI • PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR • PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM • PROGRAM PENANAMAN MODAL
s.1	Sasaran : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	• Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah • Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral • Program Aplikasi Informatika • Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif • Program Perekonomian Dan Pembangunan • PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA • PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
		Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	• Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian • Program Penyuluhan Pertanian • Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat • PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN • PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN • PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER • PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENUNJANG
	MISI 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik		
T.2	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor etenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	• PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL • PROGRAM REHABILITASI SOSIAL • PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL • PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN • PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT • PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA •
		Tingkat Pengangguran Terbuka	• PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA • PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA • PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA • PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL • PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA • PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR • PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
s.2	Sasaran : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	• Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Pelayanan Penanaman Modal • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	• Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENUNJANG
	MISI 3 : Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota		
T.3	Tujuan : Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	• PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) • PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM • PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN • PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM • PROGRAM PENANAMAN MODAL • PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
s.3	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	• Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan • Program Penyelenggaraan Jalan • Program Penataan Desa • Program Kawasan Permukiman • Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
s.4	Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	• Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B) • Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) • Program Pengelolaan Persampahan • Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
s.5	Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua gol	Indeks Pembangunan Gender	• Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan • Program Perlindungan Perempuan • Program Peningkatan Kualitas Keluarga

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENUNJANG
	Misi 4 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif		
T.4	Tujuan : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	• PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK • PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA • PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL • PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK • PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN • PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP • PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
s.6	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	• Program Aplikasi Informatika • Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah • Program Informasi dan Komunikasi Publik
s.7	Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunanKolaboratif di semua levelPemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	• Program Penelitian dan Pengembangan Daerah • PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH • PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK • PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA • PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

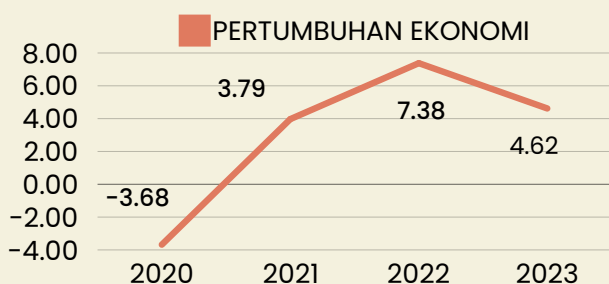
NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENUNJANG
MISI 5 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah			
T.5	Tujuan : Memperkuat pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	• PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN • PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT • PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN • PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
s.8	Meningkatnya nilai nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	• Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan • Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum • Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat • PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
s.9	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan • PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM • PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN • PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP • PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN • PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) • PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
		Prevalensi Stunting	• PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT • PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) • PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK • PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN



TUJUAN I : MENGUATKAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN GRESIK BARU YANG INKLUSIF

PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik Tumbuh 4.62% Pada Tahun 2023, Jika dibandingkan dengan target 2023 sebesar 3-4 maka capaian tahun 2023 sebesar 115,50% dengan kategori SANGAT TINGGI.



Jika dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik lebih rendah 6%.

2023

Capaian 115.50%

Realisasi anggaran 85.5%



Pagu Anggaran
Rp. 8.418.812.928,00



Realisasi Anggaran
Rp. 7.198.846.939,28



Efisiensi
14.49%

Prov. Jawa Timur 4,95

Kab. Gresik 4,62

- 6%

FAKTOR KEBERHASILAN

Faktor penunjang keberhasilan pencapaian tujuan ini ditunjang oleh beberapa kegiatan pemerintah Kabupaten Gresik antara lain :

- meningkatnya investasi yang masuk di kab. gresik
- adanya kawasan Ekonomi Khusus di Kabupaten Gresik



UPAYA YANG DILAKUKAN

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mencapai tujuan ini antara lain :

- Promosi Investasi
- Penetapan Perbup 80 Th 2023 Insentif dan kemudahan penanaman modal
- Pengembangan inovasi layanan perijinan berusaha



PROGRAM PENUNJANG

Program yang menunjang dalam pencapaian tujuan "Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif" antara lain :

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)
- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
- Program Pengembangan Ekspor
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Program Promosi Penanaman Modal



SASARAN : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah

S.1 Indeks Williamson

Tahun 2023 Indeks Williamson untuk Kabupaten Gresik sebesar 0,35. Hal ini berarti bahwa ketidakmerataan di Kabupaten Gresik tergolong tinggi. Dan apabila dibandingkan dengan target 2023 sebesar 0,3-0,4 sehingga capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100% dengan kategori "Sangat Tinggi".

Dengan penyerapan anggaran sebesar 87.95% dan capaian kinerja sebesar 100%, Kabupaten Gresik telah mencapai efisiensi dalam penggunaan Sumber Daya sebesar 12,05%



FAKTOR PENGHAMBAT

Faktor penghambat keberhasilan pencapaian indikator ini ditengarai terjadi karena konsentrasi kegiatan ekonomi dan alokasi investasi yang tidak merata hanya terbatas di wilayah perkotaan yang berbatasan dengan Surabaya dan Sidoarjo



UPAYA YANG DILAKUKAN

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mencapai indikator ini antara lain :

- pembangunan infrastruktur merata di seluruh wilayah kabupaten Gresik
- Pengembangan Bumdes



PROGRAM PENUNJANG

Program yang menunjang dalam pencapaian sasaran "Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah" antara lain :

- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- Program Aplikasi Informatika
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
- Program Perekonomian Dan Pembangunan
- Program Administrasi Pemerintahan Desa
- Program Pemasaran Pariwisata



SASARAN : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah

S.2 Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian

Berdasarkan publikasi BPS termutakhir, Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian Kabupaten Gresik sebesar 3.2 jika dibandingkan dengan target sebesar 4-5 maka capaian kinerja tahun 2023 sebesar 80%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian Tahun 2023 mengalami kenaikan 0.03 poin.

Selain itu dengan penyerapan anggaran sebesar 70,93% dan capaian kinerja sebesar 80% maka dapat disimpulkan Pemerintah Kabupaten Gresik efisien dalam penggunaan sumber daya dengan tingkat efisiensi sebesar 11,33%.



Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Gresik lebih tinggi 78%.

FAKTOR KEBERHASILAN

Faktor penunjang keberhasilan pencapaian sasaran ini ditunjang oleh beberapa kegiatan pemerintah Kabupaten Gresik antara lain :

- Diselenggarakannya Kontes Bonsai tingkat nasional
- Expo produk unggulan Pertanian Bekerjasama dengan Petrokimia Gresik
- Jumlah produksi tahun 2023 bidang pertanian, kehutanan dan perikanan meningkat



FAKTOR PENGHAMBAT

Faktor penghambat keberhasilan pencapaian indikator ini ditengarai terjadi karena :

- adanya dampak perubahan iklim berupa banjir dan kekeringan panjang mempengaruhi pendapatan sektor pertanian
- alih fungsi lahan ke sektor non pertanian

PROGRAM PENUNJANG

UProgram yang menunjang dalam pencapaian tujuan "Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif" antara lain :

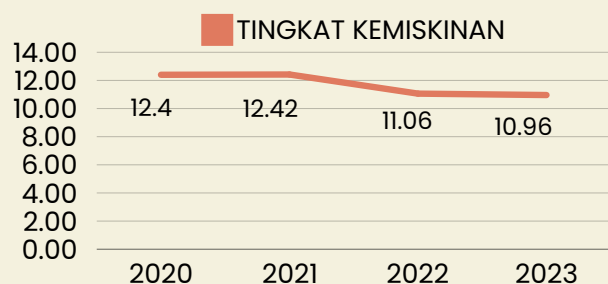
- Program penataan bangunan dan lingkungannya
- Program kawasan permukiman
- Program penanganan kerawanan pangan
- Program pengelolaan sumber daya ekonomi
- Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
- Program peningkatan kerjasama desa dst.



TUJUAN II : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI PENGUATAN SEKTOR KETENAGAKERJAAN

T1. TINGKAT KEMISKINAN

Tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2023 sebesar 10.96 jika dibandingkan dengan target 10-10.7 maka capaian tahun 2023 sebesar 97.63% dengan kategori "SANGAT TINGGI". sehingga dapat disimpulkan penduduk miskin kabupaten gresik Periode 2023. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 0.10.



Selain itu dengan penyerapan anggaran sebesar 85,48% dan capaian kinerja sebesar 97,63% maka dapat disimpulkan Pemerintah Kabupaten Gresik efisien dalam penggunaan sumber daya dengan tingkat efisiensi sebesar 12,44%.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik lebih tinggi 6%.



FAKTOR KEBERHASILAN

Faktor penunjang keberhasilan pencapaian sasaran ini ditunjang oleh beberapa kegiatan pemerintah Kabupaten Gresik antara lain :

- Diselenggarakannya Kontes Bonsai tingkat nasional
- Expo produk unggulan Pertanian Bekerjasama dengan Petrokimia Gresik

UPAYA YANG DILAKUKAN

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mencapai indikator ini antara lain :

- pemanfaatan Intelligent Operational platform (IOP) untuk sinergitas antar opd pengampu program

pengentasan kemiskinan agar tidak tumpang tindih

- fokus pada penanganan kemiskinan di pulau bawean

PROGRAM PENUNJANG

Program yang menunjang dalam pencapaian tujuan "Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Melalui Penguatan Sektor Ketenagakerjaan" antara lain :

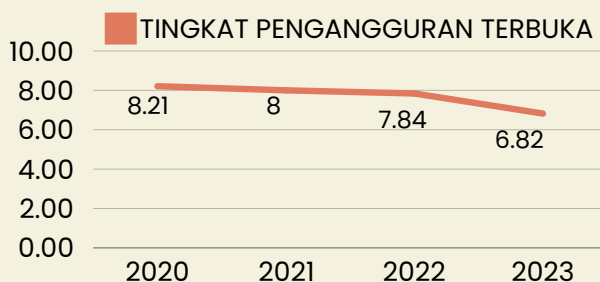
- Program Pemberdayaan Sosial
- Program Rehabilitasi Sosial
- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja



TUJUAN II : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI PENGUATAN SEKTOR KETENAGAKERJAAN

T2. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Tingkat pengangguran Terbuka pada Kabupaten Gresik berangsur-angsur mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2023 di targetkan sebesar 6.8 dan terealisasi sebesar 6.82 sehingga capaian kinerja untuk indikator tersebut sebesar 100.29%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka menurun sebesar 13%.



2023

Capaian 100,29%

Realisasi anggaran 86,54%



Pagu Anggaran
Rp. 4,925,520,185,00



Realisasi Anggaran
Rp. 4.262.354.449,00



Efisiensi
13,46%

Prov. Jawa Timur 4,88

Kab. Gresik 6,82

28%

Selain itu dengan penyerapan anggaran sebesar 86,54% dan capaian kinerja sebesar 100,29% maka dapat disimpulkan Pemerintah Kabupaten Gresik efisien dalam penggunaan sumber daya dengan tingkat efisiensi sebesar 13,46%.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik lebih rendah 23%.



FAKTOR KEBERHASILAN

Faktor penunjang keberhasilan pencapaian sasaran ini ditunjang oleh beberapa kegiatan pemerintah Kabupaten Gresik antara lain :

- Penerapan PERDA 7 Tahun 2022 tentang kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal minimal 60%
- adanya kawasan ekonomi khusus (KEK)
- monitoring dan evaluasi kepatuhan terhadap PERDA 7 Th 2022

UPAYA YANG DILAKUKAN

paya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mencapai indikator ini antara lain :

- Pembangunan aplikasi AKI untuk pelaporan mandiri perusahaan terkait penempatan tenaga kerja dan fasilitasi pencari kerja
- penyelenggaraan job fair

PROGRAM PENUNJANG

Program yang menunjang dalam pencapaian tujuan "Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif" antara lain :

- Program Perencanaan Tenaga Kerja
- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Penempatan Tenaga Kerja
- Program Hubungan Industrial
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- Program Pengembangan Ekspor
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)



Penghargaan Pembina K3 Terbaik Tingkat Provinsi Jatim

SASARAN : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan

S.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gresik tahun 2023 adalah 70,12%. Berarti ada 70,12% penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Gresik. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 68.30%, maka terdapat peningkatan sebesar 1,82%.

Selain itu dengan penyerapan anggaran sebesar 85.5% dan capaian kinerja sebesar 100,17% maka dapat disimpulkan Pemerintah



Kabupaten Gresik efisien dalam penggunaan sumber daya dengan tingkat efisiensi sebesar 13,46%.

Apabila dibandingkan dengan Nasional, tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Gresik lebih tinggi 0,9%.

FAKTOR KEBERHASILAN

Faktor penunjang keberhasilan pencapaian sasaran ini ditunjang oleh beberapa kegiatan pemerintah Kabupaten Gresik antara lain Meningkatnya investasi di kabupaten gresik

UPAYA YANG DILAKUKAN

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mencapai indikator ini antara lain : pelatihan keterampilan K3 umum, las, kelistrikan dll



PROGRAM PENUNJANG

Program yang menunjang dalam pencapaian tujuan "Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif" antara lain :

- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Penempatan Tenaga Kerja
- Program Pelayanan Penanaman Modal
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

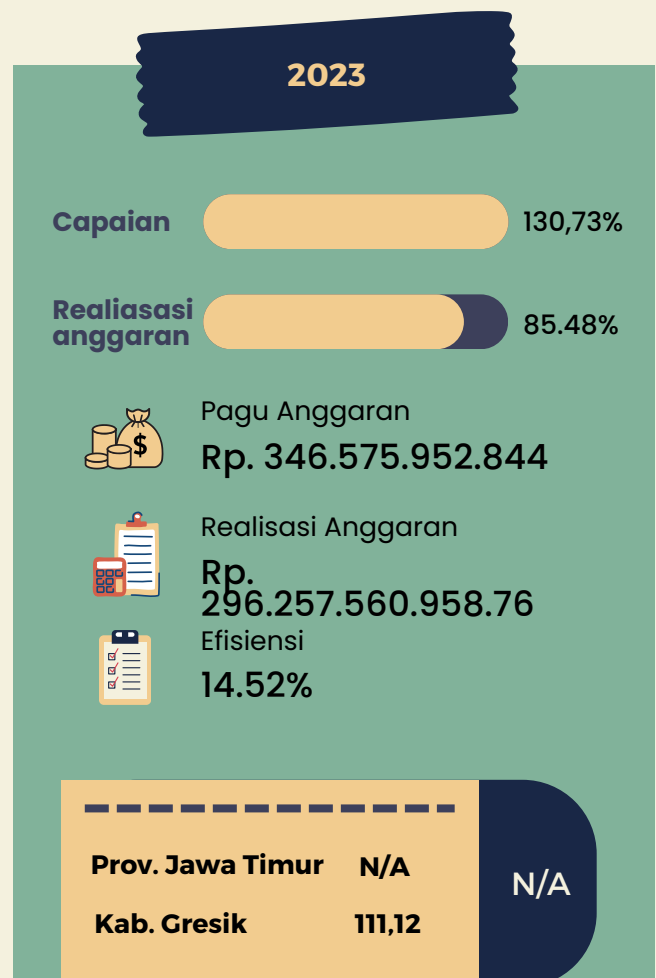


Bansos PKH Inklusif dan Bantuan El Nino

SASARAN : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan

S.2 Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin

Cakupan perlindungan sosial warga miskin meliputi jumlah penerima bantuan asistensi sosial berbasis keluarga dan siklus hidup yang komprehensif dalam mewujudkan kemandirian yang mensejahterakan dibagi jumlah data terpadu kesejahteraan sosial sehingga Cakupan perlindungan sosial warga miskin sebesar 111.12% jika dibandingkan dengan target >85% maka capaian tahun 2023 sebesar 130.73% meningkat 20.46% dibandingkan dengan cakupan tahun 2022.



Selain itu dengan penyerapan anggaran sebesar 85,48% dan capaian kinerja sebesar 130,73% maka dapat disimpulkan Pemerintah Kabupaten Gresik efisien dalam penggunaan sumber daya dengan tingkat efisiensi sebesar 14,52%.



FAKTOR KEBERHASILAN

Faktor penunjang keberhasilan pencapaian sasaran ini ditunjang oleh beberapa kegiatan pemerintah Kabupaten Gresik antara lain :

- PKH Inklusi
- program jaminan kesehatan (UHC)
- Kejar paket tuntaskan putus sekolah (JAKETKU)
- beasiswa mahasiswa miskin

UPAYA YANG DILAKUKAN

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mencapai indikator ini antara lain :

- perluasan sasaran penerima PKH inklusi
- Percepatan KI P melalui integrasi dengan data DTKS
- Pemutakhiran data berkala penerima UHC

PROGRAM PENUNJANG

Program yang menunjang dalam pencapaian sasaran "Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan" antara lain :

- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan



TALK SHOW KESEHATAN UNTUK PENINGKATAN PILAR SDM

Tujuan : Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan

T3 INDEKS DAYA SAING DAERAH

Indeks Daya saing daerah tahun 2023 sebesar 3.38 jika di bandingkan dengan target 3.21 maka capaian tahun 2023 sebesar 105.30% menurun 0.04 dibandingkan dengan cakupan tahun 2022. jika dibandingkan dengan Nasional 3.44 Kabupaten gresik lebih rendah 0.06.

Faktor Penunjang Keberhasilan IDSD antara lain :

- inflasi terjaga
- rendahnya kemampuan UMKM bersaing dengan kelompok usaha sedang dan besar
- kurangnya kesempatan bagi produsen untuk memasarkan produknya

2023

Capaian 105.30%

Realisasi anggaran 66.85%



Pagu Anggaran
Rp. 106.403.192.090,00



Realisasi Anggaran
Rp. 71,129,997,976.50



Efisiensi
33.15%

Nasional 3.44

Kab. Gresik 3.38

**-
0.06
%**



Bupati Gresik Tinjau Sejumlah Proyek Infrastruktur di Bawean

SASARAN : Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing

S3. INDEKS KEPUASAN INFRASTRUKTUR

Indeks kepuasan infrastruktur tahun 2023 sebesar 89.62 jika dibandingkan dengan target 67 maka capaian tahun 2023 sebesar 133.76% dengan kategori SANGAT TINGGI meningkat 2.23 dibandingkan dengan tahun 2022. sebesar 87.39.

Program Penunjang Keberhasilan Indeks kepuasan infrastruktur antara lain :

- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Program Penyelenggaraan Jalan
- Program Penataan Desa
- Program Kawasan Permukiman
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)





KIRAB ADIPURA KABUPATEN GRESIK

SASARAN : Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan

S4. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2023 sebesar 58.5 jika dibandingkan dengan target 60.4 maka capaian tahun 2023 sebesar 96.81% dengan kategori **SANGAT TINGGI** meningkat 0.35 dibandingkan dengan tahun 2022. sebesar 58.15

Upaya Penunjang Keberhasilan Indeks kualitas lingkungan hidup antara lain :

- pengawasan terkait pengelolaan lingkungan oleh perusahaan
- pelaksanaan program kampung iklim
- adanya inovasi alat pengolah sampah (RDF)
- normalisasi kali lamong





MUSRENBANG PEREMPUAN GRESIK KE -7

SASARAN : Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan

S5. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

Indeks Pembangunan Gender tahun 2023 Belum rilis, sehingga disajikan data tahun 2022 sebesar 90.78 jika di bandingkan dengan target 91.86 maka capaian tahun 2023 sebesar 98.82% dengan kategori SANGAT TINGGI Jika dibandingkan dengan provinsi jawa Timur sebesar 92.08. kabupaten gresik lebih rendah 1.3

Upaya Penunjang Keberhasilan Indeks pembangunan gender antara lain :

- keterlibatan perempuan dalam publik sektor
- pendapatan dan pendidikan perempuan dan laki-laki seimbang
- angka harapan hidup saat lahir perempuan dan laki-laki hampir sama

2023

Capaian  98.82%

Realisasi anggaran  91.98%



Pagu Anggaran
Rp. 40.064.781.562



Realisasi Anggaran
Rp. 36.817.107.506



Efisiensi
7.01%

Prov JATIM 92.08

Kab. Gresik 90.78

1.3%



Pemkab Gresik Instansi Terbaik Pemanfaatan PDN 2023

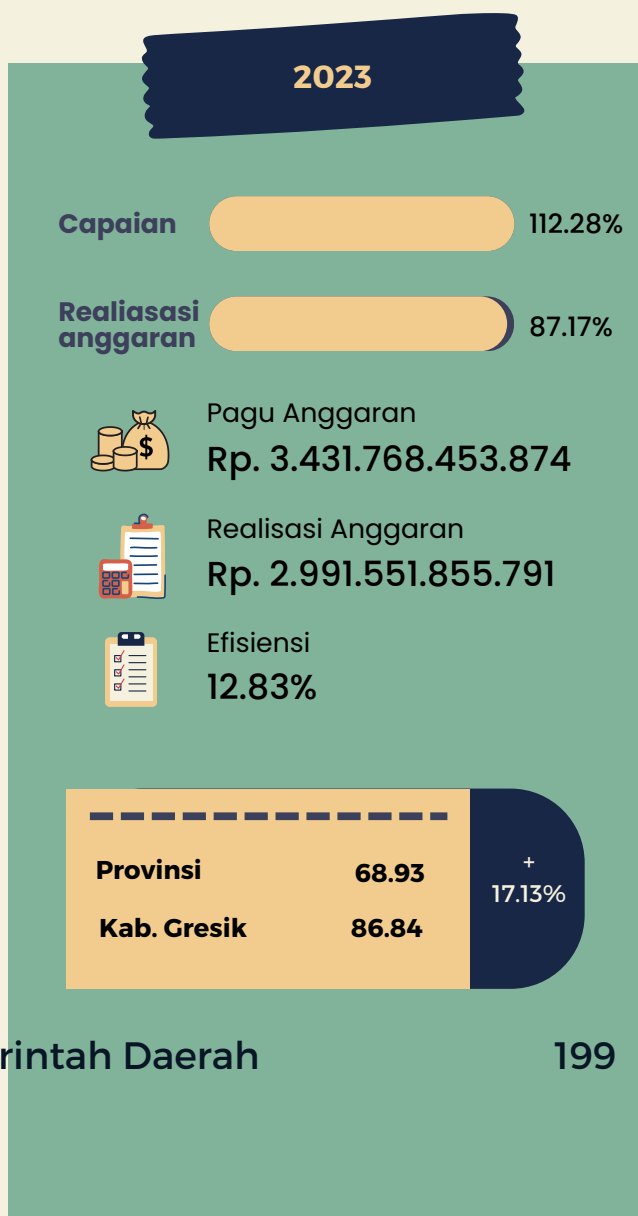
TUJUAN : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance

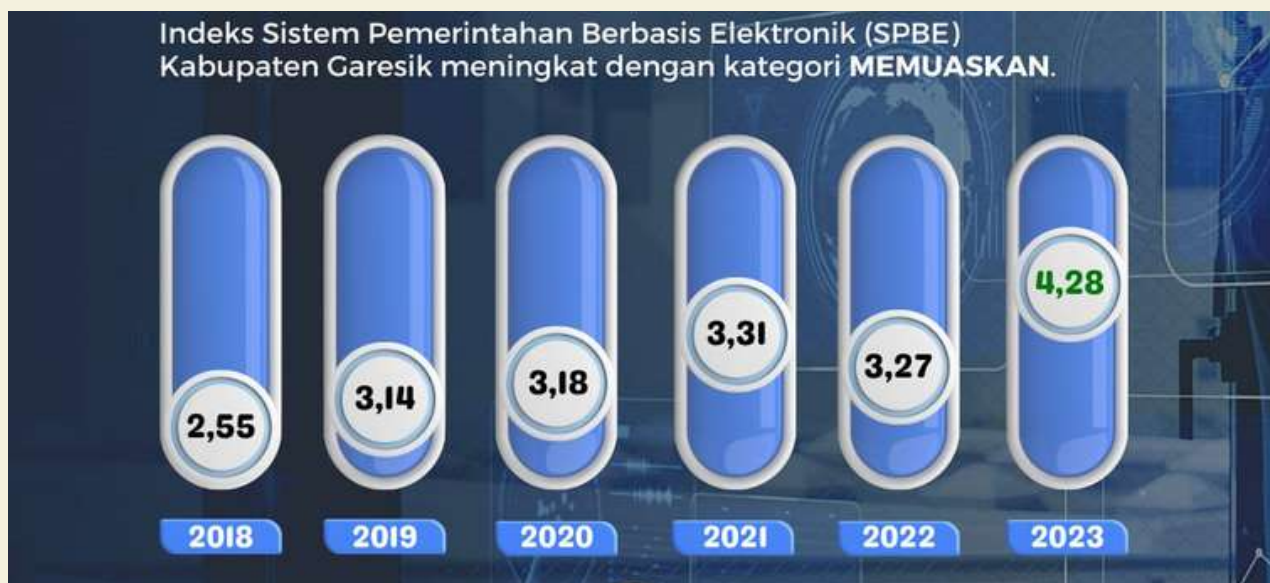
T4. INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 sebesar 86.84 jika dibandingkan dengan target 77.34 maka capaian tahun 2023 sebesar 112.28% dengan kategori SANGAT TINGGI Jika dibandingkan dengan provinsi sebesar 68.93, kabupaten Gresik lebih tinggi 17.13

Upaya Penunjang Keberhasilan Indeks Reformasi Birokrasi antara lain :

- adanya perubahan roadmap RB untuk mewujudkan RB Berdampak
- komitmen bersama kepala PD melaksanakan renaksi RB





INDEKS SPBE PEMKAB GRESIK DARI TAHUN KE TAHUN

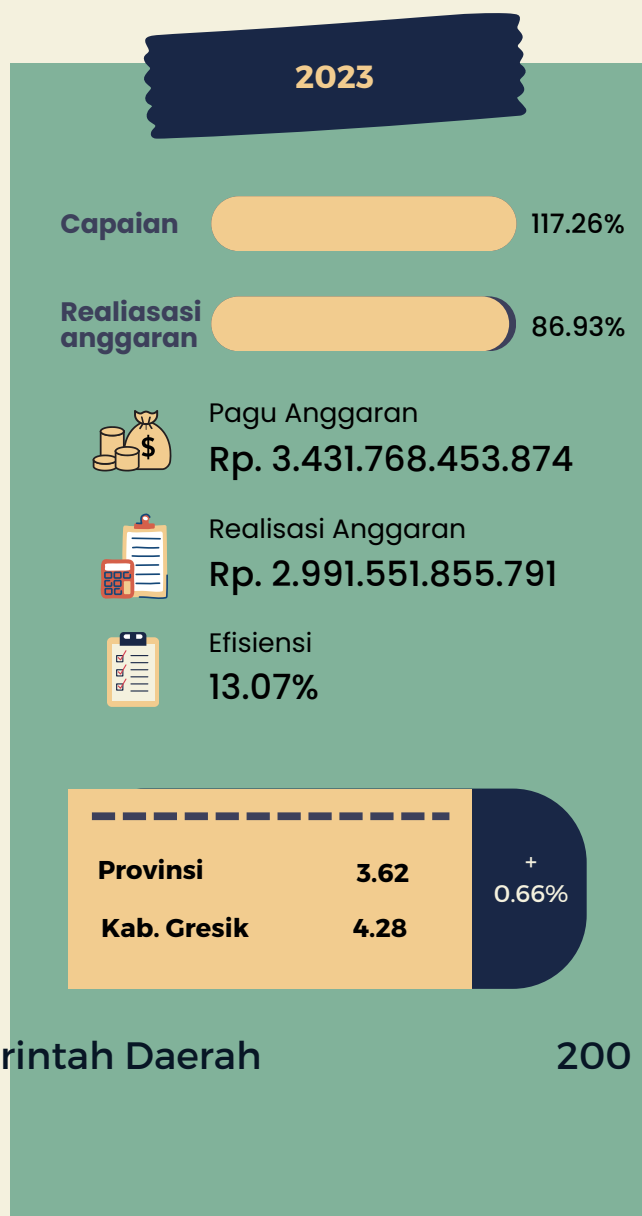
SASARAN : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI

S6. INDEKS SPBE

Indeks SPBE tahun 2023 sebesar 4.28 kategori memuaskan jika dibandingkan dengan target 3.65 maka capaian tahun 2023 sebesar 117.26% dengan kategori SANGAT TINGGI. Jika dibandingkan dengan provinsi sebesar 3.62 kabupaten Gresik lebih tinggi 0.66

Upaya Penunjang Keberhasilan Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik antara lain :

- komitmen pimpinan
- komitmen kelompok kerja tim Koordinasi SPBE dalam menjalankan program kerjanya
- monev berkala pelaksanaan program kerja tiap triwulan





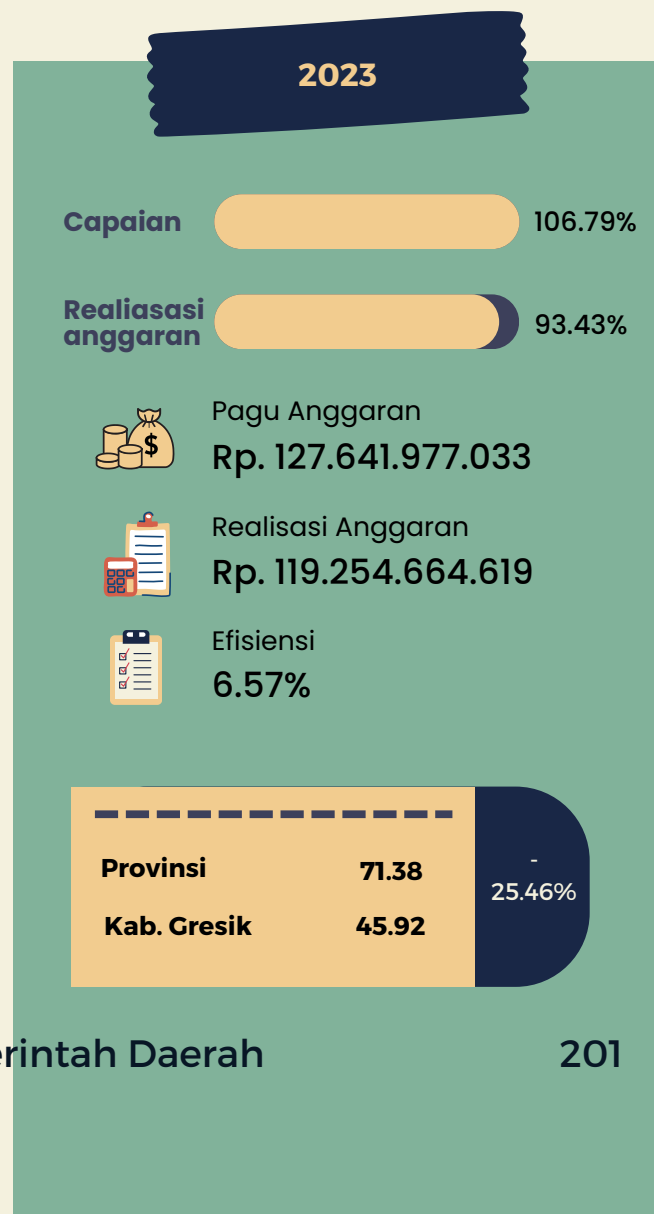
Centing Seni Inovasi Puskesmas Duduksampeyan Raih Penghargaan Top 30 Kovablik Provinsi Jatim

SASARAN : Memperkuat inovasi Daerah berlandaskan pembangunanKolaboratif di semua levelPemerintahan

S7. INDEKS INOVASI DAERAH

Indeks Inovasi Daerah Kab. Gresik tahun 2023 sebesar 45.92 kategori inovatif jika di bandingkan dengan target 43 maka capaian tahun 2023 sebesar 106.79% dengan kategori **SANGAT TINGGI** Jika dibandingkan dengan provinsi sebesar 71.38 kabupaten gresik lebih rendah 25.46

Faktor penyebab kegagalan pencapaian indeks inovasi daerah adalah inovasi yang dihasilkan tidak memenuhi standart yang ditetapkan oleh kementrian dalam negri sehingga perlu dilakukan pembinaan terhadap agen perubahan pemerintah kabupaten gresik





Bupati Gresik Pimpin Wisuda 74 Peserta Didik Program Jaketku
(kejar paket tuntaskan putus sekolah)

TUJUAN : MENGUATKAN PEMBANGUNAN MANUSIA GRESIK BARU YANG BERKUALITAS & BERKEADILAN BERLANDASKAN AKHLAKUL KARIMAH

T5. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia Kab. Gresik tahun 2023 sebesar 78.44 jika di bandingkan dengan target 79.42 maka capaian tahun 2023 sebesar 98.76% dengan kategori SANGAT TINGGI Jika dibandingkan dengan provinsi sebesar 74.65 kabupaten gresik lebih tinggi 3.79

Faktor penyebab keberhasilan indeks pembangunan manusia di kab. gresik adalah :

- meningkatnya investasi
- bantuan biaya pendidikan dikemas dalam program JAKETKU
- meningkatnya kesadaran masyarakat akan hidup sehat
- adanya jaminan biaya kesehatan dari pemerintah

2023

Capaian 98.76%

Realisasi anggaran 89.23%



Pagu Anggaran
Rp.54.056.351.620,00



Realisasi Anggaran
Rp. 48.236.619.806,93



Efisiensi
9.65%

Provinsi 74.65

Kab. Gresik 78.44

+
3.79%



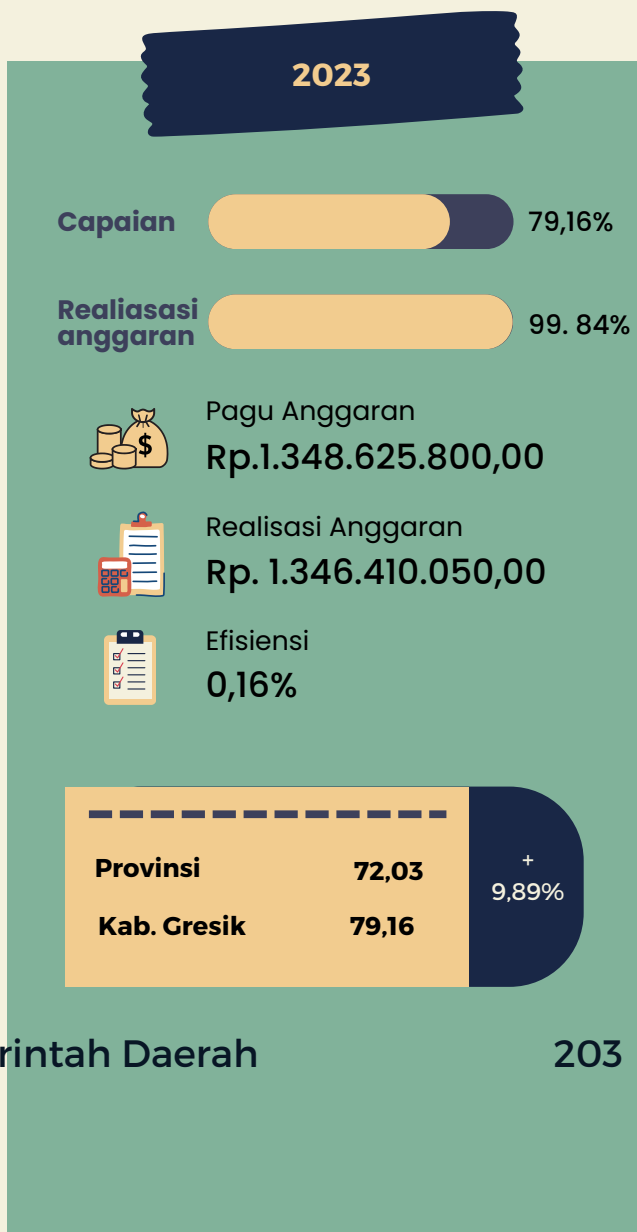
Kirab Santri dalam rangka Peringatan Hari Santri Nasional 2023

SASARAN : MENINGKATNYA NILAI NILAI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN DAN TOLERANSI DALAM MASYARAKAT

S8. INDEKS KESALEHAN SOSIAL

Indeks Kesalehan Sosial Kab. Gresik tahun 2023 sebesar 79,16 jika dibandingkan dengan target 79,16 maka capaian tahun 2023 sebesar 100% dengan kategori **SANGAT TINGGI**. Jika dibandingkan dengan provinsi sebesar 72,03 kabupaten Gresik lebih tinggi 9,89%.

Faktor penyebab keberhasilan indeks Kesalehan Sosial di kab. Gresik adalah banyaknya pondok pesantren yang tersebar diseluruh wilayah baik perdesaan maupun perkotaan seta adanya kawasan religius mengakibatkan warga Gresik memiliki sikap peduli, sikap memberi dan menghargai perbedaan.



UPAYA YANG DILAKUKAN

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mencapai indikator ini antara lain :

- mengkampanyekan sikap toleransi antar umat beragama dan menggalkan gerakan penghijauan sebagai upaya meningkatkan nilai keterlibatan dalam restorasi
- meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya nilai kesalehan sosial, terutama di daerah masyarakat urban



PROGRAM PENUNJANG

Program yang menunjang dalam pencapaian sasaran "Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan" antara lain :

- Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
- Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
- Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya



Pemkab Gresik Gelontorkan anggaran untuk Akselerasi Pendidikan

SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN & KESEHATAN

S9. INDEKS PENDIDIKAN

Indeks Pendidikan Kab. Gresik tahun 2023 belum rilis tetapi jika mengacu tahun 2022 sebesar 78.9 jika dibandingkan dengan target 2023 sebesar 80.8 maka capaian tahun 2023 sebesar 97.65% dengan kategori SANGAT TINGGI. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 73.41 maka mengalami peningkatan 5.49. Faktor penyebab keberhasilan indeks Pendidikan di kab. gresik adalah

- meningkatnya kemampuan numerasi siswa
- pemanfaatan TI untuk memperbaiki mekanisme dan kualitas mutu pembelajaran
- adanya pembiayaan dari APBD untuk biaya pendidikan
- pembangunan fasilitas pendidikan

2023

Capaian 97.65%

Realisasi anggaran 61.68%



Pagu Anggaran
Rp. 526,302,100.00



Realisasi Anggaran
Rp. 324,598,690.00



Efisiensi
36.84%

Provinsi

64

Kab. Gresik

78.9

+
14.9%



Pemkab Gresik Gelontorkan anggaran untuk Akselerasi Pendidikan

SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN & KESEHATAN

S9. INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASY

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat tahun 2023 sebesar 82.2 jika di bandingkan dengan target 2023 sebesar 67.6 maka capaian tahun 2023 sebesar 121.60% dengan kategori **SANGAT TINGGI**. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 65.94 maka mengalami peningkatan 16.26

Faktor penyebab keberhasilan indeks PKM di kab. gresik adalah

- meningkatnya pelayanan kesehatan balita, reproduksi dan kinerja pelayanan kesehatan didukung oleh perilaku kesehatan masyarakat, akses sanitasi yang baik dan kecukupan air minum

2023

Capaian 121.60%

Realisasi anggaran 88.26%



Pagu Anggaran

Rp. 42,962,769,720.00



Realisasi Anggaran

Rp. 37,916,858,540.00



Efisiensi

11.74%

Provinsi

64

Kab. Gresik

78.9

+ 14.9%



REMBUK STUNTING

(penandatanganan lintas sektor percepatan penurunan stunting)

SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN & KESEHATAN

S9. Pravelansi Stunting

IPravelansi Stunting tahun 2023 sebesar 9.12 jika di bandingkan dengan target 2023 sebesar 10-9 maka capaian tahun 2023 sebesar 100% dengan kategori SANGAT TINGGI. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 10.7 maka mengalami peningkatan 1.58

Faktor penyebab keberhasilan turunnya balita stunting di kab. gresik adalah

- disediakan anggaran merata mulai dari dinas kesehatan, KBPP, Desa dan instansi terkait
- adanya dukungan csr dari perusahaan sekitar
- pendampingan yang intensif dari kader dan tenaga kesehatan dan PKK





KESIMPULAN

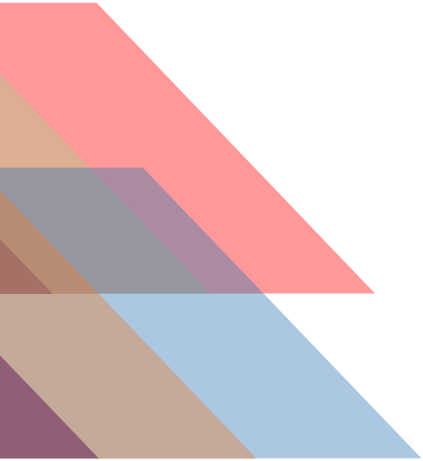
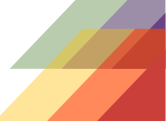
Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Kabupaten Gresik selama Tahun 2023 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi Kabupaten Gresik 2021-2026 dapat dilihat hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 105.26% dengan kategori “SANGAT TINGGI” dan rata-rata capaian anggaran sebesar 86.50% dengan kategori “TINGGI” dan efisiensi sebesar 13.50%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2023 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Pemerintah Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama Tahun 2023 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang.

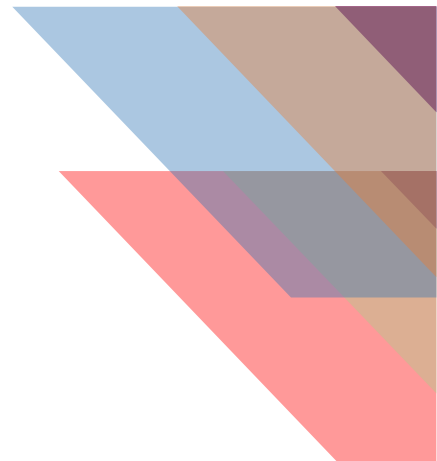
SARAN

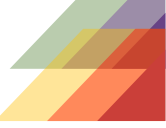
Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

- untuk percepatan pengentasan kemiskinan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang berdampak dan tidak berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan.
- untuk tingkat pengangguran terbuka perlunya dilakukan penambahan alokasi anggaran untuk pelatihan terhadap pencari kerja dan monitoring terhadap kepatuhan terhadap PERDA 7 Th 2022 tentang penggunaan tenaga kerja lokal minimal 60%
- untuk indeks kualitas lingkungan hidup perlu dilakukan adanya pengawasan secara berkala kepada pelaku usaha terkait pengelolaan lingkungan
- Perlu dilakukan perluasan ruang terbuka hijau dan peningkatan penanaman pohon atau vegetasi.



CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN





BAB III

CAPAIAN KINERJA

TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Gresik tidak mendapatkan Program dan Kegiatan yang merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk Tugas Pembantuan. Adapun Program dan Kegiatan yang didapat dari Pemerintah Pusat berupa : Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan Program dan Kegiatan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Sedangkan untuk Penugasan, selama tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Gresik tidak memberikan tugas pembantuan secara eksplisit kepada Desa / Kelurahan, yang diberikan dalam bentuk bantuan stimulan Pembangunan Desa / Kelurahan, baik melalui Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Bantuan ini dimaksudkan untuk mempercepat kemajuan pembangunan Desa / Kelurahan. Partisipasi aktif masyarakat Desa / Kelurahan dalam proses pembangunan terus digalang melalui kegiatan Musrenbang.

Tugas pembantuan yang diberikan pemerintahan pusat kepada pemerintah Kabupaten Gresik pada tahun 2023 dengan rincian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

A. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Pada Tahun 2023 Kabupaten Gresik tidak memberikan tugas pembantuan terhadap tingkatan pemerintahan di bawahnya.

B. Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya.

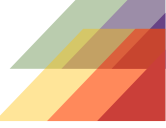
Seiring dengan dinamisnya pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah daerah melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga

sebagaimana dijamin dalam Pasal 366 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa kerjasama dengan pihak ketiga meliputi:

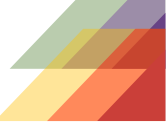
1. Kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik;
2. Kerjasama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
3. Kerjasama investasi; dan
4. Kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan tugas pembantuan urusan pemerintahan sebagaimana perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dengan pihak ketiga sebagaimana berikut:

- | | | | |
|----|------------------------------------|---|---|
| 01 | Kegiatan | : | Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kab. Gresik dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga tentang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Airlangga |
| | Nomor Perjanjian | : | Nomor: 130 /02 / 437.11/2023 |
| | Kerjasama | : | Nomor: 146/UN3.14/KS/2023 |
| | Perangkat Daerah yang melaksanakan | : | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga |
| | Lokasi | : | Kabupaten Gresik |
| 02 | Kegiatan | : | Kesepakatan Bersama antara Pemkab Gresik dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Gresik tentang Pemanfaatan Layanan Jasa & Potensi masing masing Pihak |
| | Pihak Ketiga yang bekerjasama | : | PT. POS Indonesia (Persero) Kantor Cabang Gresik |
| | Nomor Perjanjian | : | Nomor: 130/03/437.11/KSB/2023 |
| | Kerjasama | : | Nomor: 252/Penjualan/PAKP/1/0822 |



	Perangkat Daerah yang melaksanakan	:	PT. POS Indonesia (Persero) Kantor Cabang Gresik
03	Kegiatan	:	Kesepakatan Bersama antara Pemkab Gresik dengan SD Muhammadiyah Manyar Gresik tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan serta Pendampingan Program Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)
	Pihak Ketiga yang bekerjasama	:	SD Muhammadiyah Manyar Gresik
	Nomor Perjanjian Kerjasama	:	Nomor: 130/04/437.11/KSB/2023 Nomor: 150/spk/iv.4/f/2023
	Perangkat Daerah yang melaksanakan	:	Dinas Lingkungan Hidup
	Lokasi	:	SD Muhammadiyah Manyar Gresik
04	Kegiatan	:	Kesepakatan Bersama antara Pemkot Surabaya dengan Pemkab Gresik tentang Kerja Sama Jaringan Lintas Perkotaan
	Lokasi	:	Kabupaten Gresik





- Pihak yang bekerja
Kerjasama dalam Daerah
yang berbatasan : Pemerintah Kota Surabaya
- Nomor Perjanjian : Nomor: 100.3.7.1/5971/436.18/2023
Kerjasama : Nomor: 130/05/437.11/KSB/2023
- Perangkat Daerah yang
melaksanakan : Pemerintah Kabupaten Gresik dan Kota
Surabaya
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- 05 Kegiatan : Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah
Kab. Gresik dengan PT. Dovechem Maspion
Terminal tentang Pemanfaatan Sebagian
Tanah Hak Pengelollan Pemerintah
Kabupaten Gresik oleh Perseroan Terbatas
- Pihak Ketiga yang
bekerjasama : PT. Dovechem Maspion Terminal
- Nomor Perjanjian : Nomor: 130/06/437.11/2023
Kerjasama : Nomor: 001/DIR-DMT/MIE/III-23
- Perangkat Daerah yang
melaksanakan : BPPKAD
- Lokasi : Kabupaten Gresik
06. Kegiatan : Perjanjian Antara Pemerintah
Kabupaten Gresik Dengan PT. Parna
Maspion Sejahtera Tentang Pemanfaatan
sebagian Tanah Hak Pengelolaan
Pemerintah Kabupaten Gresik Oleh
Perseroan Terbatas Parna Maspion
Sejahtera
- Pihak Ketiga yang
bekerjasama : PT. Parna Maspion Sejahtera
- Nomor Perjanjian : Nomor: 130/07/437.11/2023
Kerjasama : Nomor: 044/PMS-DIR/OM/III/2023
- Perangkat Daerah yang
melaksanakan : BPPKAD
- Lokasi : Kabupaten Gresik

- 06 Kegiatan : Perjanjian Kerja sama antara Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan Pemerintahan Kab. Gresik tentang penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis bagi Peserta Penerimaan Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya
- Nomor Perjanjian : Nomor: 130/08/437.11/PKS/2023
- Kerjasama : Nomor: 1546.5/UN10.F08/KS/2023
- Perangkat Daerah yang melaksanakan : DINAS KESEHATAN
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- 07 Kegiatan : Perjanjian Kegiatan antara Pemerintahan Kab. Gresik dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis , Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : DINAS KESEHATAN
- Nomor Perjanjian : Nomor: 130/09/437.11/PKS/2023
- Kerjasama : Nomor: 229/UN.3.1.1/KS/2023
- Perangkat Daerah yang melaksanakan : DINAS KESEHATAN
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- 08 Kegiatan : Perjanjian Kerja sama antara Pemerintahan Kota Mojokerto dengan Pemerintahan Kab. Gresik tentang Replikasi Inovasi



- Pihak kedua yang bekerjasama : Pemerintah Kota Mojokerto
- Nomor Perjanjian : Nomor: 000.9/5412/417.601.5/2023
- Kerjasama : Nomor : 180/10/437.12/PKS/2023
- Perangkat Daerah yang melaksanakan : BAPELITBANGDA
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- 09 Kegiatan : Kesepakatan Bersama antara Pemkab Gresik dengan Perumda BPR Bank Gresik Tentang Pemanfaatan Produk Dan Jasa Perbankan
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : BPR Bank Gresik
- Nomor Perjanjian : Nomor: 130/11/437.11/KSB/20232
- Kerjasama : Nomor: 010/1272/437.83/BG/2023
- Perangkat Daerah yang melaksanakan : BPR Bank Gresik
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- 10 Kegiatan : Kesepakatan Bersama Antara Pemkab Gresik Dengan BCA Tentang Penyediaan Dan Pemerintahan Layanan Jasa Perbankan
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : BPR Bank Gresik
- Nomor Perjanjian : Nomor: 130/48/437.11/KSB/2023
- Kerjasama : Nomor: 010/1272/437.83/BG/2023
- Perangkat Daerah yang melaksanakan : BPPKAD
- Lokasi : Kabupaten Gresik

- 11 Kegiatan : Perjanjian Antara Pemkab Gresik Dengan PT. GRESIK MIGAS Properti Tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemkab Gresik.
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : PT. GRESIK MIGAS
- Nomor Perjanjian : Nomor : 130/13/437.11/KSB/2023
- Kerjasama : Nomor : 001.16/GP/VII/2023
- Perangkat Daerah yang melaksanakan : PT. GRESIK MIGAS Properti
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- 12 Kegiatan : Nota Kesepakatan Antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Prov Jatim Dan Pemkab Gresik tentang Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi Serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Prov Jatim
- Nomor Perjanjian : Nomor : NK-22/Wpb.16/2023
- Kerjasama : Nomor : 130/14/437.11/NK
- Perangkat Daerah yang melaksanakan : BPPKAD
- Lokasi : Kabupaten Gresik
13. Kegiatan : Perjanjian Kerja sama Antara Pemerintahan Kabupaten Bangkalan Dan Pemerintahan Kabupaten Gresik Tentang Replika Inovasi - Inovasi Yang Dilaksanakan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Kabupaten Bangkalan
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Pemerintahan Kabupaten Bangkalan
- Nomor Perjanjian : Nomor: 00.9/5583/PKS/433.011/2023
- Kerjasama : Nomor: 180/16/437.11/PKS/2023
- Perangkat Daerah yang : BAPELITBANGDA

- melaksanakan
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- 14 Kegiatan : Kesepakatan Baersama Antara Pemkab Gresik Dan Universitas Pembangunan Nasional " Veteran " Jatim Tentang Kerjasama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Jasa Konsultasi Dan Pengabdian Masyarakat
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Universitas Pembangunan Nasional " Veteran " Jatim
- Nomor Perjanjian : Nomor: 130/17/437.11/KSB/2023
- Kerjasama : Nomor: SKB/55/UN63/2023
- Perangkat Daerah yang melaksanakan : Dinas Pertanian
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- 15 Kegiatan : Kesepakatan Bersama Antara Pemkab Gresik Dan Universitas KIAI Abdullah Faqih Gresik Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Jasa Konsultasi Dan Pengabdian Masyarakat
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Universitas KIAI Abdullah Faqih Gresik
- Nomor Perjanjian : Nomor: 130/18/437.11/KSB/2023
- Kerjasama : Nomor: 0301/UNKafa/H.02/Mou/03/2023
- Perangkat Daerah yang melaksanakan : BAPELITBANGDA
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- 16 Kegiatan : Kesepakatan Bersama Antara Pemkab Gresik Dan Universitas Anwar Medika Gresik Tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Jasa Konsultasi Dan Pengabdian Masyarakat
- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Universitas Anwar Medika Gresik



Nomor Perjanjian : Nomor: 130/19/437.11/ksb/2023
 Kerjasama : Nomor: 15/MOU/UAM/RK-VII/2023
 Perangkat Daerah yang melaksanakan : BAPELITBANGDA
 Lokasi : Kabupaten Gresik

16 Kegiatan : Kesepakatan Bersama Antara Pemkab Gresik Dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah

Pihak Kerjasama Antar Daerah : Pemerintah Kabupaten Nganjuk

bekerjasama

Nomor Perjanjian : Nomor: 130/20/437.11/KSB/2023

Kerjasama : Nomor: 415.4/13/411.010/2023

Perangkat Daerah yang melaksanakan : Bagian Perekonomian

Lokasi : Kabupaten Gresik

4.1 Hambatan/Permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaiannya

NIHIL

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL



BAB IV

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Latar Belakang

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis serta mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak didapatkan oleh setiap warga negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan suatu spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh suatu badan layanan umum terhadap masyarakat. Diharapkan pelaksanaan SPM akan menjamin kualitas dan kuantitas minimal dari suatu pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat, sehingga diharapkan akan meratanya pelayanan yang diterima oleh masyarakat dan menghindari kesenjangan.

Pada perkembangan pelaksanaan SPM masih terdapat banyak tantangan dalam penerapan SPM. Pemerintah daerah kedepan harus mampu menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM. Pemerintah Daerah juga harus mampu memenuhi suatu ukuran kelayakan minimal, dengan membuat sebuah standar pelayanan yang sama.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Standar Pelayanan Minimal diterapkan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini kemudian dijabarkan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan SPM dan menjadi pokok-pokok acuan bagi pemerintah daerah dalam penerapan SPM.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk:



- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui diberikannya sebuah jaminan mengenai penerapan SPM dalam pelayanan publik.
- b. Dapat menentukan sebuah dana anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pelayanan publik
- c. Menjadi dasar untuk menentukan anggaran berbasis kerja
- d. Dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah karena masyarakat dapat mengukur sejauh mana kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik
- e. Sebagai tolok ukur untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik.
- f. Menjadi dasar bagi pelaksanaan pengawasan sebagai bahan evaluasi kinerja.

Penerapan sebuah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pemberian pelayanan tidak boleh tercipta perlakuan yang berbeda, sehingga menimbulkan diskriminasi pelayanan, perlu pula mendapatkan pembenahan melalui keterbukaan dan kemudahan prosedur, penetapan yang jelas dan terjangkau, keprofesionalan aparatur dalam teknik pelayanan, dan tersedianya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur.

Salah satu bentuk upaya yang nyata dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang excellent, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan urusan wajib yang menjadi tanggung jawabnya dan mewajibkan pemerintah daerah di Indonesia untuk menerapkannya sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat. Kebijakan ini dimanifestasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Seperti halnya dengan Instansi Pemerintah di Pusat dan di Daerah lainnya, Pemerintah Kabupaten Gresik juga berusaha untuk melaksanakan kebijakan mengenai pelayanan publik yang prima melalui penyusunan,



penetapan dan penerapan SPM secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran - ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

B. Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang melandasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum, yang diganti dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021;



18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026;
20. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023;
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021;
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

C. Kebijakan Umum

Kebijakan umum memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi OPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra OPD.

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Kebijakan Umum RPJMD Kabupaten Gresik sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 menetapkan Visi, Misi, Motto, Strategi dan Arah Kebijakan daerah serta Prioritas Daerah sebagai berikut :

1. Visi Kabupaten Gresik

Visi Kabupaten Gresik merupakan cita-cita luhur yang menjadi asa bersama untuk melangkah membangun Gresik Baru berlandaskan visi Bupati dan



Wakil bupati terpilih sebagai arah pembangunan selama periode Tahun 2021-2026 yaitu:

” Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”.

Secara filosofis, visi Kabupaten Gresik tersebut mengandung makna sebagaimana disajikan dalam pokok-pokok visi pembangunan sebagaimana berikut:

Tabel I.C.1. 1 Pokok - Pokok Visi Pembangunan Kabupaten Gresik

1. Gresik yang lebih mandiri	Kemandirian dalam konteks kedaerahan merupakan kehidupan bermasyarakat yang menjadi salah satu tujuan yang selalu ingin dicapai setiap daerah. Mandiri ialah sebuah bentuk kemampuan yang dapat mengoptimalkan apa yang dimiliki (sumberdaya) dan mengembangkannya (potensi) sehingga dapat menjadi sebuah bentuk kekuatan daerah yang mampu berkompetisi serta beradaptasi dengan perubahan jaman. Maka baik pemerintah dan masyarakat Gresik secara kolektif kolegal mampu memenuhi kewajibannya baik domestik maupun internasional. Adapun kemandirian ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Kemandirian Ekonomi dalam hal ini adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang kreatif, terampil dan kompetitif, yang kemudian dikolaborasikan dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan sehingga mewujudkan
------------------------------	---



	kemandirian daerah.
2. Gresik yang sejahtera	Sejahtera adalah suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kehidupan yang layak dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, yang aman dari rasa kekhawatiran akan potensi-potensi ancaman pada masyarakat seperti terorisme atau potensi bencana alam, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, dan tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial.
3. Gresik yang berdaya saing	Daya saing sangat berhubungan dengan kemampuan dan kapasitas pembangunan sebuah daerah. Strategi pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing sebuah daerah yang nantinya untuk menunjang peningkatan disegala sektor. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah utara dan selatan, kota dan desa serta konektivitas dengan pulau bawean. Salah satu fokus dari pembangunan ini adalah pada pembangunan antar wilayah produksi dengan wilayah distribusi. Serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang kemudahan untuk



mengakses segala kebutuhan pokok masyarakat secara inklusif, baik perempuan dan laki-laki, pada semua kelompok usia, termasuk kelompok rentan dan marginal, di semua wilayah baik di kota maupun kepulauan. Ada pula pembangunan infrastruktur konektivitas multimoda yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pada pembangunan fasilitas transportasi kereta api guna menunjang pembangunan di area GEBANGKERTASUSILA hingga transportasi laut antar pulau seperti pada pulau bawean. Kedepan pembangunan ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik serta terciptanya tata kota yang modern, inovatif dan berkeadilan.

4. Gresik yang berkemajuan Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi kedepan, memiliki sikap optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter. Untuk membentuk insan warga Gresik yang memiliki karakter orientasi kemajuan. Maka pemerintah wajib mewujudkan kemudahan dalam mengakses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas serta mewujudkan pola pendidikan yang inovatif dan kolaboratif yang mampu memunculkan warga yang memiliki kompetensi individual yang baik dan memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sama dan



	berkolaborasi dalam mendorong kemajuan serta memiliki karakter yang kuat.
5. Gresik yang berlandaskan akhlakul karimah	Seluruh dimensi visi pembangunan Gresik diatas dilandasi oleh Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah atau akhlak yang mulia adalah keadaan mentalitas warga Gresik memiliki keadaban sosial, karakter luhur, kesalehan sosial. Pemerintah Gresik bertanggung jawab untuk membawa masyarakat memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah berbasis pada nilai-nilai budaya dan keagamaan. Akhlak ini tidak hanya menegaskan tentang karakter manusia Gresik, namun juga menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari pelayanan publik, pendekatan pembangunan hingga kebijakan secara umum. Melalui pembangunan karakter manusia yang berakhlakul karimah bahwa pembangunan di Gresik tidak hanya mengejar pemenuhan material namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas warga yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dengan akhlakul karimah maka orientasi pembangunan di Gresik mendorong untuk membangun warga yang memiliki solidaritas yang tinggi, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Didalam pemerintahan penerapan Akhlakul Kharimah juga dijadikan prinsip yang akan mewujudkan pemerintahan yang bersih,



anti korupsi serta tanggap dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar setiap warga dan juga pemerintah memiliki pandangan tujuan yang sama dalam segi pembangunan karakter.

2. Misi Kabupaten Gresik

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Gresik, maka ditetapkan misi Kabupaten Gresik 2021-2026 adalah:

Misi ke-1

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif;

Misi ke-2

Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota;

Misi ke-3

Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah;

Misi ke-4

Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah;

Misi ke-5

Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.

Berdasarkan Tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan tematik Perencanaan Pembangunan Daerah pada Dokumen



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, maka dirumuskan prioritas pembangunan tematik Kabupaten Gresik sebagaimana berikut:

1. Gresik AKAS

Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan;

2. Gresik SEGER

Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran;

3. Gresik MAPAN

Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan;

4. Gresik AGROPOLITAN

Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan;

5. Gema KARYA

Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi;

6. Gresik CERDAS

Peningkatan kualitas pendidikan didukung perluasan aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik;

7. Gresik SEHATI

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender;

8. Gresik BAROKAH

Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis;

9. Gresik LESTARI

Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan.

Prioritas Program Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2023 dirumuskan berlandaskan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 serta mempertimbangkan tema pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2023 yaitu Percepatan transformasi ekonomi inklusif dan pemulihan sosial menuju Gresik baru.



BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STAND PELAYANAN MINIMAL

4.1. SPM Bidang Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh peserta didik secara minimal. Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Gresik secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dengan rincian jenis pelayanan dasar terdiri atas:

A. pendidikan anak usia dini;

Penerima pelayanan dasar merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun).

B. Pendidikan dasar;

Penerima pelayanan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang terbagi dalam dua jenjang pendidikan, yaitu Sekolah Dasar dan Sekolah Pertama.

C. Pendidikan kesetaraan;

Penerima pelayanan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

4.1.2 Target Pencapaian SPM

Sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, target dan indikator kinerja pencapaian SPM Bidang Pendidikan yang ditetapkan oleh Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :



Tabel III.A.1 Target SPM Urusan Pendidikan Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	35.928	Tahun 2023	Angka partisipasi sekolah	82,56	Tahun 2023
					Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	88,00	Tahun 2023
					Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	76,59	Tahun 2023
					Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	3,34	Tahun 2023
					Kecukupan formasi guru ASN	50,00	Tahun 2023
					Indeks distribusi guru	0,85	Tahun 2023
					Proporsi PTK bersertifikat	54,58	Tahun 2023
					Proporsi PTK penggerak	2,00	Tahun 2023
					Pengalaman pelatihan guru	37,16	Tahun 2023
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi/SMP/MTs)	163.241	Tahun 2023	Angka partisipasi kasar	100,26	Tahun 2023
					Angka partisipasi sekolah	99,00	Tahun 2023
					Angka partisipasi murni	88,02	Tahun 2023
					Kemampuan literasi	76,05	Tahun 2023



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					Kemampuan numerasi	48,60	Tahun 2023
					Perbedaan Skor Literasi	2,33	Tahun 2023
					Perbedaan Skor numerasi	3,00	Tahun 2023
					Indeks iklim keamanan	70,72	Tahun 2023
					Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	56,94	Tahun 2023
					Kecukupan formasi guru ASN	83,19	Tahun 2023
					Indeks distribusi guru	0,58	Tahun 2023
					Proporsi PTK bersertifikat	54,69	Tahun 2023
					Proporsi PTK penggerak	75,00	Tahun 2023
					Pengalaman pelatihan guru	5,81	Tahun 2023
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1.243	Tahun 2023	Angka partisipasi sekolah	77,00	Tahun 023
					Kemampuan literasi	85,27	Tahun 023
					Kemampuan numerasi	50,92	Tahun 023
					Perbedaan Skor Literasi	2,50	Tahun 023
					Perbedaan Skor numerasi	3,00	Tahun 023
					Indeks iklim keamanan	66,74	Tahun 023
					Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	56,11	Tahun 023
					Proporsi PTK bersertifikat	3,13	Tahun 023
					Pengalaman pelatihan guru	100,00	Tahun 023

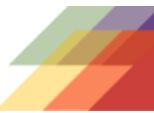
4.1.3 Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan pendidikan di Kabupaten Gresik Tahun 2023 dengan tiga jenis pelayanan dasar, SPM urusan Pendidikan mencapai 100%. Berikut capaian SPM Kesehatan Tahun 2023:



Tabel III.A.5. 1 Realisasi Capaian Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Capaian	Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	35.928	35.928	100%	Angka partisipasi sekolah	82,56	82,56	100%
						Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	88,00	88,00	100%
						Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	76,59	76,59	100%
						Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	3,34	3,34	100%
						Kecukupan formasi guru ASN	50,00	50,00	100%
						Indeks distribusi guru	0,85	0,85	100%
						Proporsi PTK bersertifikat	54,58	54,58	100%
						Proporsi PTK penggerak	2,00	2,00	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Capaian	Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						Pengalaman pelatihan guru	37,16	37,16	100%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi/SMP/MTs)	163.241	163.241	100%	Angka partisipasi kasar	100,26	100,26	100%
						Angka partisipasi sekolah	99,00	99,00	100%
						Angka partisipasi murni	88,02	88,02	100%
						Kemampuan literasi	76,05	76,05	100%
						Kemampuan numerasi	48,60	48,60	100%
						Perbedaan Skor Literasi	2,33	2,33	100%
						Perbedaan Skor numerasi	3,00	3,00	100%
						Indeks iklim keamanan	70,72	70,72	100%
						Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	56,94	56,94	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Capaian	Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
3	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1.243	1.243	100%	Kecukupan formasi guru ASN	83,19	83,19	100%
						Indeks distribusi guru	0,58	0,58	100%
						Proporsi PTK bersertifikat	54,69	54,69	100%
						Proporsi PTK penggerak	75,00	75,00	100%
						Pengalaman pelatihan guru	5,81	5,81	100%
						Angka partisipasi sekolah	77,00	77,00	100%
						Kemampuan literasi	85,27	85,27	100%
						Kemampuan numerasi	50,92	50,92	
						Perbedaan Skor Literasi	2,50	2,50	100%
						Perbedaan Skor numerasi	3,00	3,00	100%
						Indeks iklim keamanan	66,74	66,74	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	56,11	56,11	100%
						Proporsi PTK bersertifikat	3,13	3,13	100%
						Pengalaman pelatihan guru	100,00	100,00	100%

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik pada Dinas Pendidikan bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2023 yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

Tabel III.A.2 Anggaran Penerapan SPM Urusan Pendidikan
Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	Urusan Pendidikan Kab. Gresik	472,538,376,779	387,173,661,665	81.93 %
1.	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	64,152,842,170	55,953,341,646	87.22 %
	1. Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM PAUD	52.202.259.820	45,860,191,605	87.36 %
	2. Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali pertahun	37,999,820	37,972,600	99.93 %
	3. Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	52,270,078,000	45,641,437,000	87.32 %
	4. Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	190,000,000	180,782,005	95.15 %
	2. Kegiatan Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan Satuan	2,948,363,746	2,664,283,100	90.36 %
	1. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1,474,975,150	1,229,293,052	83.34 %

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	2. Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	387,718,596	363,280,320	93.70 %
	4. Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	72,000,000	59,434,728	82.55 %
	5. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	1,013,670,000	1,012,275,000	99.86 %
	3. Kegiatan Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PAUD)	7,546,697,970	6,694,052,741	88.70 %
	1. Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	7,546,697,970	6,694,052,741	88.70 %
	4. Kegiatan Pemenuhan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (PAUD)	1,159,702,634	734,814,200	63.36 %
	1. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1,159,702,634	734,814,200	63.36 %
2.	Program SPM Pendidikan Dasar	319,572,344,321	263,803,832,189	82.55 %
	5. Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	245,034,876,638	197,322,196,765	80.53 %
	2. Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	237,812,560,000	190,632,340,825	80.16 %

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	3. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	7,222,316,638	6,689,855,940	92.63 %
	6. Kegiatan Pemenuhan Kualitas Dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/mts/Paket A/Paket B	2,200,792,567	1,202,157,262	54.62%
	1. Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	1,113,642,567	620,578,086	55.73 %
	2. Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	1,087,150,000	581,579,176	53.50 %
	7. Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	35,125,989,655	32,704,026,580	93.10 %
	1. Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	800,190,000	272,490,000	34.05 %
	2. Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	75,000,000	66,913,750	89.22 %
	3. Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	20,210,341,655	19,746,963,780	97.71 %
	4. Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	14,040,458,000	12,617,659,050	89.87 %

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	8. Kegiatan Pemenuhan Jumlah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (SD/SMP/PaketA/Paket B)	36,152,866,210	32,057,599,222	88.67 %
	1. Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	35,957,796,210	31,895,192,472	88.70 %
	2. Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	195,070,000	162,406,750	83.26 %
	9. Kegiatan Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1,057,819,251	517,852,360	48.95 %
	1. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1,057,819,251	517,852,360	48.95 %
3.	Pendidikan Kesetaraan	88,813,190,288	67,416,487,830	75.91 %
	10. Pemenuhan Layanan dasar SPM (Kesetaraan)	32,475,102,000	18,001,894,500	55.43 %
	2. Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	32,475,102,000	18,001,894,500	55.43 %
	11. Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	113,164,942	111,673,292	98.68 %
	1. Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	95,510,000	95,097,700	99.57 %
	2. Pelatihan/seminar / lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	17,654,942	16,575,592	93.89 %

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
12.	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)	55,337,076,526	48,515,384,421	87.67 %
	2. Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	3,000,000	2,476,447	82.55 %
	3. Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	55,334,076,526	48,512,907,974	98,75%
13.	Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)	887,846,820	787,535,617	88.70 %
	1. Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	887,846,820	787,535,617	88.70 %

4.1.5. Dukungan Personil

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik didukung oleh sumber daya manusia yang bertugas menjalankan tugas pokok dan jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Berikut tabel jumlah personil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2023.

Tabel III.A.4. 1 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2023

No.	Jenis / Kualifikasi	Jumlah
1	Eselon	
	a. II B	1
	b. III A	1
	c. III B	4
	d. IV A	8
	JUMLAH	14
2	JABATAN FUNGSIONAL	
	1. FUNGSIONAL GURU (TK,SD,SMP)	
	a. Pangkat/Golongan	

No.	Jenis / Kualifikasi	Jumlah
	1. Golongan IV	
	2. Golongan III	1331
	3. Golongan II	3300
	4. Golongan I	19
	JUMLAH	4650
	2. FUNGSIONAL PENGAWAS (TK,SD,SMP)	
	a. Pangkat/Golongan	
	(1) Golongan IV	30
	(2) Golongan III	0
	JUMLAH	30
	3. FUNGSIONAL PENILIK	
	a. Pangkat/Golongan	
	(1) Golongan IV	19
	(2) Golongan III	8
	JUMLAH	27
3	JABATAN STRUKTURAL	
	a. Pangkat/Golongan	
	(1) IV	8
	(2) III	103
	(3) II	191
	JUMLAH	302
4	NON ASN(KANTOR DINAS, TK, SD dan SMP)	
	JUMLAH	1847
	TOTAL KESELURUHAN	6870

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan solusi yang ada dalam pelaksanaan SPM di Urusan Pendidikan antara lain:

1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya kemampuan dan pemahaman pelaksana teknis dalam menganalisis kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar
- b) Perencanaan kegiatan dan sub kegiatan belum mengacu pada perencanaan berbasis data dengan menganalisis rapor pendidikan
- c) Penyediaan layanan dasar Pendidikan Kesetaraan belum optimal menjangkau seluruh anak usia sekolah yang tidak bersekolah di Kabupaten Gresik
- d) Kurangnya monitoring dan evaluasi dalam keseluruhan tahapan penerapan dan pemenuhan SPM di Internal Dinas Pendidikan, baik dalam hal capaian indikator layanan SPM maupun anggaran yang mendukung kegiatan dan sub kegiatan SPM

2. Solusi

Upaya pemecahan yang dapat dilakukan atas permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a) Mengadakan kegiatan yang menunjang peningkatan kapasitas pelaksana teknis pengampu indikator SPM
- b) Perencanaan kegiatan dan sub kegiatan perlu diselaraskan dengan perencanaan berbasis data dengan menganalisis rapor pendidikan
- c) Melaksanakan koordinasi dengan operator sekolah mengenai validasi data anak putus sekolah pada aplikasi kemendikbud dan koordinasi dengan PKK dan Dinas PMD mengenai validasi data anak usia sekolah yang belum pernah bersekolah, sehingga dapat difasilitasi secara optimal dalam Pendidikan Kesetaraan

- d) Perlunya komitmen bersama, baik pengambil keputusan maupun pelaksana teknis pengampu SPM di Dinas Pendidikan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi tahapan penerapan dan pemenuhan SPM Pendidikan sehingga target setiap indikator yang direncanakan dapat dicapai secara maksimal dan anggaran yang mendukung pencapaian tersebut dapat dialokasikan secara efisien.

4.2. SPM Bidang Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 04 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan di Kabupaten Gresik yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dengan rincian jenis pelayanan dan rumus pencapaian spm kesehatan yang terdiri atas:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

$$\begin{array}{l} \text{Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil} \\ = \frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja puskesmas tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \times 100 \% \end{array}$$

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

$$\begin{array}{l} \text{Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan} \\ = \frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun.}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja puskesmas tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator).}} \times 100 \% \end{array}$$

3. Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir

$$\frac{\text{Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} = \frac{\text{Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

4. Pelayanan Kesehatan Balita

$$\frac{\text{Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar}}{\frac{\text{Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar} + \text{Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} + \text{Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar}} = \frac{\text{Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar}}{\text{Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar} + \text{Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} + \text{Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar}} \times 100\%$$

5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar

$$\frac{\text{Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun ajaran}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama}}} = \frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun ajaran}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama}} \times 100\%$$

6. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif

$$\frac{\text{Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di wilayah kerja Puskesmas yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}} = \frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di wilayah kerja Puskesmas yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

$$\frac{\text{Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\frac{\text{Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun (numerator)}}{\text{Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja PKM dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator)}} = \frac{\text{Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun (numerator)}}{\text{Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja PKM dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator)}} \times 100\%$$

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

$$\text{Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

$$\text{Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

$$\text{Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)

$$\text{Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu tahun yang sama}} \times 100\%$$

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

$$\text{Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

4.22. Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik di Tahun Anggaran 2023 sebagai OPD pelaksana SPM kesehatan untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

Tabel III.B.2.1 Target SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat layanan kesehatan	18.437	Tahun 2023	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	10.277	Tahun 2023
					2 . Tablet tambah darah	3.544	Tahun 2023
					3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	18.437	Tahun 2023
					4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	18.437	Tahun 2023
					5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	18.437	Tahun 2023
					6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	18.437	Tahun 2023
					7 . Kartu ibu/rekam medis ibu	18.437	Tahun 2023
					8 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	18.437	Tahun 2023
					9 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	108	Tahun 2023
					10 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	Tahun 2023
					11 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	Tahun 2023
					12 . Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester	18,437	Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)		
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	18.678	Tahun 2023	1 . Formulir Partograf	18.678	Tahun 2023
					2 . Kartu ibu (rekam medis)	18.678	Tahun 2023
					3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	18.678	Tahun 2023
					4 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	219	Tahun 2023
					5 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	Tahun 2023
					6 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	Tahun 2023
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	18,415	Tahun2023	1 . Vaksin Hepatitis B0	18,415	Tahun 2023
					2 . Vitamin K1 injeksi	18,415	Tahun 2023
					3 . Salep/tetes mata antibiotik	18,415	Tahun 2023
					4 . Formulir bayi baru lahir	18,415	Tahun 2023
					5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	18,415	Tahun 2023
					6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	18,415	Tahun 2023
					7 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	108	Tahun 2023
					8 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	Tahun 2023
					9 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	88,337	Tahun 2023	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	32	Tahun 2023
					2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	88,337	Tahun 2023
					3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	22,136	Tahun 2023
					4 . Vitamin A Biru	9,159	Tahun 2023
					5 . Vitamin A Merah	69,177	Tahun 2023
					6 . Vaksin imunisasi dasar: HBO	20,124	Tahun 2023
					7 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	6,834	Tahun 2023
					8 . Vaksin imunisasi dasar: Polio	6,834	Tahun 2023
					9 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	5,085	Tahun 2023
					10 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	20,439	Tahun 2023
					11 . Vaksin imunisasi dasar: Campak	5,134	Tahun 2023
					12 . Vaksin imunisasi dasar: Rubella	2,592	Tahun 2023
					13 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	25,623	Tahun 2023
					14 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	2,592	Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					15 . Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	2,592	Tahun 2023
					16 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	566,328	Tahun 2023
					17 . Peralatan Anafilaktik	847	Tahun 2023
					18 . Tenaga kesehatan : Dokter	108	Tahun 2023
					19 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	Tahun 2023
					20 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	Tahun 2023
					21 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	28	Tahun 2023
					22 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	7,595	Tahun 2023
					23 . Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	3,936	Tahun 2023
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	178,412	Tahun 2023	1 . Buku raport kesehatanku	178,412	Tahun 2023
					2 . Buku pemantauan kesehatan	178,412	Tahun 2023
					3 . Kuesioner skrining kesehatan	178,412	Tahun 2023
					4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	178,412	Tahun 2023
					5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	178,412	Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	855,839	Tahun 2023	6 . Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	159	Tahun 2023
					7 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	
					8 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	
					9 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	37	
					10 . Tenaga Kesehatan : Masyarakat	28	
					11 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	4,431	
					12 . Tenaga Non kesehatan : Guru	7,595	
					1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	57	
					2 . Alat ukur berat badan	408,619	
					3 . Alat : Alat ukur tinggi badan	782	
					4 . Alat : Alat ukur lingkar perut	782	
					5 . Alat : Tensimeter	245	
					6 . Alat : Glukometer	266,334	
					7 . Alat : Tes strip gula darah	855,839	
					8 . Alat : Lancet	855,839	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					9 . Alat : Kapas alkohol	855,839	
					10 . Alat : KIT IVA Tes	1,920	
					11 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	4	
					12 . Tenaga kesehatan : Dokter	108	
					13 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	
					14 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	
					15 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	37	
					16 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	28	
					17 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	7,595	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	151,544	Tahun 2023	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	151,544	Tahun 2023
					2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian	151,544	Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					Paripurna Pasien Geriatri (P3G)		
					3 . Buku kesehatan lansia	151,544	Tahun 2023
					4 . Tenaga kesehatan : Dokter	108	Tahun 2023
					5 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	Tahun 2023
					6 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	Tahun 2023
					7 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	37	Tahun 2023
					8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	28	Tahun 2023
					9 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	7,595	Tahun 2023
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan layanan kesehatan	220,546	Tahun 2023	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	33	Tahun 2023
					2 . Tensimeter	93	
					3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	220,546	
					4 . Tenaga kesehatan : Dokter	108	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		Batas Waktu Capaian
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan layanan kesehatan	48,366	Tahun 2023	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	Tahun 2023
					6 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	
					7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	28	
					8 . Obat Hipertensi	220,546	
					1 . Alat : Glukometer	266,334	
					2 . Alat : Strip Tes Gula Darah	266,334	
					3 . Alat : Kapas Alkohol	266,334	
					4 . Alat : Lancet	266,334	
					5 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	48,366	
					6 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	32	
					7 . Tenaga kesehatan : Dokter	108	
					8 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					9 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	
					10 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	37	
					11 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	28	
					12 . Obat Diabetes Melitus	48,366	
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	2,215	Tahun 2023	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	33	Tahun 2023
					2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	10	Tahun 2023
					3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	350	Tahun 2023
					4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	99	Tahun 2023
					5 . Tenaga kesehatan : Dokter	108	Tahun 2023
					6 . Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	32	Tahun 2023
					7 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	32	Tahun 2023
11	Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis	18,112	Tahun 2023	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	9,750	Tahun 2023
					2 . Reagen Zn TB	1.100	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
	Terduga Tuberkulosis	yang mendapatkan layanan kesehatan			3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	18,112	
					4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	69,524	
					5 . Catridge tes cepat molekuler	18,112	
					6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	18,112	
					7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	195	
					8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	163	
					9 . Tenaga kesehatan : Perawat	52	
					10 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	52	
					11 . Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	20	
					12 . Tenaga kesehatan masyarakat	42	
					13 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	7,595	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang	28,828	Tahun 2023	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	773	Tahun 2023
					2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	28,828	Tahun 2023
					3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	28,828	Tahun 2023
					4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	28,828	Tahun 2023
					5 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	219	Tahun 2023
					6 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	Tahun 2023
					7 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	Tahun 2023
					8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	158	Tahun 2023
					9 . Tenaga kesehatan masyarakat	71	Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	15	Tahun 2023

Diketahui bahwa pada tabel III.B.2 Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan Th 2023 yaitu 100%. Hal tersebut di atas membuat seluruh elemen akan bersatu padu berbenah untuk bersama-sama menuju pencapaian target-target SPM, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan sumber daya manusia kesehatan terutama di level Puskesmas sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan menjadi unit terdepan dalam upaya pencapaian target-target SPM.

4.2.2. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah. Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan di Kabupaten Gresik Tahun 2023 untuk seluruh indikator SPM Kesehatan mencapai 85,94%. Berikut rincian capaian urusan kesehatan di Kabupaten Gresik:

Tabel III.B.5. 1. Realisasi Capaian Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat layanan kesehatan	18,437	18,437	100%	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	10,277	10,277	100%
						2. Tablet tambah darah	3,544	3,544	100%
						3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	18,437	18,437	100%
						4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	18,437	18,437	100%
						5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	18,437	18,437	100%
						6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin	18,437	18,437	100%
						7. Kartu ibu/rekam medis ibu	18,437	18,437	100%
						8. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	18,437	18,437	100%
						9. Tenaga kesehatan: Dokter/dokter spesialis kebidanan	108	108	100%
						10. Tenaga kesehatan: Bidan	436	436	100%
						11. Tenaga Kesehatan: Perawat	276	276	100%
						12. Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali	18,437	18,437	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	18,678	18,678	100%	pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)			
						1 . Formulir Partograf	18.678	18,678	100%
						2 . Kartu ibu (rekam medis)	18.678	18.678	100%
						3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	18.678	18.678	100%
						4 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	219	219	100%
						5 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	436	100%
						6 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	276	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	18,415	18,415	100%	1 . Vaksin Hepatitis B0	18,415	18,415	100%
						2 . Vitamin K1 injeksi	18,415	18,415	100%
						3 . Salep/tetes mata antibiotik	18,415	18,415	100%
						4 . Formulir bayi baru lahir	18,415	18,415	100%
						5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	18,415	18,415	100%
						6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	18,415	18,415	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						7 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	108	108	100%
						8 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	436	100%
						9 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	276	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	88,337	88,337	100%	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	32	32	100%
						2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	88,337	88,337	100%
						3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	22,136	22,136	100%
						4 . Vitamin A Biru	9,159	9,159	100%
						5 . Vitamin A Merah	69,177	69,177	100%
						6 . Vaksin imunisasi dasar: HBO	20,124	20,124	100%
						7 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	6,834	6,834	100%
						8 . Vaksin imunisasi dasar: Polio	6,834	6,834	100%
						9 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	5,085	5,085	100%
						10 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	20,439	20,439	100%
						11 . Vaksin imunisasi dasar: Campak	5,134	5,134	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						12 . Vaksin imunisasi dasar: Rubella	2,592	2,592	100%
						13 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	25,623	25,623	100%
						14 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	2,592	2,592	100%
						15 . Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	2,592	2,592	100%
						16 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	566,328	566,328	100%
						17 . Peralatan Anafilaktik	847	847	100%
						18 . Tenaga kesehatan : Dokter	108	108	100%
						19 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	436	100%
						20 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	276	100%
						21 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	28	28	100%
						22 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	7,595	7,595	100%
						23 . Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	3,936	3,936	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	178,412	178,412	100%	1 . Buku raport kesehatanku	178,412	178,412	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						2 . Buku pemantauan kesehatan	178,412	178,412	100%
							178,412	178,412	100%
						3 . Kuesioner skrining kesehatan			
						4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	178,412	178,412	100%
						5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	178,412	178,412	100%
						6 . Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	159	159	100%
						7 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	436	100%
						8 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	276	100%
						9 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	37	37	100%
						10 . Tenaga Kesehatan : Masyarakat	28	28	100%
						11 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	4,431	4,431	100%
						12 . Tenaga Non kesehatan : Guru	7,595	7,595	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	855,839	855,839	100%	1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	57	57	100%
						2 . Alat ukur berat badan	408,619	408,619	100%
						3 . Alat : Alat ukur tinggi badan	782	782	100%
						4 . Alat : Alat ukur lingkar perut	782	782	100%
						5 . Alat : Tensimeter	245	245	100%
						6 . Alat : Glukometer	266,334	266,334	100%
						7 . Alat : Tes strip gula darah	855,839	855,839	100%
						8 . Alat : Lancet	855,839	855,839	100%
						9 . Alat : Kapas alkohol	855,839	855,839	100%
						10 . Alat : KIT IVA Tes	1,920	1,920	100%
						11 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	4	4	100%
						12 . Tenaga kesehatan : Dokter	108	108	100%
						13 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	436	100%
						14 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	276	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	151,544	151,544	100%	15 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	37	37	100%
						16 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	28	28	100%
						17 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	7,595	7,595	100%
						1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	151,544	151,544	100%
						2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	151,544	151,544	100%
						3 . Buku kesehatan lansia	151,544	151,544	100%
						4 . Tenaga kesehatan : Dokter	108	108	100%
						5 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	436	100%
						6 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	276	100%
						7 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	37	37	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan layanan kesehatan	220,546	220,546	100%	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	28	28	100%
						9 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	7,595	7,595	100%
						1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	33	33	100%
						2 . Tensimeter	93	93	100%
						3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	220,546	220,546	100%
						4 . Tenaga kesehatan : Dokter	108	108	100%
						5 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	436	100%
						6 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	276	100%
						7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	28	28	100%
						8 . Obat Hipertensi	220,546	220,546	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun	48,366	48,366	100%	1 . Alat : Glukometer	266,334	266,334	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
	Melitus	ke atas yang mendapatkan layanan kesehatan				2 . Alat : Strip Tes Gula Darah	266,334	266,334	100%
						3 . Alat : Kapas Alkohol	266,334	266,334	100%
						4 . Alat : Lancet	266,334	266,334	100%
						5 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	48,366	48,366	100%
						6 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	32	32	100%
						7 . Tenaga kesehatan : Dokter	108	108	100%
						8 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	436	100%
						9 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	276	100%
						10 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	37	37	100%
						11 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	28	28	100%
						12 . Obat Diabetes Melitus	48,366	48,366	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah warga negara dengan gangguan	2,215	2,215	100%	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa	33	33	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
	Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan				(PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)			
						2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi		10	100%
						3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan		350	100%
						4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)		99	100%
						5 . Tenaga kesehatan : Dokter		108	100%
						6 . Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa		32	100%
						7 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya		32	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	18,112	18,112	100%	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	9,750	9,750	100%
						2 . Reagen Zn TB			
						3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95			
						4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						5 . Catridge tes cepat molekuler	18,112	18,112	100%
						6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	18,112	18,112	100%
						7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	195	195	100%
						8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	163	163	100%
						9 . Tenaga kesehatan : Perawat	52	52	100%
						10 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	52	52	100%
						11 . Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	20	20	100%
						12 . Tenaga kesehatan masyarakat	42	42	100%
						13 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	7,595	7,595	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human	28,828	28,828	100%	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	773	773	100%
						2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	28,828	28,828	100%
						3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril,	28,828	28,828	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
	Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan				Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	28,828	28,828	100%
						4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK			
						5 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin			
						6 . Tenaga kesehatan : Perawat			
						7 . Tenaga kesehatan : Bidan			
						8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)			
						9 . Tenaga kesehatan masyarakat			
						10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu			

4.2.3. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Ketersediaan dan realisasi penggunaan anggaran terkait upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan di Kabupaten Gresik triwulan 3 tahun 2023 untuk seluruh indikator SPM sebagai berikut :

Tabel III.B.3.1 Anggaran Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023

No	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Serapan
	URUSAN KESEHATAN KAB.GRESIK	4,938,827,000	4,628,161,124	93.71 %
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4,938,827,000	4,628,161,124	93.71 %
1.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	4,938,827,000	4,628,161,124	93.71 %

No	Alokasi Anggaran		Persentase Serapan
URUSAN KESEHATAN KAB.GRESIK	4,938,827,000	4,628,161,124	93.71 %
UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1,551,101,000	1,483,259,300	95.63 %
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	107,806,000	106,286,000	98.59 %
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	113,814,000	105,320,000	92.54 %
4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	841,322,000	810,384,860	96.32 %
5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	444,718,000	407,981,500	91.74 %
6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	474,104,800	418,241,701	88.22 %
7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	539,711,000	517,098,250	95.81 %
8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	77,889,000	73,045,588	93.78 %
9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	71,159,000	56,018,600	78.72 %
10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	133,721,000	124,026,025	92.75 %

No	Alokasi Anggaran		Persentase Serapan
URUSAN KESEHATAN KAB.GRESIK	4,938,827,000	4,628,161,124	93.71 %
11.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	327,326,200	293,266,800	89.59 %
12.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	256,155,000	233,232,500	91.05 %

3. Dukungan Personil

Ketersediaan sumber daya manusia dalam upaya memberikan pelayanan minimal urusan kesehatan yang sesuai standar di Kabupaten Gresik tahun 2023 sebagai berikut:.

Tabel III.B.4. 1 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023

No	Jenis / Kualifikasi	Keterangan	Jumlah
1.	JABATAN STRUKTURAL		
a.	Eselon 2	Kepala Dinas	1
	Pangkat / Golongan	Pembina Tk. I	
	Pendidikan	S2	
b.	Eselon 3	Kepala bidang	4
	Pangkat / Golongan	Pembina Tk. I = 1 Pembina = 3	
	Pendidikan	S2 = 2 S1 = 2	
2.	Jabatan Fungsional Tertentu		286
a.	Pangkat/golongan	Penata Tk. I = 213 Pembina = 37	

No	Jenis / Kualifikasi	Keterangan	Jumlah
		Pembina Tk. I = 29 Pembina Utama Muda = 6 Pembina Utama Madya = 1	
	b. Pendidikan	Dokter = 111 S2 = 2 S1 = 109 Bidan = 20 S1 = 20 Perawat = 46 S2 = 1 S1 = 45	
3	Jabatan Fungsional Umum		54
	a. Pangkat/golongan	Penata Muda Tk I = 22 Penata = 14 Penata Tk I = 18	
	b. Pendidikan	S2 = 4 S1 = 45 SMA = 84	
4	Non ASN		
	Profesi (Pendidikan)	Dokter = 14 S2 = 1 S1 = 13 Bidan = 189 S2 = 0 S1 = 1 D4 = 10 D3 = 178 Perawat = 404 S1 = 69 D4 = 1 D3 = 334	
	Administrator (Pendidikan)	S1 = 11 D4 = 1 D3 = 17 SMA = 6	
	JUMLAH TOTAL		

Tabel III.B.4. 2 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Kesehatan
(Tenaga Kesehatan) Tahun 2023

No	Puskemas	Dokter	Drg Perawat	Bidan	Kesmas	Kesling	Gizi	ATLM	Farmasi	Total	
1	Puskesmas Wringinanom	2	1	20	18	0	0	1	0	2	44
2	Puskesmas Kesamben Kulon	3	1	14	14	0	0	0	1	1	34
3	Puskesmas Driyorejo	2	2	25	27	0	0	1	1	2	60
4	Puskesmas Karangandong	2	2	13	14	0	0	1	0	2	34
5	Puskesmas Kedamean	4	1	14	14	0	0	1	1	1	36
6	Puskesmas Slemplit	2	1	16	15	0	0	0	1	1	36
7	Puskesmas Menganti	6	2	15	20	1	0	1	1	3	49
8	Puskesmas Kepatihan	4	1	17	11	0	0	2	1	1	37
9	Puskesmas Cerme	3	1	33	34	0	1	1	2	2	77
10	Puskesmas Dadap Kuning	3	0	21	31	0	0	0	3	1	59
11	Puskesmas Benjeng	2	1	26	26	0	0	2	2	2	61
12	Puskesmas Metatu	3	1	11	22	0	0	1	1	0	39
13	Puskesmas Balongpangga ng	3	0	22	22	0	0	1	2	0	50
14	Puskesmas Dapet	3	1	15	15	0	0	1	1	0	36
15	Puskesmas Duduk Sampeyan	4	1	35	32	1	0	1	2	2	78
16	Puskesmas Kebomas	12	1	16	21	0	0	0	0	3	53
17	Puskesmas Gending	2	2	21	13	1	0	1	1	2	43
18	Puskesmas	3	5	27	15	1	0	1	2	2	56

No	Puskemas	Dokter	Drg	Perawat	Bidan	Kesmas	Kesling	Gizi	ATLM	Farmasi	Total
	Alun-alun										
19	Puskesmas Nelayan	3	1	11	9	0	0	1	2	2	29
20	Puskesmas Industri	3	1	16	9	0	0	1	2	1	33
21	Puskesmas Manyar	5	1	16	21	0	0	1	0	2	46
22	Puskesmas Sembayat	3	1	19	19	0	0	0	0	1	43
23	Puskesmas Sukomulyo	4	1	18	19	1	0	1	1	2	47
24	Puskesmas Bungah	2	1	32	34	1	0	1	3	2	76
25	Puskesmas Sidayu	2	2	30	36	0	0	1	3	1	75
26	Puskesmas Mentaras	3	1	17	14	0	0	2	2	1	40
27	Puskesmas Dukun	3	2	24	30	0	0	0	1	2	62
28	Puskesmas Panceng	3	0	21	19	0	0	1	2	2	48
29	Puskesmas Ujung Pangkah	1	1	14	19	1	0	0	2	2	40
30	Puskesmas Sekapuk	3	0	13	11	1	0	1	1	1	31
31	Puskesmas Sangkapura	3	4	22	26	1	0	3	1	2	62
32	Puskesmas Tambak	2	1	21	30	2	0	2	0	1	59
34	RSUD Ibnu	110	2			14	2	23	31	50	

	Sina Kab. Gresik			381	50						663
35	RSUD Umar Masúd	4	3	36	15	1	0	3	4	2	68

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam pelaksanaan SPM urusan Kesehatan:

Tabel III.B.6. 1. Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. Masih adanya K1 akses 2. Mobilitas yang tinggi pada bumil 3. adanya bumil yang pindah kelain tempat 4. Adanya ibu hamil yang abortus	1. Kerja sama dengan PKK dan kader desa untuk melaporkan keBidan Desa apabila mengetahui ada warga yang hamil 2. Memantau catin baik yang berKB atau yang tidak ber KB edukasi tentang pentingnya ANC yang rutin 3. Melakukan promosi Kesehatan terkait Kesehatan selama kehamilan 4. Melakukan koordinasi lintas serktor untuk integrasi dalam rangka pencapaian SPM
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. Mobilitas ibu hamil yang tinggi 2. Adanya kehamilan dengan abortus 3. Adanya persalinan diluar wilayah Kab. Gresik sehingga tidak tercatat pada pelaporan 4. Pada saat pelaporan SPM masih ada sasaran bumil yang belum waktunya bersalin dan hal tersebut berpengaruh terhadap capaian target.	1. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait untuk data yang digunakan 2. Melakukan promosi Kesehatan terkait Kesehatan ibuyang dimulai sejak masa kehamilan dan persalinan

3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1. Adanya kesenjangan sasaran proyeksi dan sasaran riil, sehingga capaian SPM tidak bisa 100%. 2. Belum waktunya KN Lengkap sehingga target tidak tercapai	Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait untuk data sebagai dasar target yang digunakan.
---	-------------------------------------	---	---

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	SOLUSI
4	Pelayanan Kesehatan Balita	1. Tidak semua balita datang ke posyandu pada saat pelayanan SDDITK 2. Adanya penduduk musiman dengan mobilitas yang tinggi	Mengadakan kelas balita dan bekerja sama lintas program untuk melakukan kunjungan rumah dan meningkatkan edukasi kepada orang tua bayi dan balita
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Adanya kesenjangan sasaran proyeksi dan sasaran riil, sehingga capaian SPM tidak bisa 100%	koordinasi dengan SKPD terkait untuk data yang digunakan.
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Banyak sasaran usia produktif tidak berada di rumah saat dilakukan kunjungan karena sedang Bekerja, sekolah dan lupa jadwal posyandu	1. Melakukan kunjungan rumah sasaran dan berkoordinasi dengan Bidan Desa maupun Perawat Desa untuk meningkatkan cakupan 2. Membuat jadwal pelaksanaan posbindu dan melakukan kunjungan rumah dan kunjungan sekolah
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Lansia jarang datang berobat ke puskesmas maupun posbindu dikarenakan tidak mengetahui/lupa jadwal posyandu lansia	1. Melaksanakan sweeping serta melaksanakan kegiatan posyandu lansia ke desa dengan proses yang lebih baik 2. Mengakumulasi data jumlah kunjungan lansia pada laporan Bidan Desa dan Perawat Desa 3. Meningkatkan promosi kesehatan khususnya dengan sasaran yaitu lansia dan keluarga Advokasi Kepala Desa untuk memenuhi kebutuhan stik dengan menggunakan dana desa
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1. Capaian pelaporan pelayanan Kesehatan ibu bersalin hanya terbatas pada fasilitas Kesehatan milik pemerintah (RSUD dan Puskesmas)	Tetap melakukan pemantauan terhadap kunjungan pasien Puskesmas sehingga bisa memberikan informasi kepada pasien hipertensi agar tetap melakukan pengobatan rutin dimasa pandemi ini, dan tetap melakukan skrining terhadap kunjungan pasien baru di Puskesmas
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Tidak ada permasalahan dan hingga TW 4 sudah dapat mencapai target	Upaya mencapai target SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus dilakukan dengan Berkoordinasi dengan Bidan Desa maupun Perawat Desa agar segera melaporkan jika ditemukan pasien DM

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	SOLUSI
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Tidak ada permasalahan	Upaya untuk mencapai target yaitu dengan tetap berupaya melakukan sweeping dengan SDM yang ada agar tetap melakukan pengobatan rutin dimasa pandemi Covid-19.
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tidak ada permasalahan pada pencapaian SPM Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	1. Upaya mencapai target dengan cara melakukan skrining /case finding ditempat berisiko seperti ponpes, perusahaan, dll. 2. Petugas TB dan nakes lain tetap giat melakukan penyisiran pasien terduga TB untuk mau memeriksakan dahaknya dengan cara petugas langsung yang membawakan sampelnya 3. Selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan dini terhadap penyakit TB serta perbedaan dengan gejala Covid-19
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus =HIV)	1. Adanya stigma terhadap penyakit HIV/AIDS yang ada dikelangan masyarakat yang menyebabkan rasa enggan dan takut untuk melakukan pemeriksaan HIV 2. Pemeriksaan HIV yang dilakukan di RS Swasta belum semuanya masuk ke sistem pencatatan dan pelaporan HIV/AIDS (SIHA)	1. Melakukan promosi kesehatan yang terintegratif terkait penyakit HIV/AIDS sehingga masyarakat tidak merasa takut untuk melakukan pemeriksaan HIV dan mengurangi stigma negatif di masyarakat 2. Melakukan kolaborasi terkait pelaporan HIV/AIDS di RS Swasta

4.3. SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Gresik dengan rincian jenis pelayanan terdiri atas:

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari,
Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik,
Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemda dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM yang dilaksanakan oleh Pemkab. Gresik pada urusan Pekerjaan Umum sebagai berikut:

Tabel III.B.2.1 Target SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	55.160	Tahun 2023	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terhadap kuantitas	17.647	Tahun 2023
					Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	17.647	Tahun 2023
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	6.370	Tahun 2023	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	534	Tahun 2023
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	18	Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	489	Tahun 2023
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	1.504	Tahun 2023
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	1.094	Tahun 2023

4.3.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Tahun 2023 capaian SPM urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik mencapai angka 74,78% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.C.5 1 Realisasi Capaian Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Capaian	Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	55.160	55.160	100%	1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terhadap kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	17.647	17,647	100.00 %
						2. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	17.647	17.647	100.00 %
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	6.370	6.370	100%	1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	534	534	100.00 %
						2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S	18	18	100.00 %

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)			
						3.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	489	489	100.00 %
						4.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	1.504	1.504	100.00 %

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	1.094	1.094	100.00 %

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Alokasi anggaran yang dianggarkan dalam penerapan dan pencapaian SPM urusan Pekerjaan Umum oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebesar Rp. 63.790.274.478,- dan terealisasi sebesar Rp. 51.705.190.408,- (81,05%), yang mana didalamnya terdapat unsur anggaran yang bersumber dari DAK. Anggaran ini dialokasikan untuk penyusunan rencana, peningkatan dan pengembangan SPAM, serta pembangunan, peningkatan, operasi dan pemeliharaan sistem pengolahan Air limbah domestik di Kabupaten Gresik sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara pada urusan pekerjaan umum. Adapun alokasi dana penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik antara lain:

Tabel III.C.3 1 Anggaran Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik	63,790,274,476	51,705,190,408	81.05 %
1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	57,206,232,376	45,741,312,300	79.96 %
	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	57,206,232,376	45,741,312,300	79.96 %
	5. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	6,994,480,194	3,513,777,174	50.24 %
	6. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	87,347,600	70,985,080	81.27 %

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	7. Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	42,086,180,780	34,986,468,714	83.13 %
	12. Fasilitas penyiapan kerja sama SPAM	5,234,750,800	4,366,608,330	83.42 %
	18. Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	2,803,473,002	2,803,473,002	100.00 %
2.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6,584,042,100	5,963,878,108	90.58 %
	2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	6,584,042,100	5,963,878,108	90.58 %
	5. Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	697,870,000	648,578,015	92.94 %
	6. Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1,232,378,000	785,629,982	63.75 %
	10. Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	630,659,600	625,228,833	99.14 %
	12. Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	3,427,002,000	3,336,508,170	97.36 %
	14. Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	353,866,000	352,206,624	99.53 %
	16. Rehabilitasi /peningkatan /perluasan sarana dan prasarana IPLT	242,266,500	215,726,484	89.05 %

4.3.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM Urusan Pekerjaan

Umum. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum antara lain:

Tabel III.C.4 1 Dukungan Personil Penerpan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kualifikasi	Jumlah
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1. Eselon 3	2
		2. Jabatan Fungsional	5
		a. Pangkat/Golongan	- Pembina (IV/a) - Penata Tk.I (III/d) - Penata Muda (III/a)
		b. Pendidikan	S2, S1
		3. Jabatan struktural	2
		a. Pangkat/Golongan	- Penata Tk.I (III/d) - Penata Muda (III/a)
		b. Pendidikan	S1
		4. Non PNS	6
		TOTAL	15
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	1. Eselon 3	3
		2. Jabatan Fungsional	2
		a. Pangkat/Golongan	- Penata (IIIc) - Penata Muda/IIIa
		b. Pendidikan	S1
		3. Jabatan struktural	4
		a. Pangkat/Golongan	- Penata (III/c) - Penata Muda (III/a) - Pengatur (II/c)
		b. Pendidikan	S1, SMA
		4. Non PNS	29
		TOTAL	38

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM di bidang urusan pekerjaan umum antara lain:

Tabel III.C.6.1 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

No.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pengumpulan Data	
	Proses pengumpulan data di butuhkan anggaran dan waktu yang relatif lama dalam pendataan terkait kepemilikan tangki septik, IPAL dan SPAM.	Dilakukan pendataan secara bertahap melalui konsultan atau lembaga lain yang menyediakan data terkait kabupaten.
	Adanya persepsi yang berbeda terkait data dari masing-masing sektor.	Membuat kesepakatan terkait tugas masing-masing sektor dalam pemenuhan data serta menentukan bersama data yang akan digunakan.
2.	Perhitungan Kebutuhan	
	Kurangnya data yang akurat, jika tidak memiliki database yang akurat dan lengkap tentang gambaran kondisi sarana dan prasarana SPAM dan pengelolaan air limbah domestik yang dimiliki oleh masyarakat, maka akan sulit untuk menghitung kebutuhan yang tepat.	Dilakukan pendataan SPAM dan kepemilikan tangki septik serta derajat sanitasi, jika semua data terkait sudah tercukupi bisa dilakukan perhitungan dengan tepat terkait skala prioritas yang harus ditangani.
3.	Penyusunan Rencana dan Penganggaran	

No.	PERMASALAHAN	SOLUSI
	Kendala anggaran : rendahnya anggaran yang dialokasikan dalam pemenuhan SPM PUPR kabupaten, seperti komitmen pendanaan untuk perbaikan sanitasi yang masih dibawah 2% dari total APBD Kabupaten.	- Perangkat daerah menggunakan anggaran yang tersedia dengan efektif dan efisien untuk memenuhi target yang sudah ditentukan. - Memanfaatkan sumber pendanaan lainnya seperti CSR dan DAK
4.	Pelaksanaan	
4.1	kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik	Sosialisasi secara intensif baik melalui tatap muka maupun media sosial lainnya guna meningkatkan kesadaran masyarakat
4.2	Kendala terkait kurangnya lahan sarana prasarana sanitasi khususnya di wilayah perkotaan	Diarahkan ke IPAL Komunal
4.3	Pemenuhan penyediaan air bersih bagi daerah yang tidak dapat dijangkau oleh sistem pengaliran yang ada	Dipenuhi melalui sumur bor
4.4	Pelatihan tentang manajemen HIPPAM masih kurang	BIMTEK peningkatan kapasitas pengelola SPAM.

4.4. SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Standar Pelayanan Minimal sub urusan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut SPM Perumahan Rakyat

adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan Perumahan Rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Gresik dengan rincian jenis pelayanan terdiri atas:

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain:

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
Penerima layanan dasar SPM Perumahan Rakyat merupakan warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten
Penerima layanan dasar SPM Perumahan Rakyat merupakan warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni.

4.4.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik pada bidang urusan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

Tabel III.D.2 1 Target SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni	41	Tahun 2023	2.Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	10	Tahun 2023
					3. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	1	
					4.Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	2	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni	141	Tahun 2023	3.Penyediaan rumah layak huni	40	Tahun 2023

4.4.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. Tahun 2023 capaian spm urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Gresik mencapai angka 67,86% dengan dua jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel III.D.5 1 Realisasi Capaian Penerapan SPM urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni	41	41	100%	2 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	10	10	100%
						3 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	1	1	100%
						4 . Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	2	2	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni	141	141	100%	3 . Penyediaan rumah layak huni	100,26	100,26	100%

4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Alokasi anggaran yang dianggarkan dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan Perumahan Rakyat oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebesar Rp. 3.364.046.220,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.238.254.556,-. Anggaran ini dialokasikan untuk indikator identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau relokasi program kabupaten/kota dan pemenuhan pada program lain seperti program pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh dan pengelolaan dana darurat dan mendesak, mengingat Kabupaten Gresik merupakan daerah rawan bencana.

Tabel III.D.3 1 Anggaran Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. GRESIK	3,364,046,220	3,238,254,556	96.26 %
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	789,846,220	664,054,556	84.07 %
1.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	42,021,700	38,425,320	91.44 %
	1. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/ Kota	42,021,700	38,425,320	91.44 %
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	747,824,520	625,629,236	83.66 %

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. GRESIK	3,364,046,220	3,238,254,556	96.26 %
	6. Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	747,824,520	625,629,236	83.66 %
2.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA			
	1. Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	2,274,200,000	2,274,200,000	100.00 %
	2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	300,000,000	300,000,000	100.00 %

4.4.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain:

Tabel III.D.4 1 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kualifikasi	Jumlah
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	1. Eselon 3	2
		2. Jabatan Fungsional	2
		a. Pangkat/Golongan	- Penata (III/c) - Pembina (IV/a)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kualifikasi	Jumlah
		b. Pendidikan	- S1
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	3. Jabatan struktural (staf)	6
		a. Pangkat/Golongan	- Penata Muda (IIIa) <u>- Pengatur (II/c)</u>
		b. Pendidikan	S1, D3, SMA
		4. Non ASN	4
		TOTAL	14

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM di bidang urusan perumahan rakyat:

Tabel III.D.6. 1 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pengumpulan Data	
1.1	Tahap identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana: Di Kabupaten Gresik terjadi Bencana yang rutin terjadi yaitu banjir yang diakibatkan oleh meluapnya Kali Lamong yang terjadi di Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Cerme, Menganti, Wringinanom, dan Kecamatan Kedamean. Dampak yang diakibatkan oleh banjir Kali Lamong adalah lahan pertanian mengalami puso atau gagal panen dan air meluap hingga ke jaringan jalan arteri yang menghubungkan Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Surabaya sehingga mengganggu arus lalu lintas, serta wilayah permukiman yang tergenang hingga mencapai pinggang orang dewasa. Dalam kaitannya dengan SPM Rumah Bencana, kejadian bencana banjir secara umum dan historis tidak mengakibatkan kerusakan rumah di permukiman terdampak sehingga tidak bisa menjadi target rumah yang akan ditangani.	Diperlukan kerjasama yang efektif antara pihak yang terkait, seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga penanggulangan bencana, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan memastikan bahwa proses pengumpulan data rumah bencana sampai realisasi penanganan dapat berjalan dengan baik. Bagi masyarakat yang telah memperbaiki kerusakan rumah secara swadaya dapat diberikan bantuan penanganan dengan mekanisme Ganti Uang (GU).
1.2	Tahap identifikasi lahan potensial: Kabupaten Gresik belum menyediakan lokasi yang secara khusus diperuntukkan bagi relokasi rumah bencana, karena memang kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Gresik secara umum adalah kejadian bencana yang tidak memerlukan penanganan relokasi rumah. Namun Pemerintah Kabupaten Gresik telah memiliki Rusun yang bisa digunakan sewaktu-waktu jika memang diperlukan.	Pada tahun 2023 akan diidentifikasi lokasi-lokasi tanah aset pemerintah yang memungkinkan digunakan sebagai lokasi relokasi diluar rusun yang telah disediakan.

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.3	Tahap penetapan bencana: Dalam penanganan kejadian bencana di Kabupaten Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik selama ini menetapkan SK Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat sebagai dasar untuk melakukan penanganan kedaruratan.	Kedepannya akan diupayakan agar bupati mengeluarkan SK Penetapan Bencana ataupun SK Tanggap Darurat yang minimal menyatakan lokasi kejadian dan dampak yang ditimbulkan.
1.4	Tahap pengumpulan data rumah: Proses pengumpulan data rumah memerlukan waktu yang relatif lama, sedangkan penanganan rumah akibat bencana membutuhkan waktu secepat-cepatnya, sehingga untuk rumah yang mengalami kerusakan ringan, masyarakat tidak mau menunggu proses penyelesaian yang diperlukan dan lebih memilih untuk memperbaiki kerusakan rumah secara swadaya. Disamping itu, Kurangnya koordinasi dengan Tim Satgas Bencana sehingga bencana yang terjadi tidak tersampaikan atau terlambat tersampaikan kepada OPD Teknis. Kedepannya Tim Satgas dan OPD Teknis akan secara bersama-sama dan secepatnya melaksanakan pendataan dan verifikasi dampak/ kerugian bencana.	Meningkatkan koordinasi dan mempercepat proses pelaksanaan pendataan dan verifikasi dampak/ kerugian bencana
1.5	Tahap Pengumpulan Data BNBA: Kurangnya dukungan dari masyarakat, masyarakat di lokasi rumah rawan bencana tidak memberikan dukungan dan kerjasama, tim pendataan mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap.	Koordinasi dengan pemerintah Desa agar Pemerintah Desa menginformasikan kepada masyarakat terkait data-data yang diperlukan
2.	Perhitungan Kebutuhan	
2.1	Kurangnya data yang akurat: Jika tidak memiliki data yang akurat dan lengkap tentang jumlah dan kondisi rumah rawan bencana, maka sulit untuk menghitung kebutuhan rumah bencana yang tepat.	Melaksanakan pendataan dan verifikasi langsung antara DCKPKP dengan BPBD dengan dibantu Pemerintah Desa
2.2	Kendala anggaran: Penghitungan kebutuhan rumah bencana dapat membutuhkan anggaran yang cukup besar, terutama jika harus membangun banyak rumah bencana baru atau melakukan perbaikan rumah bencana yang sudah ada.	Menyediakan anggaran APBD khusus untuk menangani kejadian bencana; Melaksanakan mekanisme Belanja Tidak Terduga Memanfaatkan CSR perusahaan
2.3	Kurangnya dukungan dari masyarakat: Jika masyarakat di lokasi rumah rawan bencana tidak memberikan dukungan dan kerjasama, maka sulit untuk	Melaksanakan pendataan dan verifikasi langsung antara DCKPKP dengan BPBD dengan dibantu Pemerintah Desa

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
	mengetahui kebutuhan rumah bencana yang sebenarnya.	
2.4	Masalah koordinasi: Terdapat beberapa masalah koordinasi yang dapat menghambat proses penghitungan kebutuhan rumah bencana, seperti kesulitan dalam mengkoordinasikan kegiatan antar berbagai pihak yang terkait, atau adanya ketidaksepakatan tentang jenis rumah bencana yang akan dibangun.	Melaksanakan pendataan dan verifikasi langsung antara DCKPKP dengan BPBD dengan dibantu Pemerintah Desa
3.	Penyusunan Rencana	
	Kendala yang dapat menghambat perencanaan dan penganggaran rumah bencana adalah Kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi sehingga perencanaan dan penganggaran di awal tahun	- Menyediakan anggaran APBD khusus untuk menangan kejadian bencana; - Melaksanakan mekanisme Belanja Tidak Terduga - Memanfaatkan CSR perusahaan
4.	Pelaksanaan	
	Proses pengumpulan data hingga Pelaksanaan relaisasi bantuan untuk rumah bencana memerlukan waktu yang relatif lama, sedangkan penanganan rumah akibat bencana membutuhkan waktu secepat-cepatnya, sehingga untuk rumah yang mengalami kerusakan ringan, masyarakat tidak mau menunggu proses penyelesaian yang diperlukan dan lebih memilih untuk memperbaiki kerusakan rumah secara swadaya. Capaian SPM Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten Gresik tahun 2023 sebesar 35,71%, capaian ini diperoleh dari data realisasi di bidang pertanahan, di mana terdapat target 14 lokasi tanah/rumah yang akan dibebaskan untuk kegiatan pembebasan lahan pada sempadan Kali Lamong, namun hanya dapat dilaksanakan pada 5 tanah/rumah, dikarenakan belum ada kesepakatan herga nilai ganti rugi antara pemerintah daerah dengan masyarakat.	Meningkatkan koordinasi dan mempercepat proses pelaksanaan pendataan dan verifikasi dampak/ kerugian bencana

4.5. SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Teknis Pelayanan Sub Urusan Trantibum adalah ketentuan terkait mutu pelayanan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota . Adapun SPM dibidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

Tabel III.E.1 1 Jenis Pelayanan Dasar SPM Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

No	Kategori	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	Kategori pencapaian trantibum	1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
2	Kategori pencapaian kebencanaan	1. Pelayanan informasi rawan bencana
		2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
		3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

No	Kategori	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3	Kategori pencapaian damkar	1. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Damkar)

4.5.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Adapun target SPM dibidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

Tabel III.E.2 1 Target SPM Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota	5,186	Tahun 2023	1. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	44	Tahun 2023
					2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	33	Tahun 2023
					3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	249	Tahun 2023
					4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	1	Tahun 2023
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	137,763	Tahun 2023	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	137,763	Tahun 2023
					3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	137,763	Tahun 2023
					4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana1	10	Tahun 2023
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	42,770	Tahun 2023	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	79	Tahun 2023
					2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	1,347	Tahun 2023
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	381,421	Tahun 2023	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam <u>penyiapan petugas penanganan darurat bencana</u>)	4	Tahun 2023
					2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	381,421	Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	580	Tahun 2023	3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	2	Tahun 2023
					4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	2	Tahun 2023
					5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	381,421	Tahun 2023
					1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, <u>kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar</u>)	580	Tahun 2023
					2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman dst.)	2	Tahun 2023
					3. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh: mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, dll.)	63	Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					4. Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparaturnya SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	5	Tahun 2023
					5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	580	Tahun 2023
					6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	580	Tahun 2023

4.5.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah. Tahun 2023 capaian SPM urusan Trantibumlinmas Kabupaten Gresik mencapai angka 93,33% dengan lima jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel III.E.5. 1 Realisasi Capaian Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2023

No	Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Capaian	Prosentase Capaian			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara Kabupaten/Kota	5,186	5,186	100.00 %	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	44	44	100.00 %
						2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	33	33	100.00 %
						3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	249	249	100.00 %

No	Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Prosentase Capaian			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	1	1	100.00 %
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	137,763	137,763	100.00%	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	1	100.00 %
						2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	137,763	137,763	100.00 %
						3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	137,763	137,763	100.00 %

No	Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Capaian	Prosentase Capaian			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	10	10	100.00 %
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	42,770	42,770	100.00%	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	79	79	100.00 %
						2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	1,347	1,347	100.00 %
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan	381,421	381,421	100.00%	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam	4	4	100.00 %

No	Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Capaian	Prosentase Capaian			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
	korban bencana	dan evakuasi korban bencana				penyiapan petugas penanganan darurat bencana)			
						2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	381,421	381,421	100.00 %
						3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	2	2	100.00 %
						4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	2	2	100.00 %
						5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	381,421	381,421	100.00 %
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh	580	911	100.00 %	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap	580	911	100.00 %

No	Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Prosentase Capaian				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
	korban kebakaran	layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran				memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)			
						2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	2	2	100.00 %
						3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	63	63	100.00 %

No	Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Prosentase Capaian			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani
					4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	5	5	100.00 %
					5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	580	911	100.00 %
					6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	580	911	100.00 %

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

Tabel III.E.3 1 Anggaran Penerapan SPM Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	3,915,716,031	3,687,225,027	94.16%
	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	800,432,800	796,064,850	99.45%
	1. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	606,013,900	604,923,000	99.45%
	2. Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	72,674,900	72,621,350	99.93%
	4. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	20,844,000	18,125,500	86.96%
	5. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	100,900,000	100,395,000	99.50%
	2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	3,083,049,431	2,859,676,377	92.75%

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	1. Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2,175,397,731	2,151,861,702	98.92%
	2. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	60,969,700	60,175,550	98.7%
	3. Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	846,682,000	647,639,125	76.49%
	3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	32,233,800	31,483,800	97.67%
	1. Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	32,233,800	31,483,800	97.67%
2.	Program Penanggulangan Bencana (KEBENCANAAN)	2,882,280,125	1,894,395,865	65.73 %
	4. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	59,251,400	58,730,800	99.12%
	2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenisbencana)	59,251,400	58,730,800	99.12%
	5. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	997,876,000	850,486,840	85.23 %
	2. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	567,890,000	560,519,840	98.70%
	3. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	29,474,000	29,466,200	99.97 %
	4. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	62,710,000	61,780,000	98.52%
	5. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	20,180,000	20,151,200	99.07%
	8. Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	69,025,000	65,499,000	94.89%
	9. Penyusunan rencana kontijensi	135,425,000	0	0%

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	10. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	113,172,000	113,070,600	99.91%
	6. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1,552,277,625	811,570,350	52.28 %
	2. Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	198,652,000	184,937,300	93.10%
	4. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	1,305,625,625	624,983,050	47.87%
	6. Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	48,000,000	1,650,000	93.52%
	7. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	272,875,100	173,607,875	63.62%
	2. Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	34,624,500	32,852,500	94.88 %
	4. Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem informasi Kebencanaan	90,320,00	0	0%
	5. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	20,168,000	19,097,000	94.69 %
	6. Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	127,762,600	121,658,375	95.22%
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)	3,554,471,586	3,441,073,736	99.68 %
	8. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3,452,149,186	3,441,073,736	99.68 %
	1. Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	2,121,460,000	2,114,760,000	99.68 %
	2. Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	354,146,000	353,877,292	99.92 %
	5. Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	333,990,000	333,149,838	99.75 %

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
6.	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	603,417,000	600,156,000	99.46%
7.	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	39,136,186	39,130,606	99.99%
9.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	23,438,000	23,418,470	99.92 %
1.	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	23,438,000	23,418,470	99.92
11.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	78,884,400	78,807,720	99.90 %
1.	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	78,884,400	78,807,720	99.90 %

4.5.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di tangani oleh 3 organisasi perangkat daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran.

➤ Kategori pencapaian trantibum mempunyai dukungan personil sebagai berikut:

Tabel III.E.4. 1 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Pencapaian Trantibum Tahun 2023

No	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
1.	Jabatan Struktural	11
	Eselon II	1
	a. Pangkat/Golongan:	
	Pembina Tingkat I / (IV/c)	1
	b. Pendidikan:	
	Strata 2 (S2)	1
	Eselon III	3

No	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
	a. Pangkat/Golongan:	
	Pembina Tingkat I / (IV/b)	1
	Pembina / (IV/a)	1
	Penata Tk. I/ (III/d)	1
	b. Pendidikan:	
	Strata 2 (S2)	2
	Strata 2 (S1)	1
	Eselon IV	7
	a. Pangkat/Golongan:	
	Pembina / (IV/a)	1
	Penata Tk.1 / (III/d)	5
	Penata Muda Tk.1 / (III/b)	1
	b. Pendidikan:	
	Strata 2 (S2)	2
	Strata 1 (S1)	4
	SMA	1
2.	Jabatan Fungsional Tertentu	88
	a. Pangkat Golongan:	
	Penata Muda / (III/a)	13
	Pengatur Tingkat I / (II/d)	66
	Pengatur Muda Tk. I / (II/b)	9
	b. Pendidikan:	
	Strata 1 (S1)	13
	SLTA	75
3.	Jabatan Fungsional Umum	16
	a. Pangkat Golongan:	
	Penata Tk.1 / (III/d)	1
	Penata Muda / (III/a)	6
	Pengatur Tingkat I / (II/d)	2
	Pengatur / (II/c)	4
	Pengatur Muda / (II/a)	1
	Juru Tingkat I / (I/d)	2
	b. Pendidikan :	
	Strata 1 (S1)	7
	Diploma 3 (D3)	4
	SMA	3
	SMP	2
4.	Non ASN	133
	Total	248

- Kategori pencapaian kebencanaan mempunyai dukungan personil sebagai berikut:

Tabel III.E.4. 2 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Pencapaian Kebencanaan Tahun 2023

No.	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
1	Jabatan Struktural	6
	Eselon II	1
	a. Pangkat/Golongan	
	Pembina Utama Muda / (IV/c)	1
	b. Pendidikan	
	Strata Dua (S2)	1
	Eselon III	4
	a. Pangkat/Golongan	
	Pembina / (IV/a)	4
	b. Pendidikan	
	Strata Dua (S2)	3
	Strata Satu (S1)	1
	Eselon IV	1
	a. Pangkat/Golongan	
	Penata Tk.I / (III/d)	1
	b. Pendidikan	
	Strata Satu (S1)	1
2	Jabatan Fungsional Tertentu	6
	a. Pangkat/Golongan	
	Penata Tk.I / (III/d)	6
	b. Pendidikan	
	Strata Satu (S1)	6
3	Jabatan Fungsional Umum	8
	a. Pangkat/Golongan	
	Penata / (III/c)	2
	Penata / (III/a)	3
	Pengatur / (II/c)	2
	Pengatur Muda Tk.I / (II/b)	1
	b. Pendidikan	
	Strata Satu (S1)	4
	Diploma III (D3)	2
	SMA	2
4	Non ASN	20
	Strata Satu (S1)	7
	Diploma III (D3)	2
	SMA	11
	TOTAL	47

- Kategori pencapaian damkar mempunyai dukungan personil sebagai berikut:

Tabel III.E.4. 3 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan
Trantibumlinmas Pencapaian Damkar Tahun 2023

No.	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
1	Jabatan Struktural	10
	Eselon II	1
	a. Pangkat/Golongan	
	Pembina Utama Muda / (IV/c)	1
	b. Pendidikan	
	Strata Dua (S2)	1
	Eselon III	3
	a. Pangkat/Golongan	
	Pembina / (IV/a)	2
	Pembina / (IV/b)	1
	b. Pendidikan	
	Strata Dua (S2)	2
	Strata Satu (S1)	1
	Eselon IV	6
	a. Pangkat/Golongan	
	Pembina / (IV/a)	2
	Penata Tk.I / (III/d)	3
	Penata / (III/c)	1
	b. Pendidikan	
	Strata Dua (S2)	3
	Strata Satu (S1)	3
2	Jabatan Fungsional Tertentu	-
	a. Pangkat/Golongan	-
	b. Pendidikan	-
3	Jabatan Fungsional Umum	20
	a. Pangkat/Golongan	
	Penata Muda Tk.I / (IIIbd)	5
	Penata Muda / (III/a)	4
	Pengatur Tk. I / (II/d)	9
	Pengatur Muda Tk.I / (II/b)	2
	b. Pendidikan	
	Strata Satu (S2)	1
	Strata Satu (S1)	5
	SMA	11
	SMP	1
4	Non PNS	90
	Strata Satu (S1)	21
	Diploma III (D3)	6
	SMA	61
	SMP	1
	SD	1
	TOTAL	120

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam bidang urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah :

➤ Kategori pencapaian trantibum

Tabel III.E.6. 1 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Pencapaian Trantibum

No.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pengumpulan Data	
	Form memerlukan data dukung yang terlalu rumit sehingga petugas kesulitan untuk mengisi form tersebut	Agar form tersebut dibuat lebih sederhana
2.	Perhitungan Kebutuhan	
	Adanya refocusing anggaran sehingga kebutuhan yang sudah direncanakan susah untuk direalisasikan.	Agar ada penambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan Satpol PP Kabupaten Gresik
3.	Penyusunan Rencana	
	Tidak ada permasalahan, hanya menyesuaikan saja dengan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020	-
4.	Pelaksanaan	
	Tidak bisa mengisi pada bagian ganti rugi material dan biaya pengobatan, karena Satpol PP Kabupaten Gresik tidak menganggarkan kegiatan tersebut.	Akan dianggarkan untuk kegiatan tersebut

➤ Kategori pencapaian kebencanaan

Tabel III.E.6. 2 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan
Trantibumlinmas Pencapaian Kebencanaan

No.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pengumpulan Data	
	Pengisian formulir pengumpulan data menyangkut kerahasiaan data pribadi warga negara di kawasan rawan bencana (by name, by address, by NIK)	Integrasi sistem informasi kebencanaan dengan sistem informasi desa, sistem informasi kesejahteraan sosial, sistem informasi kependudukan dan sistem informasi pemerintahan daerah.
2.	Perhitungan Kebutuhan	
	Waktu yang lama karena Banyaknya form yang harus diisi sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2021 untuk menghitung kebutuhan pelayananan pada sub urusan bencana	Aplikasi yang diterapkan dengan standar yang ada akan memberikan jembatan untuk menganalisis data yang lebih baik dan komprehensif
3.	Penyusunan Rencana	
	Tidak ada permasalahan, hanya menyesuaikan saja dengan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020	-
4.	Pelaksanaan	
	Keterbatasan APBD untuk membiayai semua kegiatan pendukung SPM	Memaksimalkan APBD yang ada untuk pelaksanaan kegiatan pendukung SPM

➤ Kategori pencapaian pemadam kebakaran

Tabel III.E.6. 3 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan
Trantibumlinmas Pencapaian Pemadam Kebakaran

No.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pengumpulan Data	
	Tidak ada masalah	Setiap kejadian selalu dilaporkan dan direkap setiap 1 bulan sekali
2.	Perhitungan Kebutuhan	
	Kebutuhan sarana dan prasarana didasarkan luas wilayah, kepadatan dan tingkat kesulitan lokasi	Membentuk Forum Damkar yang beranggotakan para pelaku usaha, melakukan Kerjasama kepada perusahaan yang memiliki armada Pemadam Kebakaran
3.	Penyusunan Rencana	
	Keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga sulit untuk diwujudkan pemenuhan sarana dan prasarananya	1. Mengajukan Tambahan Anggaran 2. Bekerjasama dengan pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian Kegiatan CSR nya
4.	Pelaksanaan	
	Belum sesuai ketentuan sebagaimana yang diharapkan sesuai Permendagri No 114 tahun 2018 tentang Standart pelayanan Minimal	Meningkatkan kegiatan Pemberdayaan masyarakat tentang bahaya kebakaran dan pencegahan sejak dini

4.6. SPM Bidang Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh daerah dibidang Urusan Sosial antara lain:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti sosial;
2. Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti sosial;
3. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti sosial;
4. Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.

4.6.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Tabel III.F.2. 1 Target SPM Urusan Sosial Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti	Jumlah warga penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di panti	867	Tahun 2023	Layanan data dan pengaduan	150	Tahun 2023
					Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	150	
					Penyediaan permakanaan	313	
					Penyediaan sandang	3	
					Penyediaan alat bantu	88	
					Penyediaan perbekalan kesehatan (penyediaan P3K)	3	
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritua, dan sosial	4	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	60	
					Fasilitan pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akte kelahiran, surat nikah, dan /atau kartu identitas anak/ bukti dokumen kependudukan	85	
					Akses kelanyanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	4	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar Panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	7,886	Tahun 2023	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2	Tahun 2023
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2	
					Layanan rujukan	3	
					Layanan data dan pengaduan	250	
					Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	250	
					Penyediaan permakanaan	127	
					Penyediaan sandang	1	
					Penyediaan perbekalan kesehatan (penyediaan P3K)	45	
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritua, dan sosial	6,795	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	45	
					Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akte kelahiran, surat nikah, dan /atau kartu identitas anak/ bukti dokumen kependudukan	30	
					Akses kelanyanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitas	267	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					layanan pendidikan dan kesehatan		
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	12	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	12	
					Layanan rujukan	52	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	21,51	Tahun 2023	Layanan data dan pengaduan	50	Tahun 2023
					Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	50	
					Penyediaan permakanaan	2,267	
					Penyediaan sandang	300	
					Penyediaan alat bantu	4	
					Penyediaan perbekalan kesehatan (penyediaan P3K)	251	
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritua, dan sosial	18,286	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar	13	
					Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akte kelahiran, surat nikah/ bukti dokumen kependudukan	3	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti	842	Tahun 2023	Akses kelanyanan kesehatan dasar /fasilitas layanan kesehatan	256	Tahun 2023
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	10	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10	
					Layanan rujukan	10	
					Layanan data dan pengaduan	104	
					Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	104	
					Penyediaan permakanaan	104	
					Penyediaan sandang	104	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti	842	Tahun 2023	Penyediaan perbekalan kesehatan (penyediaan P3K)	80	Tahun 2023
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritua, dan sosial	57	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	5	
					Fasilitan pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akte kelahiran, surat nikah	24	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					dan/atau kartu identitas anak/ bukti dokumen kependudukan		
					Akses kelanyanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	80	
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	50	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	50	
					Layanan rujukan	80	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat & pasca	5,545	Tahun 2023	Penyediaan pemakanan	5,343	Tahun 2023
					Penyediaan sandang	100	
					Penyediaan tempat penampungan pengungsi	3.	
					Penanganan khusus bagi	31	
					Pelayanan dukungan psikososial	68	
					Melakukan pengumpulan data,perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/ kegiatan/ sub kegiatan (di lakukan dengan mengunggah dokumen from	0	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					dan/ atau dokumen pendukung lainnya		

4.6.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Tahun 2023 capaian spm urusan sosial Kabupaten Gresik mencapai angka 98,31% dengan lima jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel III.F.5. 1 Realisasi Capaian Penerpan SPM Urusan Sosial Tahun 2023

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Target	Prosentase Target	Jumlah Capaian	Prosentase Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi social diluar panti	566	100 %	555	98 %
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar Panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	14,404	100 %	13,953	97 %
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	19,217	100 %	19,196	100 %
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	1,032	100 %	1,024	99 %
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima	2,544	100 %	2,532	100 %

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Target	Prosentase Target	Jumlah Capaian	Prosentase Capaian
	bagi korban bencana	perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat & pasca				

4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Adapun alokasi dana Bidang Urusan Sosial antara lain:

Tabel III.F.3. 1 Anggaran Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2023

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	URUSAN SOSIAL KAB.GRESIK	6,587,024,920	6,317,774,983	95.91 %
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6,587,024,920	6,317,774,983	95.91 %
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	6,495,789,920	6,226,539,983	95.86 %
3.	Penyediaan alat bantu	180,207,500	179,617,572	99.67 %
5.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	6,001,669,400	5,740,689,081	95.65 %
6.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	50,950,000	49,950,000	98.04

7. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	22,266,200	22,266,200	100.0
--	------------	------------	-------

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	B. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	59,214,000	53,108,350	89.69
	C. Pemberian layanan data dan pengaduan	4,767,000	4,767,000	100.0
	10. Pemberian layanan kedaruratan	42,183,020	41,692,980	98.84 %
	12. Pemberian layanan rujukan	134,532,800	134,448,800	99.94 %
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	91,235,000	91,235,000	100.00 %
	1. Penyediaan makanan	50,000,000	50,000,000	100.00 %
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	27,900,000	27,900,000	100.00 %
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	13,335,000	13,335,000	100.00 %

4.6.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Dukungan personil pada Bidang Urusan Sosial antara lain:

Tabel III.F.4. 1 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2023

No	Jenis / Kualifikasi	Jumlah
1.	Eselon 2	1
	Eselon 3	4
	Eselon 4	1
2.	Jabatan Fungsional	7
	a. Pangkat/golongan	
	Penata Muda Tk. I (III b)	1

No	Jenis / Kualifikasi	Jumlah
	Penata (III c)	1
	Penata Tk. I (III d)	3
	Pembina (IV a)	2
	b. Pendidikan	
	S1	5
	S2	2
3.	Jabatan Struktural	13
	a. Pangkat/golongan	
	Pengatur Muda Tk. I - II/b	2
	Pengatur - II/c	1
	Pengatur Tk. I - II/d	2
	Penata Muda - III/a	6
	Penata Muda Tk. I - III/d	1
	Pembina - IV/a	1
	b. Pendidikan	
	SMA	5
	S1	7
	S2	1
4.	Non ASN	26
	a. Pendidikan	
	SMA	14
	S1	12
	TOTAL	52

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM. Adapun permasalahan SPM urusan sosial meliputi:

Tabel III.F.6. 1 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2023

No	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pengumpulan Data	
	Keterbatasan SDM saat mengumpulkan dan mengelola data dapat menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan	Pengumpulan dan pengelolaan data dilaksanakan di akhir Tahun sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai pada Tahun N
2	Perhitungan Kebutuhan	
	Kebutuhan untuk penanganan Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia Terlantar serta Tuna Sosial (terutama Gelandangan dan Pengemis) tidak dapat diprediksi karena sesuai kondisi yang ada	Karena banyaknya kebutuhan PPKS sehingga hanya pelayanan dasar yang diberikan sesuai kemampuan APBD
3	Perencanaan dan Penganggaran	
	Perencanaan dan penganggaran kurang sesuai karena adanya refoccurring anggaran	Diusahakan agar kegiatan dialokasikan untuk SPM tidak mengalami refoccurring sehingga pelayanan minimal dasar dapat terpenuhi

No	PERMASALAHAN	SOLUSI
4	Pelaksanaan	
	Keterbatasan SDM dalam pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan dibantu oleh mitra kerja Dinas Sosial seperti TKSK, Pendamping PKH, Tagana dan LK3
	Adanya penerima bantuan yang meninggal dunia, pindah domisili tanpa memberitahu petugas desa/kelurahan setempat dan ada yang menolak diberikan bantuan karena merasa sudah cukup mampu membuat bantuan sosial tidak dapat tersalur 100%	Kondisi ini tidak dapat diprediksi dan diluar jangkauan Dinas Sosial sedangkan bantuan yang diberikan harus melalui pengajuan SK Hukum terlebih dahulu
5	Lain-Lain	
	Kabupaten Gresik tidak memiliki Panti yang dikelola oleh Daerah sehingga harus berkoordinasi dengan UPT milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan jika tidak ada maka akan ditampung sementara di Shelter BLBK Cerme	Diusulkan untuk membangun Panti milik Kabupaten Gresik

4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan dijalankan segaris dengan Visi, Misi, Tujuan maupun Arah Kebijakan sebagai perwujudan pembangunan pemerintah daerah. Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan memiliki beberapa bagian, seperti berdasarkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Lintas OPD untuk kebijakan/program yang memiliki keterkaitan dengan dinas lain. Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan adalah pendekatan sektoral untuk kebijakan/program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas dan spatial untuk kebijakan atau program lintas dinas.

Program OPD

Program OPD ini merupakan program sektoral yang menjadi tanggung jawab langsung dinas teknis, seperti pertanian, industri dan perdagangan. Dengan program-program yang ada merupakan program yang tidak memiliki keterkaitan dengan program lain secara jelas dan tegas. Implementasi program OPD ini lebih mudah khususnya didalam pengorganisasiannya. Dalam arti mengingat program OPD hanya bertumpu kepada satu unit kerja tertentu.

Program Lintas OPD

Program lintas OPD ini diperlukan, karena pada beberapa permasalahan memang urusan OPD yang terkait. Tidak hanya dalam hal program, tapi juga dalam hal lintas lembaga dan lintas sumber pembiayaan. Beberapa kebijakan merupakan kewenangan suatu dinas, sedangkan yang lain merupakan kebijakan lintas OPD. Pada jenis kegiatan ini, sangat dimungkinkan kerjasama dan pembagian kerja (job description) yang jelas dan tegas. Untuk aspek perwilayahan, program – program lintas sektoral (lintas OPD) akan lebih bermanfaat dari pada program – program OPD. Untuk itu, kerjasama antar daerah merupakan faktor kunci keberhasilan program ini. Adapun program kegiatan per urusan yang dilakukan antara lain :

4.7.1 Program Kegiatan SPM Urusan Pendidikan

Adapun program kegiatan Tahun 2023 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM antara lain :

Tabel IV.A.
Program dan Kegiatan Pendukung SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	424.429.200.354
1.01.02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	167.797.046.746
1.01.02.2.01.02.	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000
1.01.02.2.01.06.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.674.196.029
1.01.02.2.01.08.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	8.745.601.867
1.01.02.2.01.12.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.105.181.405
1.01.02.2.01.14.	Pengadaan Mebel Sekolah	90.882.667
1.01.02.2.01.15.	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	433.787.971
1.01.02.2.01.16.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	4.126.286.000
1.01.02.2.01.23.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	612.065.867
1.01.02.2.01.24.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	400.000.000
1.01.02.2.01.25.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	192.300.000
1.01.02.2.01.26.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	195.070.000
1.01.02.2.01.27.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	679.923.751
1.01.02.2.01.28.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	8.251.700.000
1.01.02.2.01.29.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	139.290.051.189
1.01.02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	114.856.952.004
1.01.02.2.02.02.	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.449.211.175
1.01.02.2.02.14.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.631.655.116
1.01.02.2.02.15.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	533.241.900

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)
1.01.02.2.02.17.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	951.362.850
1.01.02.2.02.18.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	611.932.025
1.01.02.2.02.24.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	507.959.288
1.01.02.2.02.25.	Pengadaan Mebel Sekolah	-
1.01.02.2.02.27.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.309.080.000
1.01.02.2.02.35.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	307.860.000
1.01.02.2.02.36.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	395.260.936
1.01.02.2.02.37.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	400.190.000
1.01.02.2.02.38.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	450.387.568
1.01.02.2.02.40.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	377.895.500
1.01.02.2.02.41.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	6.401.082.200
1.01.02.2.02.42.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	96.529.833.446
1.01.02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	56.133.675.604
1.01.02.2.03.01.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.013.670.000
1.01.02.2.03.03.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	-
1.01.02.2.03.13.	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	190.000.000
1.01.02.2.03.14.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	37.999.820
1.01.02.2.03.16.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.159.702.634
1.01.02.2.03.17.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.462.225.150
1.01.02.2.03.18.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	52.270.078.000
1.01.02.2.04.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	85.641.526.000
1.01.02.2.04.12.	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	95.510.000
1.01.02.2.04.16.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	53.070.914.000
1.01.02.2.04.17.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	32.475.102.000

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)
1.01.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	637.973.538
1.01.03.2.01.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	234.100.000
1.01.03.2.01.01.	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	35.050.000
1.01.03.2.01.02.	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	35.050.000
1.01.03.2.01.03.	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-
1.01.03.2.01.04.	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	164.000.000
1.01.03.2.02.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	403.873.538
1.01.03.2.02.01.	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	124.854.500
1.01.03.2.02.02.	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	205.000.000
1.01.03.2.02.03.	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	74.019.038
1.01.04.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	43.670.005.781
1.01.04.2.01.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	43.670.005.781
1.01.04.2.01.01.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	43.670.005.781
1.01.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	150.000.000
1.01.05.2.01.	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	75.000.000
1.01.05.2.01.01.	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25.000.000
1.01.05.2.01.02.	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.000.000
1.01.05.2.02.	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	75.000.000

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)
1.01.05.2.02.01.	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25.000.000
1.01.05.2.02.02.	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25.000.000
1.01.05.2.02.03.	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25.000.000
1.01.06.	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	75.000.000
1.01.06.2.01.	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000
1.01.06.2.01.06.	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000
JUMLAH		468.962.179.673

4.7.2. Program Kegiatan SPM Urusan Kesehatan

Implementasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal juga menjadi sangat strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Implementasi SPM dapat memperkuat sisi promotif – preventif sehingga diharapkan akan berdampak pada penurunan jumlah kasus kuratif yang harus ditanggung oleh JKN. Berikut ini Program dan Kegiatan Pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan di Kabupaten Gresik Tahun 2023.

Program kegiatan Tahun 2023 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM antara lain :

Tabel IV.B
Program dan Kegiatan Pendukung SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	KESEHATAN MASYARAKAT		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4.	Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Balita
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan pada usia produktif
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Pelayanan Kesehatan pa
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)			Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes melitus

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat			Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Pelayanan Kesehatan orang dengan terduga tuberculosis
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)			Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)

4.7.3. Program Kegiatan SPM Urusan Pekerjaan Umum

Program kegiatan Tahun 2023 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM antara lain :

Tabel IV.C
Program dan Kegiatan Pendukung SPM Urusan Pekerjaan Umum 2023

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan
				2. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan
				3. Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan
				4. Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM
				5. Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman
				2. Pembangunan/ penyediaan sub sistem pengolahan setempat
				3. Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
				4. Pembangunan/ penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman
				5. Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja
				6. Rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan sarana dan prasarana IPLT

4.7.4. Program Kegiatan SPM Urusan Perumahan Rakyat

Program kegiatan Tahun 2023 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM antara lain :

Tabel IV.D
Program dan Kegiatan Pendukung SPM Urusan Perumahan Rakyat 2023

N O	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	a. Program Pengembangan Perumahan	1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota
			2. Penunjang urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	a. Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
		b. Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota

4.7.5. Program Kegiatan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program kegiatan Tahun 2023 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM antara lain :

- Kategori pencapaian trantibum

Tabel IV.E.1
Program dan Kegiatan Pendukung SPM Urusan Trantibumlinmas (Trantibum) Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
				2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
				3. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum
				4. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
			2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1. Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
				2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				dan Peraturan Bupati/Walikota
				3. Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
			3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1. Pengembangan kapasitas dan karier PPNS

➤ Kategori pencapaian kebencanaan

Tabel IV.E.2
Program dan Kegiatan Pendukung SPM Urusan Trantibumlinmas
(Kebencanaan) Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
				2. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
				3. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Kesiapsiagaan terhadap Bencana
				4. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan terhadap Bencana
				5. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
				6. Penyusunan Rencana Kontijensi
				7. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Program Penanggulangan Bencana	1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 3. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit

➤ Kategori pencapaian damkar

Tabel IV.E.2

Program dan Kegiatan Pendukung SPM Urusan Trantibumlinmas (Damkar)
Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Damkar)	1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
			3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

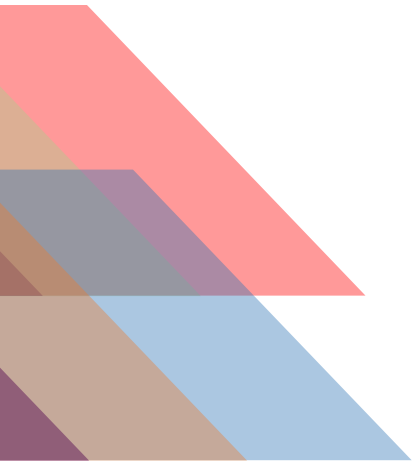
4.7.6. Program Kegiatan SPM Urusan Sosial

Program kegiatan Tahun 2023 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM antara lain :

Tabel IV.F.
Program dan Kegiatan Pendukung SPM Urusan Sosial Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Rehabilitasi Sosial	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	1. Penyediaan Alat Bantu 2. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 3. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Rehabilitasi Sosial	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	2. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 3. Pemberian Layanan Rujukan
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Rehabilitasi Sosial	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 2. Pemberian Layanan Rujukan
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Rehabilitasi Sosial	1. Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	1. Pemberian Layanan Kedaruratan 2. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 3. Pemberian Layanan Rujukan
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Bencana	1. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	1. Penyediaan Makanan 2. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 3. Pelayanan Dukungan Psikososial



PENUTUP





BAB V PENUTUP

Sebagai kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka struktur, ruang lingkup dan substansi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 disusun berdasar mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sedangkan, secara teknis penyusunannya berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Desember 2023 Nomor : 100.2.2.7/8697/OTDA Perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada beberapa aspek pokok yaitu :

- Indikator Capaian Kinerja Makro Pembangunan kabupaten selama Tahun 2023 terutama dalam aspek ekonomi.
- Capaian kinerja sektoral kabupaten kabupaten selama tahun 2023, baik untuk urusan wajib dan pilihan, Urusan Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum.
- Capaian kinerja penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi dan otonomi daerah baik pada tataran pengambil kebijakan output dan outcome
- Capaian kinerja penyelenggaraan tugas pembantuan selama tahun 2023, dan
- Capaian kinerja penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan daerah.
- Capaian Pelaksanaan SPM

Sebagai instrument evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, LPPD Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi wahana bagi pemerintah tingkat atas, khususnya Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk melakukan pembinaan secara substansial kepada Kabupaten Gresik dalam rangka hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antar hirarki pemerintahan dari pusat sampai ke daerah/kota. Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota yang dilakukan selama tahun 2023, nampak ada perbaikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang dicapai, dengan indikator-indikator ekonomi dan kesejahteraan yang positif serta cukup memadai. Kondisi tersebut bahkan dapat dianggap menjadikan Kabupaten Gresik tetap menjadi barometer pertumbuhan ekonomi secara regional.



Demikian juga penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tatanan pengambilan kebijakan, pelaksana kebijakan dan penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, secara umum menunjukkan perbaikan kinerja yang semakin baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan tingkat daya guna dan hasil guna yang semakin tinggi. Namun demikian, karena adanya keterbatasan sumber daya pembangunan yang dapat dikelola, maka belum seluruh tugas dan kewajiban urusan pemerintahan daerah dapat diselenggarakan secara optimal. Urusan-urusan pembangunan kabupaten yang sampai saat ini membutuhkan perhatian bersama dalam hirarki pemerintahan pusat dan daerah adalah antara lain urusan pekerjaan umum, perhubungan, pendidikan, kesehatan, perumahan permukiman dan beberapa dimensi ekonomi sosial lainnya. Permasalahan dan tantangan pembangunan tersebut diyakini hanya diatasi secara bertahap dan berkelanjutan dengan dukungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat.

Akhirnya, perkenankan kami atas nama Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan kabupaten Gresik di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi mewujudkan kesejahteraan bersama.